



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PANGKALPINANG
2013**



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471)
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012).

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJMD dan mengacu kepada RKP Tahun 2014 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, sumber pendanaan dan prakiraan maju yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD Tahun 2014 berfungsi sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja-SKPD;
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi Tahun Anggaran 2014;
 - c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2014.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD;
 - f. penetapan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbangda.
- (3) Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda penyusunan RKPD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2014 untuk:

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD;
- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala SKPD melakukan pemantauan;
- b. kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. masing-masing Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;

- d. kepala bappeda melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Mei 2013

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 27 SERI E

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN GUBERNUR NO. 28 TAHUN 2013	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I-7
1.5 Maksud dan Tujuan	I-8
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2012	II-1
2.1. Gambaran Umum	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-4
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-8
2.1.1.4. Demografi	II-10
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-11
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-23
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..	II-32
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-33
2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib	II-33
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-44
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-44
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-44
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-45
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-46
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-47

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPd sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-48
2.3. Pokok-Pokok Fikiran DPRD	II-176
2. 4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-201
2.4.1. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-207
2.4.1.1. <i>Four Track Strategy</i>	II-207
2.4.1.2. Millenium Development Goals (MDGs)	II-208
2.4.1.3. Standar Pelayanan Minimal	II-215
2.4.1.4. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	II-216
2.4.1.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-217
2.4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan	II-219
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-1
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-4
3.1.1.3. PDRB Perkapita	III-7
3.1.2. Struktur Sektor Ekonomi	III-7
3.1.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB	III-9
3.1.4. Inflasi	III-9
3.1.5. Tingkat Investasi	III-11
3.1.6. Pengangguran	III-13
3.1.7. Kemiskinan	III-14
3.1.8. Ketimpangan Regional	III-15
3.1.9. Ketimpangan Pendapatan	III-15
3.1.10 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015	III-16
3.1.11 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-18

	Halaman
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-19
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-22
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-22
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-22
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-25
 BAB IV. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tema Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-10
4.3. Prioritas Pembangunan.	IV-13
4.4. Prioritas Pembangunan Kewilayahan	IV-25
 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
 BAB VI. PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta luas Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012	II-2
Tabel II.2 Luas Lahan (Ha) Menurut jenis di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-3
Tabel II.3 Data Bencana Alam di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-8
Tabel II.4 Wilayah yang berpotensi rawan bencana da jenis bencana yang terjadi di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-9
Tabel II.5 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/kota Tahun 2012	II-10
Tabel II.6 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010-2012	II-11
Tabel II.7 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012	II-13
Tabel II.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2012	II-13
Tabel II.9 Distribusi Persentase RDRB ADHB (persen)	II-14
Tabel II.10 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2012	II-16
Tabel II.11 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 s.d. 2012	II-18
Tabel II.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008-2012	II-19
Tabel II.13 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012	II-19
Tabel II.14 Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2009-2011	II-20
Tabel II.15 Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2009-2011	II-20

Tabel II.16	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 s.d 2012	II-21
Tabel II.17	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012	II-21
Tabel II.18	Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Tahun 2007 s.d 2011 di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-22
Tabel II.19	Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011	II-22
Tabel II.20	Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-23
Tabel II.21	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 s.d 2011	II-25
Tabel II.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012	II-26
Tabel II.23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012.....	II-26
Tabel II.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012.....	II-27
Tabel II.25	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-27
Tabel II.26	Perkembangan Persentase Balita dengan Gizi Buruk di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-28
Tabel II.27	Perkembangan Angka Kematian Ibu Per. 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-28

	Halaman
Tabel II-28 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 s.d 2012 .	II-29
Tabel II-29 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-29
Tabel II-30 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-30
Tabel II-31 Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011.....	II-30
Tabel II-32 Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011 (Persen).....	II-31
Tabel II-33 Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2013.....	II-32
Tabel II-34 Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Kep. Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013	II-32
Tabel II-35 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012	II-34
Tabel II-36 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012	II-35
Tabel II-37 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011.....	II-35
Tabel II-38 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011 .	II-36
Tabel II-39 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011..	II-37
Tabel II-40 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011	II-38
Tabel II-41 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-38

	Halaman
Tabel II-42 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-39
Tabel II-43 Perkembangan Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2011	II-39
Tabel II-44 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-40
Tabel II-45 Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus Terhadap Penduduk Beresiko) di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-40
Tabel II-46 Perkembangan Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-41
Tabel II.47 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011.....	II-42
Tabel II.48 Perkembangan Jumlah Posyandu Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011.....	II-42
Tabel II.49 Perkembangan Jumlah Dokter Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011	II-42
Tabel II.50 Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011	II-43
Tabel II.51 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011.....	II-44
Tabel II.52 Angka Konsumsi RT per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011.....	II-44
Tabel II.53 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011	II-45
Tabel II.54 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011	II-45
Tabel II.55 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011	II-46

	Halaman
Tabel II.56 Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011	II-46
Tabel II.57 Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2011	II-47
Tabel II.58 Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011.....	II-47
Tabel II.59 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011	II-48
Tabel II.60 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011	II-48
Tabel II.61 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012	II-49
Tabel II.62 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-53
<i>Tabel II.63 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....</i>	<i>II-176</i>
<i>Tabel II.64 Evaluasi Pelaksanaan MDGs sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>	<i>II-209</i>
<i>Tabel II.65 Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....</i>	<i>II-216</i>
<i>Tabel II.66 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah</i>	<i>II-220</i>
<i>Tabel II.67 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya</i>	<i>II-224</i>
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (milyar rupiah).....	III-2
Tabel III.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2013 (milyar rupiah)	III-2
Tabel III.3 Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Berlaku	III-3

	Halaman
Tabel III.4 Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010 -2013 Atas Dasar Harga Konstan	III-4
Tabel III.5 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 - 2013.....	III-6
Tabel III.6 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 – 2013	III-9
Tabel III.7 Struktur PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010 – 2013 (persen)	III-9
Tabel III.8 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2012	III-10
Tabel III.9 Kondisi Investasi PMA dan PMDN Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012.....	III-11
Tabel III.10 Ringkasan Perkembangan Ekspor – Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2012.....	III-12
Tabel III.11 Negara Tujuan Ekspor Timah dan Negara Asal Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2012	III-13
Tabel III.12 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2013	III-14
Tabel III.13 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2013).....	III-15
Tabel III.14 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2013)	III-16
Tabel III.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d tahun 2015	III-21
Tabel III.16 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d Tahun 2015	III-24
Tabel III.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015	III-26
Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017	IV-11

	Halaman
Tabel IV.2 Target Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	IV-13
Tabel IV.3 Keterkaitan antara Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah	IV-16
Tabel IV.4 Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.....	IV-19
Tabel IV.5 Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program MDGs.....	IV-20
Tabel IV.6 Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Mendukung Pelaksanaan SPM.....	IV-21
Tabel IV.7 Matriks Indikator Sasaran.....	IV-22
Tabel IV.8 Sebaran Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV-25
Tabel IV.9 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014	IV-26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD.....	I-4
Gambar I.2. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD.	I-7
Gambar I.3. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi	I-9
Gambar II.1. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-1
Gambar II.2. Peta Kejadian Bencana di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-9
Gambar II.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2012	II-10
Gambar II.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2012	II-12
Gambar II.5. PDRB Perkapita Kep. Bangka Belitung Tahun 2010 - 2012.....	II-15
Gambar II.6. Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012.	II-16
Gambar II.7. Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2011-2012	II-17
Gambar II.8. Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011 – 2012).....	II-17
Gambar II.9. Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2012).....	II-18
Gambar II.10. Banyaknya Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera Tahun 2011 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-23
Gambar II.11. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011	II-24
Gambar II.12. Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011.....	II-25

	Halaman
Gambar II-13 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011	II-30
Gambar II-14 Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2011	II-31
Gambar II-15 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012	II-34
Gambar II-16 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 s.d 2011.....	II-37
Gambar II-17 Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2007-2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-42
Gambar III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013	III-5
Gambar III.2 PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013.....	III-7
Gambar III.3 Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012	III-8
Gambar III.4 Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2013.	III-10
Gambar III.5 Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013	III-14
Gambar IV.1 Kerangka Fikir Keselarasan Isu Strategis dengan <i>Key Word</i> Tema Tahun 2014	IV-9
Gambar IV.2 Dekomposisi Tema menjadi Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-18
Gambar IV.3 Korelasi Prioritas Pembangunan dalam mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional	IV-20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Rogers, 1983).

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Penyelarasan RPJMD dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP.

RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
 - a. Perumusan rancangan awal RKPD. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
 - 1) Pengolahan data dan informasi.
 - 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
 - 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.

- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
 - 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
 - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
 - 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
 - 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
 - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
 - 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
 - 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- b. Penyajian rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- 1) Pendahuluan.
 - 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
 - 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
 - 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
 - 5) Rencana program prioritas daerah.
- c. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD untuk tahun ini dilakukan revitalisasi dalam pelaksanaannya, dimana terjadi penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan sharing. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:
- e. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
 - f. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
 - g. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
 - h. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
 - i. Sinergi dengan RKP.

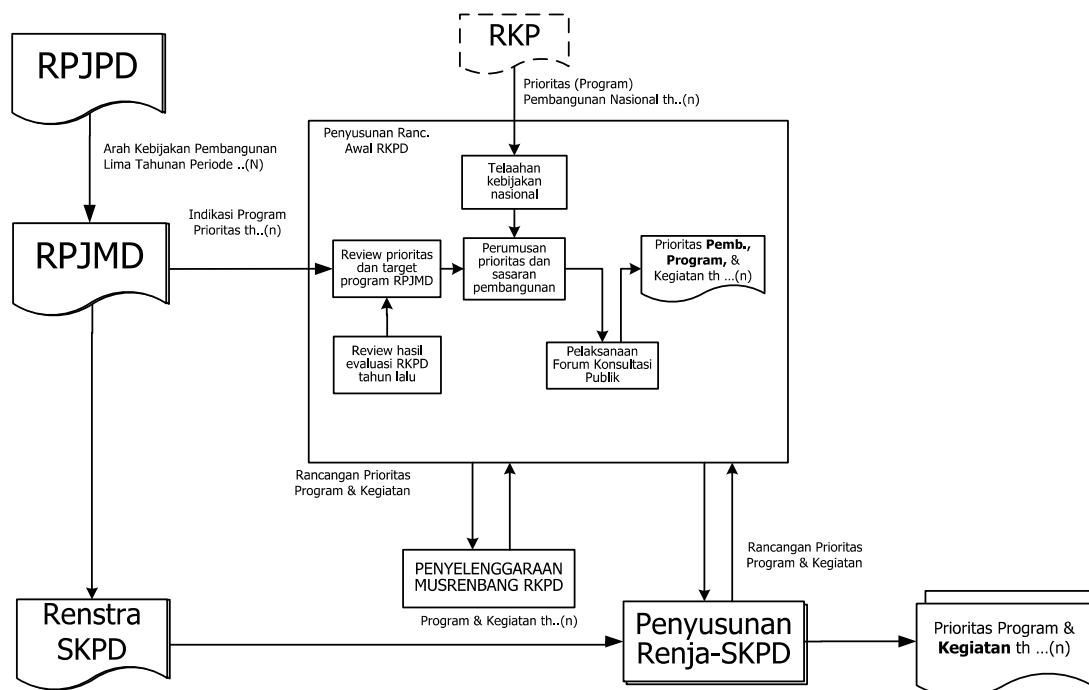
3. Perumusan rancangan akhir RKPD. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
4. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD 2012-2017, yang merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMN. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1
Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

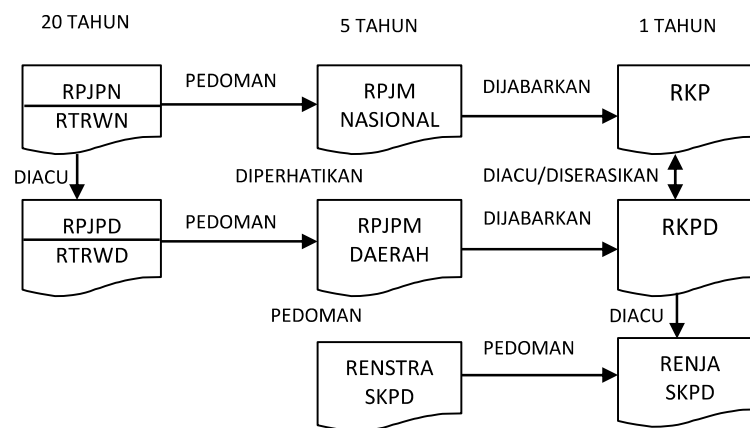
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
22. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 6 Seri A).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.2

Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

	DAFTAR ISI
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2012.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

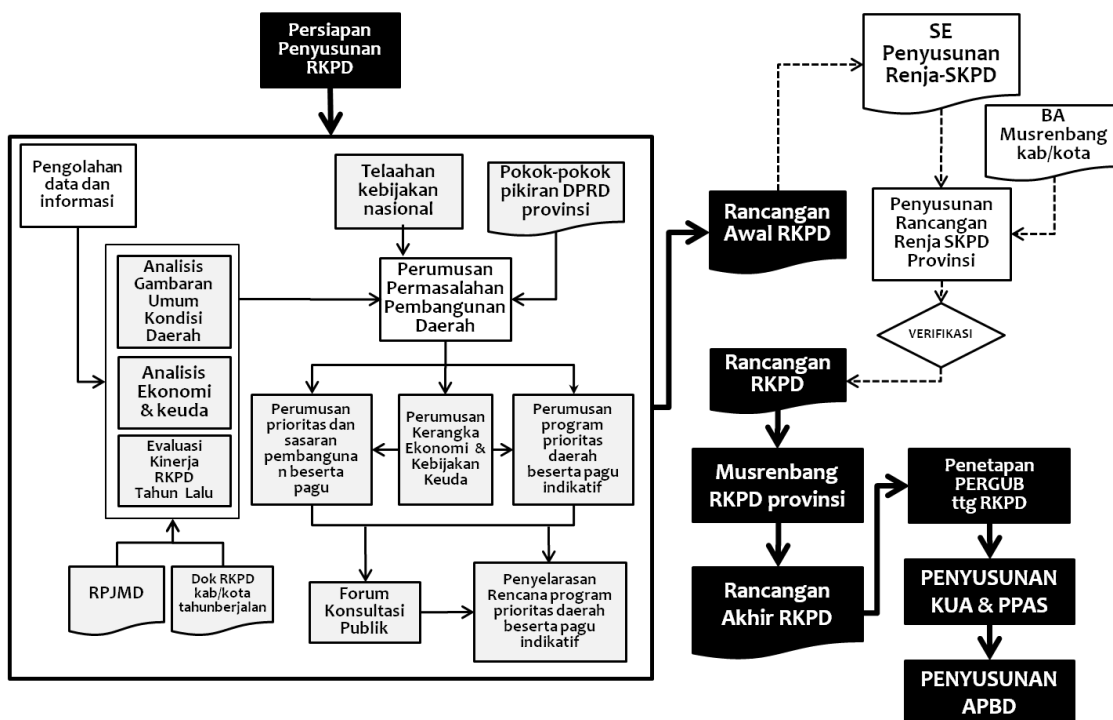
1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2014.

Gambar I.3
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2012

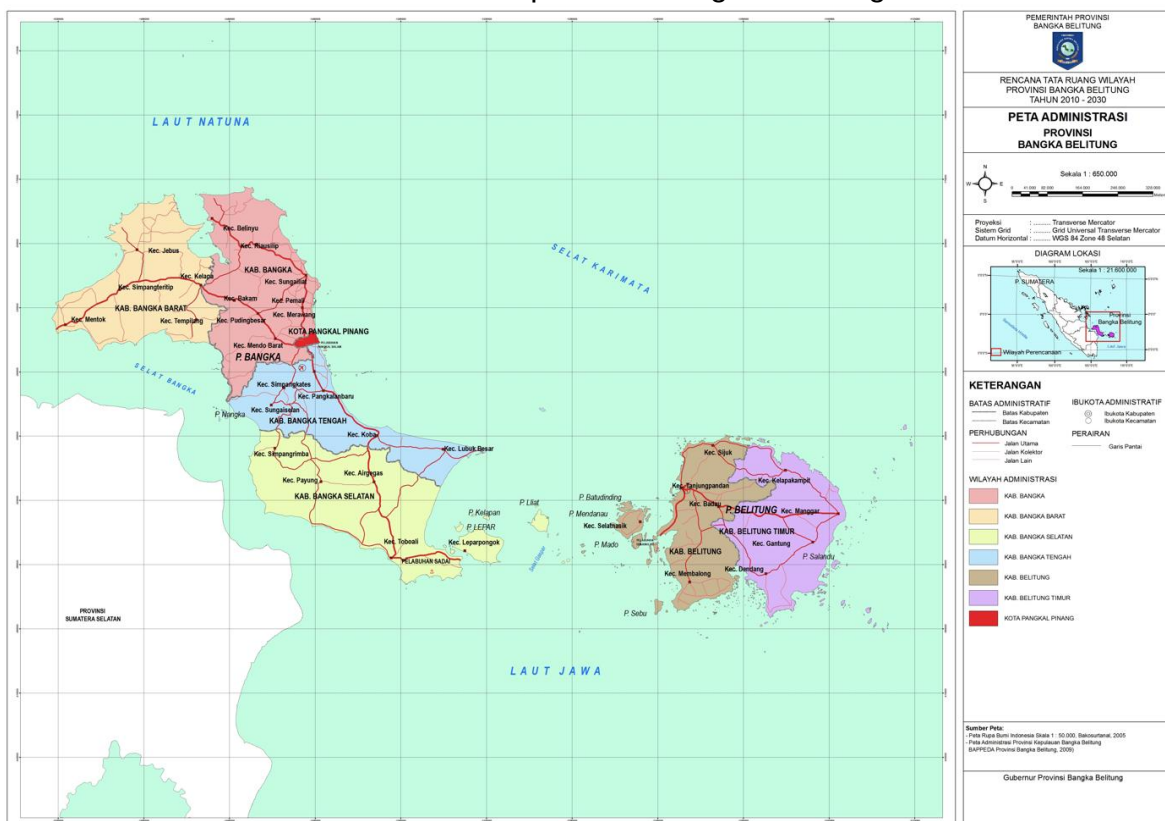
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Gambar II.1.
Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Provinsi ini secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh.

Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/
Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	61	9	2.950,68
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.280,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	50	7	2.155,77
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	46	2	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	39	-	2.506,91
Kabupaten Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	-	42	118,80
Luas Daratan					16.424,14
Luas Laut					65.301,00
Provinsi Kep. Babel		47	306	67	81.725,14

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Topografi wilayah ini secara umum relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan sebagian kecil bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka berada di puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi berada di puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan

Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

Kondisi geologinya cukup potensial untuk kawasan pengembangan hampir di seluruh wilayah. Material timah (*tin*), kaolin, kuarsa (*quartz*), dan *bilitonite* (*dikenal dengan nama "satam"*). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa lebih putih dan butirannya lebih kecil dibandingkan pasir biasa. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dan iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 25,9⁰C sampai dengan 28,3⁰C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

Penggunaan lahan masih didominasi lahan bukan pertanian (54,38%) daripada lahan pertanian. Sementara itu pada lahan pertanian, penggunaan lahan sawah hanya mencakup 2,40% dari keseluruhan lahan pertanian. Sebanyak 97,60% lahan pertanian bukan sawah. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.2.

Tabel II.2
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I.	LAHAN PERTANIAN	749.220
I.1.	Lahan Sawah	17.969
	a. Irigasi teknis	658
	b. Irigasi setengah teknis	3.449
	c. Irigasi sederhana PU	1.824
	d. Irigasi Sederhana Non PU	1.235
	e. Tadah hujan	2.781
	f. Pasang surut	372
	g. Lebak	80
	h. Lainnya	7.570
I.2.	Lahan Bukan Sawah	731.251
	a. Tegal	118.651
	b. Ladang	45.716
	c. Perkebunan	307.326
	d. Hutan rakyat	90.924
	e. Tambak	683
	f. Kolam/empang	743
	g. Pengembalaan	7.035
	h. Sementara tidak diusahakan	113.566
	i. Lain-lain	46.607

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
II. LAHAN BUKAN PERTANIAN	893.194
a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya	131.484
b. Hutan negara	394.641
c. Rawa-rawa	102.321
d. Lainnya	264.748
Jumlah	1.642.414

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2032, kawasan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. Kawasan hutan produksi, tersebar di seluruh kabupaten meliputi :
 - 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.780 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) Ha;
 - 2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.639 (enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Ha;
 - 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.083 (delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga) Ha;
 - 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 107.668 (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) Ha;
 - 5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 38.512 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas) Ha; dan
 - 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 56.633 (lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Ha.
- b. Kawasan peruntukan pertanian, seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) hektar terdiri atas:
 - 1) kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 hektar;
 - 2) kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 hektar;
 - 3) kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 hektar; dan
 - 4) kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 hektar.

Pengembangan kawasan tanaman pertanian pangan meliputi :

- 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 hektar;
- 2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 hektar;
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 hektar;
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 hektar;
- 5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 hektar;
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
- 7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 hektar.

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura meliputi :

- 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 hektar;
- 2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 hektar;
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 hektar;
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 hektar;
- 5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 hektar;
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 hektar; dan
- 7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 hektar.

Pengembangan kawasan perkebunan terdiri atas:

1) Perkebunan Besar meliputi :

- a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 hektar;
- b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 hektar;
- c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 hektar;
- d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 hektar;
- e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 hektar; dan
- f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 hektar.

2) perkebunan rakyat meliputi :

- a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 hektar;
- b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 hektar;
- c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 hektar;
- d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 hektar;
- e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 hektar; dan
- f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 hektar.

Pengembangan peternakan meliputi :

- 1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 hektar;
- 2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 hektar;
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 hektar;
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 hektar;
- 5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 hektar;
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 hektar; dan
- 7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 hektar.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

c. Kawasan perikanan, seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

- 1) perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- 2) perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan.

Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

- 1) pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas :
 - a) PPN Sungailiat;
 - b) PPN Tanjungpandan.
- 2) pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
 - a) PPI Bangka Kota;
 - b) PPI Permis;
 - c) PPI Pulau Pongok;
 - d) PPI Batubetumpang;
 - e) PPI Tanjung Sangkar;
 - f) PPI Ketapang;
 - g) PPI Batu Dinding Belinyu;
 - h) PPI Kurau;
 - i) PPI Manggar;
 - j) PPI Muntok;
 - k) PPI Sadai;
 - l) PPI Selat Nasik;
 - m) PPI Pulau Seliu;
 - n) PPI Sungai Selan;
 - o) PPI Tanjung Binga;
 - p) PPI Toboali;
 - q) PPI Selendang; dan
 - r) PPI Dendang.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan :

- 1) Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha;
- 2) Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan
- 3) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

- d. Kawasan pertambangan, kawasan darat **seluas 357.746** Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas :

- 1) Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas **8.879** Ha; dan
- 2) Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas **348.867** Ha.

Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WIP;
- 2) tidak dilakukan di kawasan hutan;
- 3) tidak dilakukan di sempadan pantai, sungai, dan jalan;

- 4) penambangan tidak menggunakan alat berat;
 - 5) pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 6) tidak dilakukan di kawasan terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kawasan industri, kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri yang meliputi :
- 1) kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
 - 3) kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4) kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
 - 5) kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - 6) kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
 - 7) kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.
- f. Kawasan pariwisata, terdiri atas :
- 1) wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu :
 - a) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - b) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - c) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - d) Taman wisata laut;
 - e) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - f) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
 - 2) wisata budaya, Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a) Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b) Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
 - c) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
 - d) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
 - e) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - f) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
 - 3) wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan

manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

- g. Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) hektar, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.
- h. Kawasan peruntukan lainnya
Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi :
 - 1) kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
 - 2) kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
 - 3) kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
 - 4) kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

2.1.1.3 Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari bencana alam, non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam berupa banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Sedangkan bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Data bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.3 dan II.4.

Tabel II.3
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindahkan	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	6	0	0	0	0	1,248	0	444	0	0	0
Gagal Teknologi	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuaca Ekstrim	9	0	0	0	0	561	0	0	67	0	579
Total	16	0	1	8	0	1,809	0	444	67	0	579

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia 2011

Tabel II.4
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, Pergerakan Tanah	Rendah
3	Bangka Selatan	Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah	Sedang
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah	Rendah, sedang
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung,	Rendah, sedang

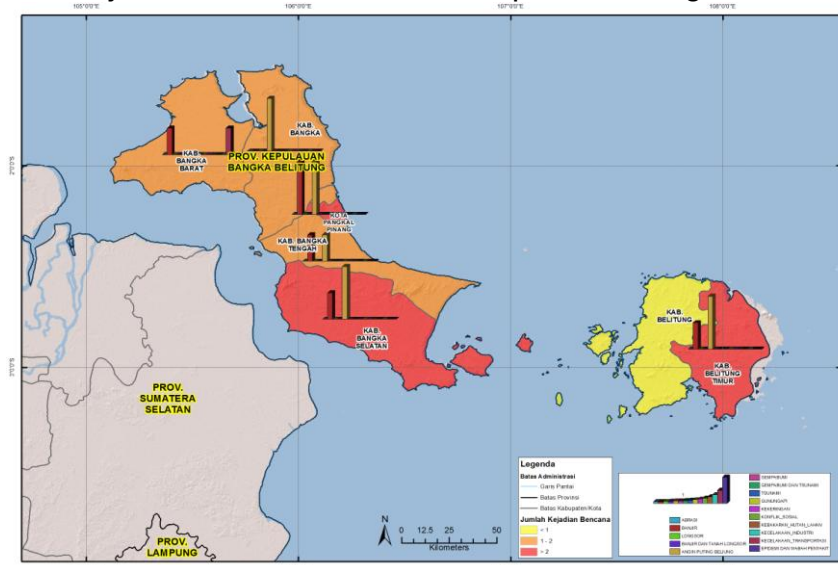
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2012

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi sebanyak 6 (enam) kejadian yang umumnya terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Bencana banjir terbesar terjadi pada tahun 2007 di Kabupaten Bangka Selatan yang menyebabkan 14 rumah rusak berat dan 76 penduduk mengungsi. Peristiwa banjir lainnya di tahun yang sama yaitu di Kota Pangkal Pinang menyebabkan 300 penduduk mengungsi.
2. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung), tercatat sebanyak 9 (sembilan) kejadian. Kejadian terburuk terjadi pada 2007 di Kabupaten Belitung menyebabkan 35 rumah rusak berat dan 73 rumah rusak ringan. Pada tahun 2008 di Kota Pangkalpinang terjadi puting beliung yang menyebabkan 472 rumah rusak ringan.

Untuk mengetahui tingkat kejadian bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar II.2.

Gambar II.2.
Peta kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



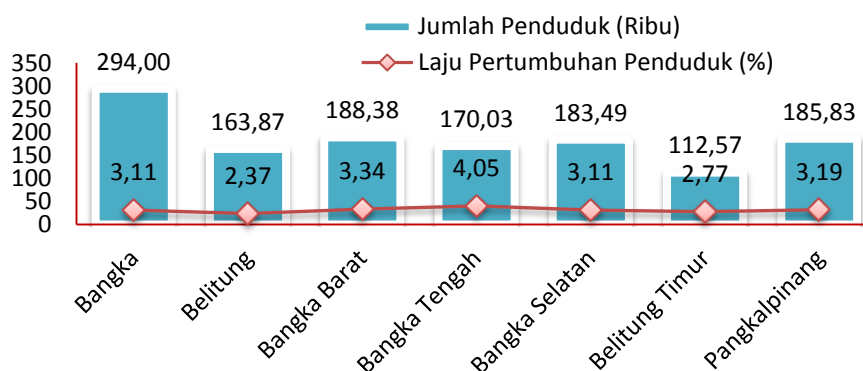
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kejadian lebih dari 2 kali untuk bencana banjir dan cuaca ekstrim, sedangkan Kabupaten Belitung tidak ada kejadian bencana di wilayah tersebut.

2.1.1.4 Demografi

Penduduk yang mendiami Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 berjumlah 1.261.737 orang dan meningkat menjadi 1.298.168 orang pada tahun 2012 (**Gambar II.3**).

Gambar II.3
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,67 persen (Tabel II.5).

Tabel II.5
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bangka	294.003	22,65	100
Belitung	163.871	12,62	71
Bangka Barat	188.376	14,51	67
Bangka Tengah	170.033	13,10	80
Bangka Selatan	183.486	14,13	51
Belitung Timur	112.569	8,67	45
Pangkalpinang	185.830	14,32	1.564

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Bangka Belitung	1.298.168	100,00	79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 adalah 79 jiwa per km². Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.564 jiwa per km², sangat berbeda dibandingkan kabupaten lainnya yang mempunyai kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa per km² atau lebih rendah. Bahkan Belitung Timur mempunyai kepadatan penduduk yang hanya sebesar 45 jiwa per km².

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat dengan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan pengangguran.

A. Pertumbuhan PDRB, struktur perekonomian dan PDRB per kapita

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai PDRB berfungsi untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan biasanya dihitung dalam waktu satu tahun. Pertumbuhan PDRB yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 sekitar 5,7% (PDRB dengan migas) dan 5,8% (PDRB tanpa migas). Hal ini menunjukkan adanya sedikit perlambatan dibanding tahun 2011 yang mencapai 6,5 persen. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor ekonomi, maka sektor konstruksi dan sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan mencapai pertumbuhan yang tertinggi, yaitu 11,0 persen. Sedangkan laju pertumbuhan yang terendah terjadi di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 1,1 persen.

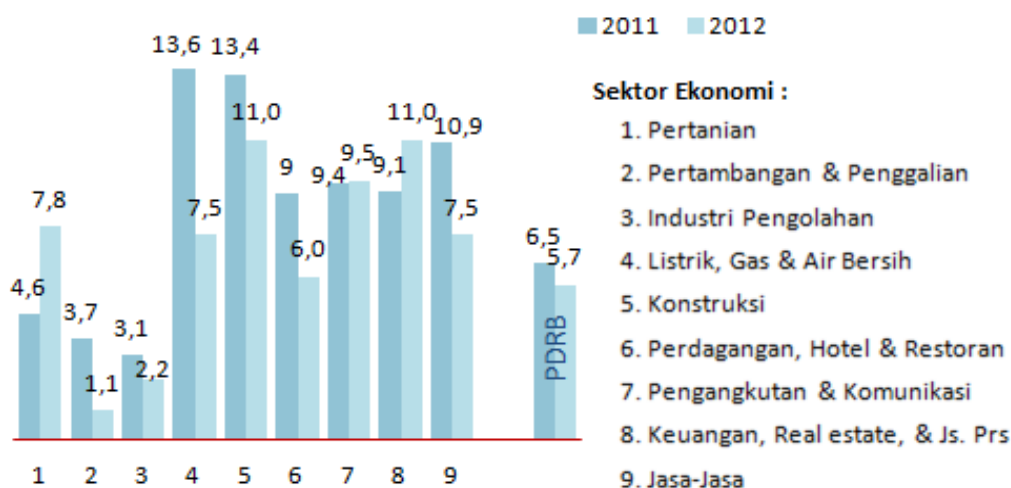
Tabel II.6
Laju Petumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2012

Lapangan Usaha	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	7,8	4,6	7,8

Lapangan Usaha	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Pertambangan & Penggalian	0,8	3,7	1,1
3. Industri Pengolahan	3,7	3,1	2,2
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8,0	13,6	7,5
5. Konstruksi	9,5	13,4	11,0
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,8	9,0	6,0
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,8	9,4	9,5
8. Keuangan, <i>Real estate</i> , & Js. Prs	9,3	9,1	11,0
9. Jasa-Jasa	10,1	10,9	7,5
PDRB Dengan Migas	6,0	6,5	5,7
PDRB Non Migas	6,1	6,5	5,8

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Gambar II.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 - 2012



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2000. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 yang diukur berdasarkan besaran PDRB ADHB (dengan migas) mencapai Rp34.325.420,18 juta. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing sebesar Rp30.415.636,61 juta dan Rp26.712.971,21 juta. Sedangkan jika dilihat ADHK 2000 besaran PDRB (dengan migas) tahun 2012 mencapai Rp12.251.022,0 juta, nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp11.587.749,30 juta (Tabel II.7 dan II.8).

Tabel II.7
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010r)	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	4.302.070	4.977.929,90	5.495.723,33	6.399.995,02
2. Pertambangan & Penggalian	4.179.531	4.687.362,44	5.128.238,83	5.413.304,77
3. Industri Pengolahan	4.971.573	5.649.559,87	6.203.050,76	6.601.892,42
4. Listrik, Gas & Air Bersih	152.781	171.599,94	209.940,42	243.418,54
5. Konstruksi	1.565.787	1.917.916,53	2.354.836,79	2.868.263,01
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	4.213.352	4.935.464,38	5.813.328,12	6.560.370,87
7. Pengangkutan & Komunikasi	746.112	847.990,01	1.000.738,46	1.185.691,19
8. Keuangan, Real estat, & Jasa Perusahaan	542.786	663.713,54	788.720,45	953.858,31
9. Jasa-Jasa	2.323.906	2.861.434,60	3.421.059,47	4.098.626,06
PDRB Dengan Migas	22.997.899	26.712.971,21	30.415.636,61	34.325.420,18
PDRB Tanpa Migas	22.434.697	26.107.442,59	29.778.686,21	33.676.666,62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Keterangan: r) angka revisi *) angka sementara**) angka sangat sementara

Tabel II.8
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2012 (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010r)	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	2.493.373,71	2.609.250,67	2.812.983,87
2. Pertambangan & Penggalian	1.523.245,61	1.579.176,33	1.597.141,41
3. Industri Pengolahan	2.359.885,34	2.433.121,85	2.485.838,95
4. Listrik, Gas & Air Bersih	60.897,38	69.170,36	74.335,94
5. Konstruksi	736.084,93	834.533,49	925.969,15
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.119.011,27	2.309.359,35	2.446.965,08
7. Pengangkutan & Komunikasi	395.544,58	432.715,87	473.684,76
8. Keuangan, Real estat, & Jasa Perusaha	397.019,31	432.950,72	480.388,06
9. Jasa-Jasa	799.885,07	887.470,67	953.714,84
PDRB Dengan Migas	10.884.947,21	11.587.749,30	12.251.022,06
PDRB Tanpa Migas	10.714.794,42	11.414.911,19	12.079.670,02

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Keterangan: r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan sektor terhadap PDRB tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan

kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Selain itu dapat diperoleh informasi sektor dominan dan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan.

Bila dilihat dari struktur perekonomian wilayah ini, terdapat 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar untuk kurun waktu 2010–2012, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2012 sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 19,23 persen diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang masing-masing sebesar 19,11 persen, 18,65 persen dan 15,77 persen (Tabel II.9).

Tabel II.9
Distribusi Persentase PDRB ADHB (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2012

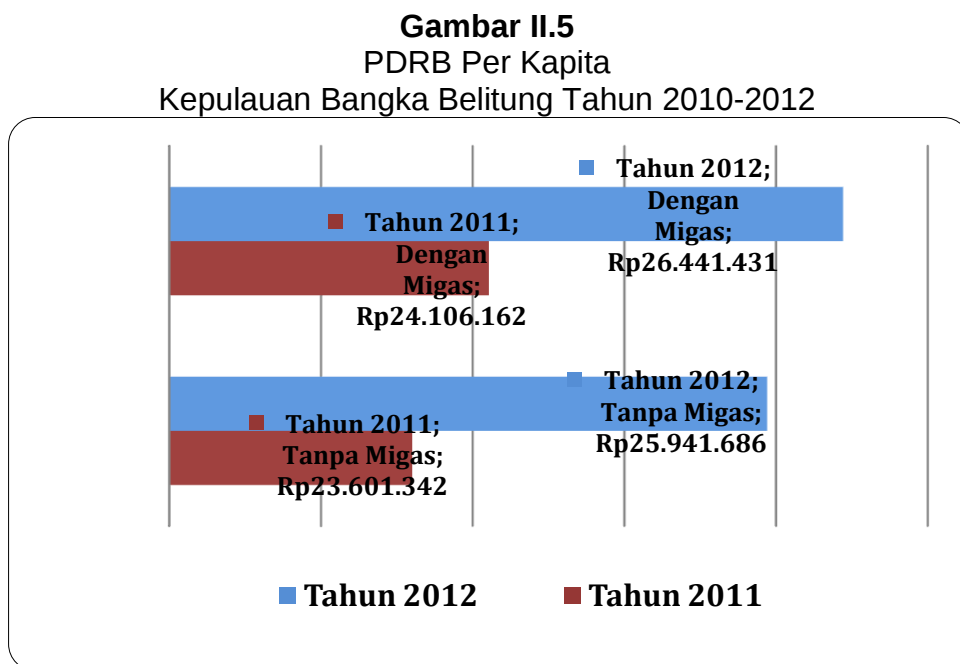
Lapangan Usaha	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	18,63	18,07	18,65
2. Pertambangan & Penggalian	17,55	16,86	15,77
3. Industri Pengolahan	21,15	20,39	19,23
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,64	0,69	0,71
5. Konstruksi	7,18	7,74	8,36
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,48	19,11	19,11
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,17	3,29	3,45
8. Keuangan, Real estate, & Js. Prs	2,48	2,59	2,78
9. Jasa-Jasa	10,71	11,25	11,94
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Jika diperhatikan lebih lanjut, terjadi pergeseran sektor-sektor yang mendominasi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2010-2012, sektor industri pengolahan menjadi sektor utama yang menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sektor dominan yang kedua mulai bergeser dari sektor pertanian pada tahun 2010 ke sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2011 dan 2012.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2011 PDRB perkapita penduduk berdasarkan harga berlaku dengan migas adalah sebesar Rp23.978.672,00 meningkat menjadi Rp25.941.686,00 pada tahun 2012. Sedangkan PDRB perkapita penduduk berdasarkan harga berlaku tanpa migas sebesar Rp23.476.613,00 meningkat menjadi Rp23.601.342,00. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan tingkat

kemakmuran penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan.



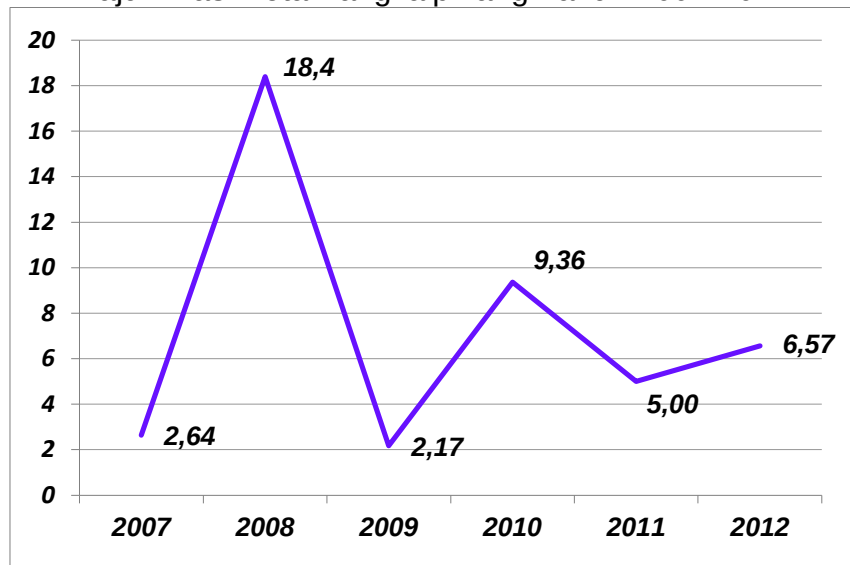
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi juga dapat berarti turunnya daya jual mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Sementara deflasi tidak selalu menunjukkan kondisi yang lebih baik, bisa juga menjadi indikasi memburuknya kesejahteraan masyarakat karena menurunnya kemampuan membeli.

Dalam periode waktu tahun 2007-2012, terjadi fluktuasi inflasi di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2007 Inflasi menunjukkan angka 2,64 persen, kemudian pada tahun 2008 inflasi meningkat tajam hingga mencapai 18,40 persen. Kenaikan harga bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang melambung membentuk besaran inflasi hingga dua digit pada tahun tersebut. Inflasi menurun pada tahun 2009 namun meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi sebesar 9,36 persen. Sedangkan pada tahun 2011, inflasi kembali menurun menjadi 5,00 persen dan pada tahun 2012 kembali meningkat pada level 6, 57 persen.

Gambar II.6
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2012



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

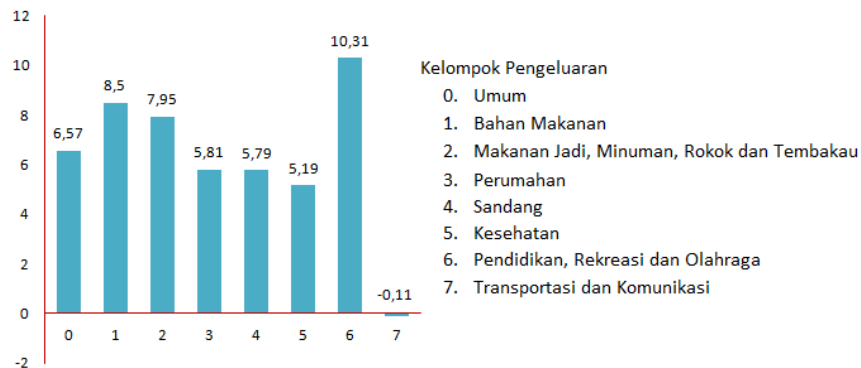
Jika dicermati menurut kelompoknya, pada tahun 2012 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami deflasi sebesar -0,11 persen, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 10,31 persen.

Tabel II.10
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2007-2012

Kelompok Pengeluaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	2,64	18,4	2,17	9,36	5,00	6,57
1. Bahan Makanan	3,63	22,88	0,54	17,68	-0,50	8,50
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,78	30,71	7,23	8,01	5,32	7,95
3. Perumahan	-1,94	16,68	1,32	4,08	7,52	5,81
4. Sandang	7,41	11,91	5,12	4,86	8,83	5,79
5. Kesehatan	2,61	14,86	5,80	2,98	7,09	5,19
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	11,63	9,29	2,80	21,33	8,73	10,31
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,54	4,60	-2,10	0,68	10,55	-0,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Gambar II.7
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2011-2012



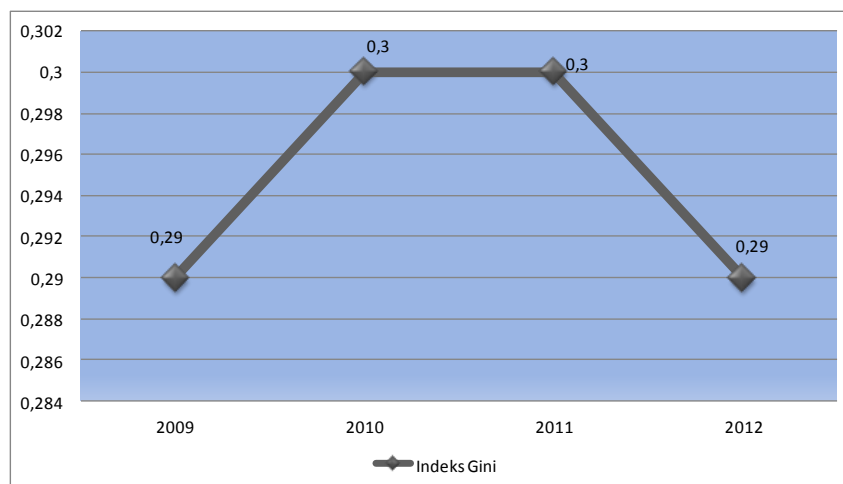
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga, diikuti kelompok bahan makanan. Inflasi yang tinggi ditenggarai semakin tingginya permintaan akan produk dan jasa terkait pendidikan, rekreasi dan olahraga sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Menurut BI

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Gambar II.8
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011 – 2012)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.8, dimana pada tahun 2011 adalah sebesar 0,30, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 0,29. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relative rendah.

D. Indeks Ketimpangan Williamson

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah $0 < IW < 1$

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

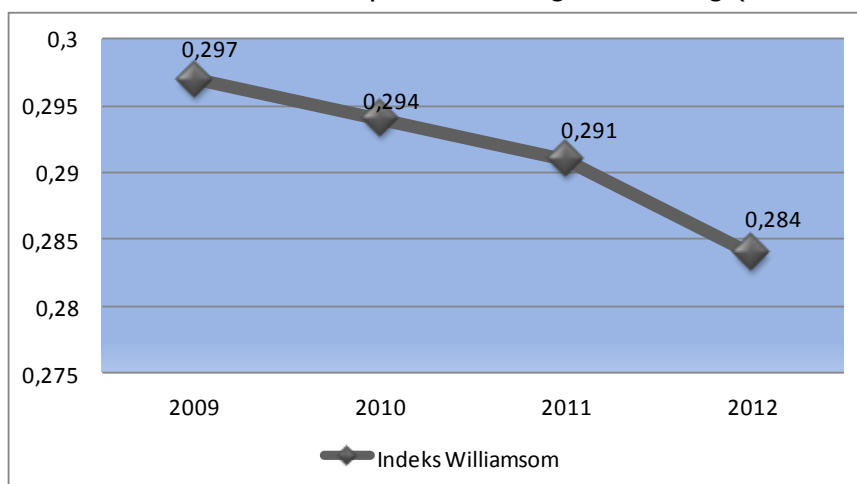
Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 angka indeks sebesar 0,297 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284. Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka interpretasinya adalah pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.9. Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar II.9
Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2012)



Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung

Meskipun angka indeks ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa pembangunan semakin mendekati merata, bukan berarti tidak terjadi kesenjangan pembangunan. Masih adanya angka 0.284 pada tahun 2012 dihasilkan dari tingginya tingkat kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang lebih cenderung memiliki pendapatan perkapita yang relative merata. Sehingga perlu dirancang suatu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

E. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2008-2011 telah mengalami penurunan, yaitu dari 7,89% pada tahun 2008 menjadi 5,16% pada tahun 2011, namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2012 menjadi 5,37%. Kemungkinan kenaikan dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah angkatan kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan masih kurang. Selain itu tingkat migrasi tinggi, sementara kualitas penduduk yang masuk tersebut relatif masih rendah. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan secara konsisten menurun dalam 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai angka terendah pada tahun 2012 (Tabel II.11).

Tabel II.11
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,89	7,37	6,51	5,16	5,37
2.	Jumlah Penduduk Miskin	80.300	76.000	67.750	65.550	70.210
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	246.169	266.843	286.330	243.729	382.412
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	1,34	1,10	0,93	0,84	0,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Tabel II.12
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 s.d. 2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	7,57	5,86	4,39	3,35	3,37
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	9,52	8,93	8,45	6,91	6,69

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Memperhatikan Tabel II.12, pada tahun 2012 Tingkat Kemiskinan Kota sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Tingkat Kemiskinan Desa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendatang yang masuk banyak menuju kota, sedangkan sektor penggerak ekonomi riil pertambangan dan pertanian mengalami pelemahan harga komoditas. Dengan demikian berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Disisi lain konsumsi masyarakat desa berkurang pada sektor jasa yang dominan di perkotaan. Sehingga penduduk kota

yang semula berada pada kelompok hampir miskin, berkurangnya pendapatan mereka menyebabkan mereka jatuh ke kelompok miskin. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan masih dominan daripada di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.13
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	5,36	15.410	315.548	0,63	0,13
2.	Kab. Belitung	6,97	11.290	416.041	0,81	0,13
3.	Kab. Bangka Barat	3,59	6.530	305.500	0,57	0,14
4.	Kab. Bangka Tengah	5,56	9.300	387.786	0,78	0,19
5.	Kab. Bangka Selatan	4,23	7.600	308.328	0,56	0,11
6.	Kab. Belitung Timur	7,13	7.880	380.813	0,90	0,24
7.	Kota Pangkalpinang	4,15	7.530	378.275	0,46	0,10

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.13, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin dan indeks keparahannya yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur. Persentase terendah adalah Bangka Barat dan indeks keparahan terendah adalah Kota Pangkalpinang.

F. Perkembangan Nilai Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan, baik Penanaman Modal Luar Negeri maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.

Tabel II.14
Perkembangan Nilai Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011

Jenis Investasi	Jumlah Proyek			Nilai Investasi		
(1)	(2)			(3)		
PMDN (miliar rupiah)	3	5	7	249,3	0,4	514,4
PMA (juta US \$)	2	22	57	22,4	22,0	146,0

G. Angka Kriminalitas

Dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, tindak pidana

yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan menurun kecuali jenis tindak pidana psikotropika yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan keamanan ditengah masyarakat. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.15.

Tabel II.15
Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2011

No (1)	Jenis Tindak Pidana (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)
1.	Pencurian/perampokan	198	217	120
2.	Penganiayaan	76	65	48
3.	Pembunuhan	11	4	-
4.	Kesusilaan	2	1	-
5.	Psikotropika	151	115	138

H. Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

I. Perkembangan sosial

Perkembangan sosial menunjukkan adanya kemajuan dari tahun ke tahun. Tabel II.16 menunjukkan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun signifikan sejak tahun 2009. Kendatipun demikian permasalahan kesejahteraan sosial tetap merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Perkembangan data sosial disajikan pada Tabel II.17 dan Tabel II.18.

Tabel II.16
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 s.d 2012

Uraian (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	47.265	71.427	53.584	38.710	28.328

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Tabel II.17
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No. (1)	Jenis PMKS (2)	Total (3)
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	32
2	Anak Terlantar (AT)	1700
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	49
4	Anak Jalanan	0

No.	Jenis PMKS	Total
(1)	(2)	(3)
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	181
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah)	9
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	2
8	Lanjut Usia Terlantar	7832
9	Penyandang Disabilitas	5143
10	Tuna Susila	83
11	Gelandangan	1
12	Pengemis	0
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	135
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	205
17	Korban Penyalahgunaan Napza	113
18	Korban Trafficking	1
19	Korban Tindak Kekerasan	68
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	399
22	Korban Bencana Sosial	18
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1386
24	Fakir Miskin (FM)	9336
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5
26	Komunitas Adat Terpencil	1630
Total Keseluruhan PMKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		28.324

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Banyaknya keluarga pra sejahtera dan sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut. Berdasarkan tingkatannya maka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak jumlahnya adalah Keluarga sejahtera 3, yang pada tahun 2011 mencapai angka 149.937 orang.

Tabel II.18
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Tahun 2007 s.d 2011 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pra Sejahtera	10.120	9.535	9.182	11.652	11.840
2.	Sejahtera 1	44.670	43.421	39.601	41.392	35.769
3.	Sejahtera 2	125.489	132.508	133.514	133.459	144.377
4.	Sejahtera 3	90.889	106.951	118.263	127.348	149.937
5.	Sejahtera 3+	4.030	4.009	4.767	5.271	5.863

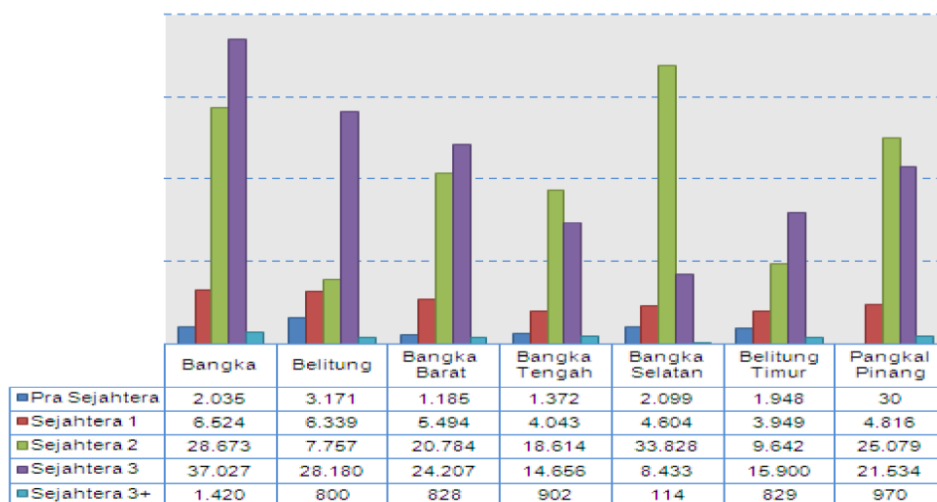
Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.19
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011

No.	Kab/Kota	Pra Sejahtera	Pra Sejahtera 1	Pra Sejahtera 2	Pra Sejahtera 3	Pra Sejahtera +3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	2.035	6.524	28.673	37.027	1.420
2.	Belitung	3.171	6.339	7.757	28.180	800
3.	Bangka Barat	1.185	5.494	20.784	24.207	828
4.	Bangka Tengah	1.372	4.043	18.614	14.656	902
5.	Bangka Selatan	2.099	4.604	33.828	8.433	114
6.	Belitung Timur	1.948	3.949	9.642	15.900	829
7.	Pangkal Pinang	30	4.816	25.079	21.534	970
Prov.Kep. Babel		11.840	35.769	144.377	149.937	5.863

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Gambar II.10
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2011
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

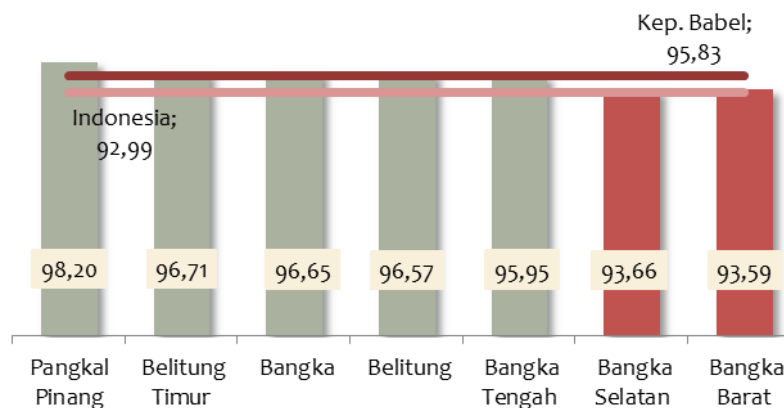
Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui melalui angka melek huruf. Angka Melek Huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tingkat atau ukuran angka melek huruf yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah, akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum. Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada Tabel II.20 dan Gambar II.11.

Tabel II.20
Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007 s.d 2011

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Bangka	96,13	96,14	96,15	96,31	96,65
2	Kab. Bangka Barat	92,12	92,59	92,85	92,86	93,59
3	Kab. Bangka Tengah	95,71	95,79	95,80	95,90	95,95
4	Kab. Bangka Selatan	92,54	92,55	92,70	93,62	93,66
5	Kab. Belitung	96,25	96,39	96,42	96,51	96,57
6	Kab. Belitung Timur	96,46	96,62	96,63	96,69	96,71
7	Kota Pangkalpinang	97,68	98,15	98,18	98,18	98,20
Provinsi Kep.Bangka Belitung		95,40	95,57	95,63	95,69	95,83

*Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011*

Gambar II.11
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011



*Sumber: Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011*

Perkembangan angka melek huruf selama periode tahun 2007 – 2011 menunjukkan adanya peningkatan secara terus menerus. Nilainya semakin mendekati 100 sebagai angka maksimal dari angka melek huruf dan capaiannya pun selalu berada di atas angka nasional.

Pencapaian angka melek huruf yang belum sampai 100 menunjukkan bahwa di provinsi ini belum bebas buta huruf, kemungkinan bisa disebabkan oleh masih ada penduduk berusia diatas 15 tahun yang sudah berusia lanjut dan tidak bisa membaca dan menulis. Terdapat anggapan pada masyarakat awam bahwa kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah berumur tua dan tidak akan bekerja lagi, atau pekerjaannya tidak memerlukan kecakapan membaca dan menulis, maka mereka menganggap tidak perlu lagi untuk belajar membaca dan menulis.

Tantangannya adalah untuk membuka wawasan bahwa baca dan tulis tidak kalah penting dibandingkan kebutuhan lainnya.

B. Angka rata-rata lama sekolah

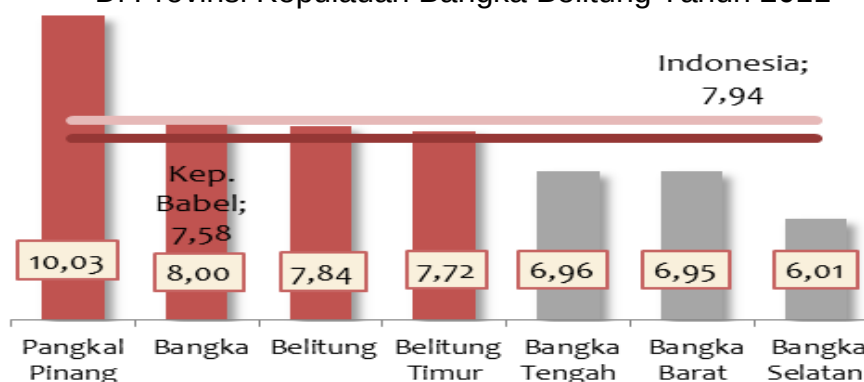
Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007-2010 berkisar antara 5-9,5 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 9,50 tahun dan yang terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 5,99 tahun, sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.21.

Tabel II.21
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2011

No (1)	Provinsi/Kabupaten/Kota (2)	2008 (3)	2009 (4)	2010 (5)	2011 (6)
1	Kab. Bangka	7,41	7,46	7,64	8,00
2	Kab. Belitung	7,78	7,79	7,81	7,84
3	Kab. Bangka Barat	6,67	6,72	6,87	6,95
4	Kab. Bangka Tengah	6,73	6,75	6,86	6,96
5	Kab. Bangka Selatan	5,92	5,97	5,99	6,01
6	Kab. Belitung Timur	7,45	7,47	7,48	7,72
7	Kota Pangkalpinang	9,07	9,14	9,50	10,03
	Provinsi Kep.Bangka Belitung	7,37	7,41	7,45	7,58

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

Gambar II.12
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Tantangan yang ada yaitu berasal dari tingginya disparitas

rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu 10 tahun atau setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 (dua) tetapi belum tamat. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 6 (enam) tahun atau setingkat dengan SMP kelas 1 (satu) tetapi belum tamat. Perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Capaian 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melampaui angka nasional yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sehingga bisa dikatakan masih terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Perkembangan APK dan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebarannya pada tahun 2007/2008 – 2011/2012 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.22, Tabel II.23 dan Tabel II.24.

Tabel II.22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	115,09	92,99	119,68	94,59	120,58	95,44	118,64	93,91	113,37	92,82
2	Belitung	121,22	96,15	123,70	97,17	123,89	98,32	111,72	91,68	109,67	91,26
3	Bangka Barat	117,70	93,48	122,18	96,44	119,81	95,08	119,70	94,83	118,92	98,33
4	Bangka Tengah	114,00	91,62	116,25	94,94	121,53	96,08	116,32	93,58	116,41	94,24
5	Bangka Selatan	114,96	91,97	117,00	94,95	117,09	92,74	114,34	94,91	114,47	97,46
6	Belitung Timur	116,55	92,46	117,46	93,23	116,77	92,29	108,48	89,19	106,21	89,74
7	Pangkalpinang	122,20	98,64	124,69	103,06	126,76	99,78	121,69	98,64	121,10	102,51
	Provinsi Kep.Bangka Belitung	117,09	93,79	120,13	96,27	120,94	95,71	116,42	94,05	114,64	95,27

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Tabel II.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	93,11	69,65	102,69	71,83	94,96	71,90	96,89	72,49	94,17	60,94
2	Belitung	100,84	75,85	109,48	77,42	105,31	78,06	97,67	75,08	90,99	65,78
3	Bangka Barat	78,95	57,49	97,80	69,39	89,13	69,34	89,36	66,45	85,68	67,85
4	Bangka Tengah	81,68	60,14	87,35	63,39	92,74	63,99	90,80	65,36	96,80	62,75
5	Bangka Selatan	76,96	53,64	88,07	62,53	92,08	62,94	92,54	70,36	88,24	64,57
6	Belitung Timur	93,33	65,38	97,40	66,87	104,54	68,06	99,60	72,16	80,80	56,68
7	Pangkalpinang	122,64	88,06	121,97	86,80	113,55	87,17	113,27	82,91	102,07	71,50
	Provinsi Kep.Bangka Belitung	93,01	67,42	101,12	71,50	98,21	71,93	97,16	72,26	92,07	64,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Tabel II.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	75,68	54,00	73,52	54,69	79,71	61,17	73,57	57,07	94,17	58,76
2	Belitung	73,78	52,85	86,05	62,08	76,98	61,86	71,16	55,09	66,88	36,90
3	Bangka Barat	55,26	40,70	59,30	43,25	60,50	48,67	62,66	48,16	55,60	40,53
4	Bangka Tengah	42,45	30,88	55,86	39,28	57,32	45,24	61,93	47,98	61,04	37,05
5	Bangka Selatan	35,23	25,79	41,61	29,70	51,73	38,77	55,59	42,20	55,49	35,17
6	Belitung Timur	64,06	43,10	58,82	44,77	61,61	48,92	62,62	48,13	65,13	35,16
7	Pangkalpinang	125,53	92,58	122,89	91,30	109,41	88,49	113,33	85,83	125,02	82,30
	Provinsi Kep.Bangka Belitung	69,19	49,96	72,54	53,23	72,80	57,41	72,84	55,93	76,06	47,57

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA angka APK dan APM mengalami fluktuasi namun tidak cukup signifikan dan lebih cenderung menurun pada kurun waktu 2007/2008-2011/2012.

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa topik sektor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi Topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.25
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran
Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007		2008		2009		2010		2011	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	3,42	0,489	5,00	0,17	4,92	5,25	5,93	6,09	6,36	6,67
2	Belitung	11,91	2,526	18,30	2,67	11,57	13,27	17,93	19,59	17,83	18,82
3	Bangka Tengah	4,35	0,870	4,35	0,62	2,90	3,48	2,99	4,19	6,55	7,40
4	Bangka Barat	11,74	1,145	10,68	0,58	10,68	10,97	10,75	11,02	10,39	11,40
5	Bangka Selatan	7,85	0,302	5,27	0,59	18,05	18,65	16,43	18,41	7,82	7,82
6	Belitung Timur	6,45	2,345	18,11	4,83	16,20	18,00	8,94	11,18	7,89	8,42
7	Kota Pangkalpinang	6,23	0,964	5,61	0,77	6,11	6,61	5,23	6,02	4,97	5,47
	Kep. Bangka Belitung	6,91	0,964	8,19	1,03	8,93	9,61	9,25	10,24	8,39	8,95

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Berdasarkan Tabel II.25, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2007–2010 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2011. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan terjadi hampir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.26
Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0,50	0,99	0	0	0,69
2	Belitung	1,18	2,82	0	0	2,05
3	Bangka Tengah	0,53	1,32	0,06	0,07	2,11
4	Bangka Barat	1,26	2,93	0,04	0,13	2,67
5	Bangka Selatan	0,17	0,58	0,16	0,15	0,46
6	Belitung Timur	1,66	3,21	0,31	0,12	4,12
7	Kota Pangkalpinang	0,16	0,97	0	0,05	1,26
	Kepulauan Bangka Belitung	0,71	1,69	0,06	0,06	1,66

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Tabel II.27
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	65,14	83,29	32,82	131,77	62,02
2	Belitung	144,35	190,62	306,33	199,27	99,04
3	Bangka Tengah	174,01	217,73	145,10	209,52	170,84
4	Bangka Barat	200,40	202,08	202,02	107,53	228,08
5	Bangka Selatan	271,58	322,01	330,93	141,64	156,45
6	Belitung Timur	293,08	361,10	179,96	223,59	210,53
7	Kota Pangkalpinang	124,60	127,52	127,19	130,79	198,76
	Kepulauan Bangka Belitung	160,73	189,31	168,92	154,24	149,83

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Angka kematian ibu pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian berdasarkan sebarannya, disetiap kabupaten/kota angka tersebut mengalami fluktuasi. Bahkan pada tahun 2011 terdapat daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada angka kematian ibu, yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang.

E. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 sebesar 69,06 tahun. UHH tertinggi berada di Kota Pangkalpinang 70,54 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung 69,26 tahun, kabupaten Belitung Timur 69,06 tahun, dan Kabupaten Bangka Tengah 68,05 tahun, Kabupaten Bangka Selatan 67,92 tahun, Kabupaten Bangka Barat 67,90 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka yaitu 67,85 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.28
Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2012

Provinsi/Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi Kep. Bangka Belitung	68.50	68.60	68.75	68.64	69.85
Bangka	66.99	67.22	67.43	67.64	67.85
Belitung	68.97	68.99	69.08	69.17	69.26
Bangka Barat	67.53	67.54	67.66	67.78	67.90
Bangka Tengah	67.64	67.66	67.79	67.92	68.05
Bangka Selatan	67.22	67.31	67.51	67.72	67.92
Belitung Timur	67.99	68.36	68.60	68.83	69.06
Pangkalpinang	70.18	70.22	70.32	70.43	70.54

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

F. Rasio Penduduk yang Bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Perkejaan di bidang pemerintahan, swasta, pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, jasa, dan sebagainya menjadi magnet tersendiri dalam ketenagakerjaan. Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka partisipasi angkatan kerja, dan

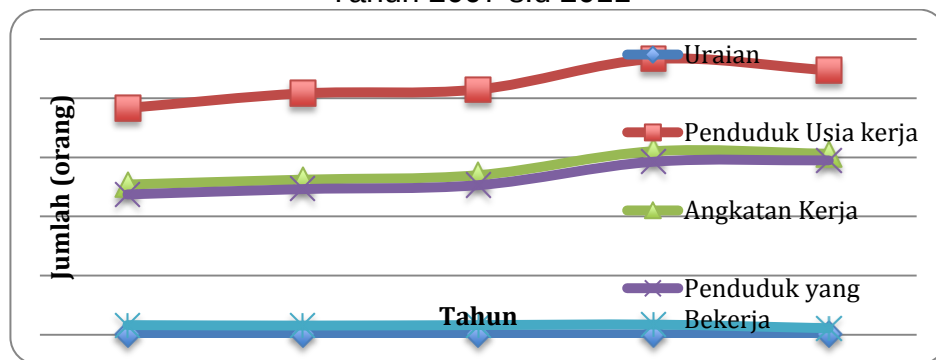
analisis perbandingan tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel II.29
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	766,428	815,786	829,103	932,061	893,894
2.	Angkatan Kerja	507,962	524,370	539,410	620,063	611,698
3.	Penduduk yang Bekerja	475,006	492,949	506,284	585,136	589,634
4.	Pengangguran	32,956	31,421	33,126	34,927	22,064

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Gambar II.13
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007 s.d 2011



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.30
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Provinsi kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007 s.d 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.28	64.28	65.06	66.53	68.43
2.	Tingkat Pengangguran	6.49	5.99	6.14	5.63	3.61

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

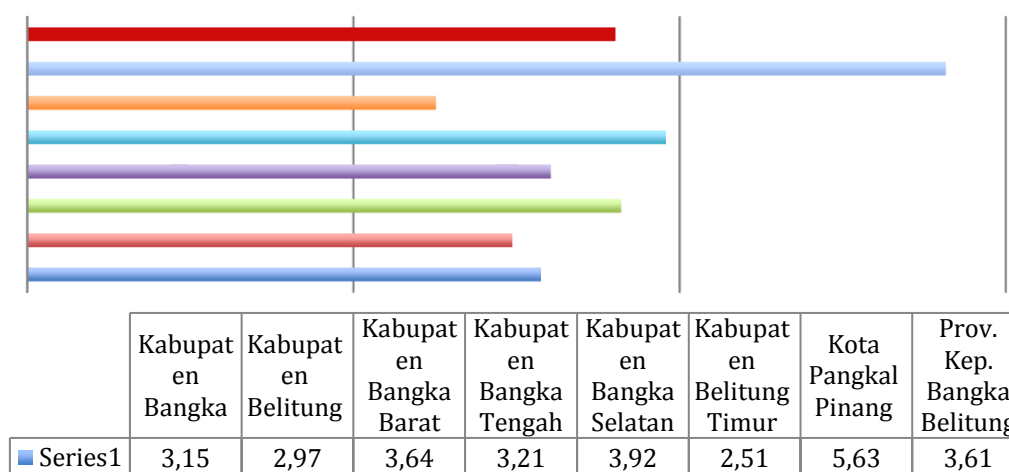
Tabel II.31
Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia kerja	TPAK	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran	Tingkat Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	201,933	68.25	137,829	133,488	4,341	3.15
2.	Kab. Belitung	115,053	68.01	78,248	75,921	2,327	2.97

3.	Kab. Bangka Barat	125,921	69.27	87,221	84,044	3,177	3.64
4.	Kab. Bangka Tengah	117,671	68.94	81,118	78,514	2,604	3.21
5.	Kab. Bangka Selatan	124,523	70.38	87,635	84,203	3,432	3.92
6.	Kab. Belitung Timur	79,149	67.97	53,796	52,448	1,348	2.51
7.	Kota Pangkal Pinang	129,644	66.22	85,851	81,016	4,835	5.63
	Prov. Kep. Bangka Belitung	893.894	68.43	611.698	589.634	22.064	3,61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Gambar II.14
Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Berdasarkan data yang telah ditampilkan, pada bidang ketenagakerjaan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini terlihat pada menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Angka tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang dengan 5,63 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Belitung Timur dengan 2,51 persen.

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2011 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yaitu dari 32,7 persen menjadi 25,9 persen. Penurunan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar kedua terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sama halnya dengan sektor pertanian, yaitu dari 21,5 persen pada tahun 2010 menjadi 19,0 persen pada tahun 2011.

Tabel II.32
Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011 (Persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian	34,43	33,23	31,28	32,72	25,93
2. Pertambangan	20,85	21,93	20,76	20,00	25,19
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	4,08	4,82	4,94	4,47	5,46
4. Listrik, Gas dan Air	0,37	0,20	0,22	0,13	0,24
5. Bangunan	4,52	5,79	4,92	4,45	4,55
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,68	18,31	18,97	21,48	18,98
7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	4,43	3,64	3,09	2,58	2,24
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,11	0,65	1,34	0,93	1,90
9. Jasa Kemasyarakatan	11,54	11,45	14,49	13,23	15,51
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2012

2.1.2.3 Fokus seni budaya dan olahraga

A. Seni budaya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu, Maras Taun, Beripat, dsb. Pelestarian nilai-nilai seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tak lepas dari peran grup kesenian yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana yang tergambarkan pada Tabel II.33. Kendatipun demikian hingga saat ini belum ada satu pun gedung kesenian di Provinsi ini.

Tabel II.33
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Grup Kesenian	106	114	169	217	217
2.	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Tabel II.34
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pangkalpinang	40	-
2.	Bangka	30	-
3.	Bangka Tengah	19	-
4.	Bangka Selatan	21	-
5.	Bangka Barat	23	-
6.	Belitung	44	-
7.	Belitung Timur	40	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

B. Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007–2012 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan rencana akan dikembangkannya Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib

Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan bahwa *stakeholder* pendidikan menganggap pendidikan adalah kebutuhan hidup yang penting. Hal ini dipertegas lagi melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai jenjang pendidikan.

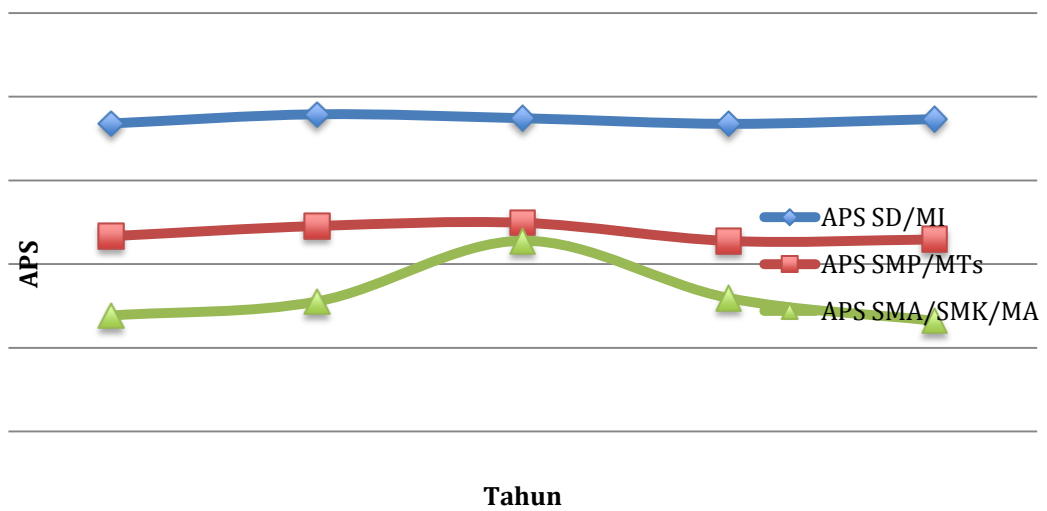
Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan data, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua jenjang pendidikan yang ada. Perkembangan APS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007/2008 – 2011/2012 sebagaimana yang tercantum pada Tabel II.35 dan Gambar II.14.

Tabel II.35
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2007/2008 s.d. 2011/2012

No	Jenjang Pendidikan	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	116.609	119.930	121.462	126.973	131.465
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	124.571	125.231	128.066	135.784	138.919
1.3.	APS SD/MI	93,61	95,77	94,84	93,51	94,63
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	35.585	36.918	39.509	37.859	40.859
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	53.359	53.431	56.561	57.742	62.001
2.3.	APS SMP/MTs	66,69	69,09	69,85	65,56	65,90
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	25.194	27.105	35.484	29.380	25.430
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	52.779	53.062	54.134	56.592	54.729
3.3.	APS SMA/SMK/MA	47,73	51,08	65,55	51,91	46,46

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Gambar II.15
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007/2008 s.d 2011/2012



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Kondisi Angka partisipasi sekolah (APS) pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APS pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota tahun 2012 ditampilkan pada Tabel II.36.

Tabel II.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS	Jumlah murid 16-18thn	Jumlah penduduk usia 16-18thn	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	29.623	31.730	93,36	8.683	14.738	58,91	5.990	10.262	58,37
2	Belitung	15.953	17.604	90,62	4.837	7.771	62,24	3.048	8.295	36,74
3	Bangka Tengah	17.261	18.374	93,94	3.905	6.583	59,32	2.643	7.252	36,44
4	Bangka Barat	20.277	20.676	98,07	5.508	8.728	63,11	3.226	7.960	40,53
5	Bangka Selatan	19.413	20.071	96,72	5.465	8.626	63,35	2.829	8.043	35,17
6	Belitung Timur	11.203	12.533	89,39	3.529	6.793	51,95	1.790	5.154	34,73
7	Pangkalpinang	17.885	17.971	99,52	5.932	8.762	67,70	5.904	7.763	76,05
Jumlah		131.615	138.959	94,71	37.589	62.001	60,63	25.430	54.729	46,47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Memperhatikan data pada Tabel II.35, Tabel II.36 dan Gambar II.15, maka terlihat telah terjadi trend penurunan APS pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan SMP/MTs. Pada jenjang SD/MI APS bersifat fluaktif namun dengan kecenderungan terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil identifikasi penurunan APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA disebabkan karena rendahnya tingkat lulusan SD/MI dan lulusan SMP/MTs yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja. Terutama bekerja pada sektor pertambangan.

Angka Partisipasi Murni

1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tersebut. Dukungan di dalam pendidikan diwujudkan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengindikasikan daya serapan sekolah berbanding dengan peserta didik sebagaimana tertera pada Tabel II.37 dan Tabel II.38.

Tabel II.37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk 16-18 tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	183	31.730	57,67	50	14.738	33,92	31	10.252	30,24
2	Belitung	125	17.604	71	29	7.771	37,32	16	8.295	19,29

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk 16-18 tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Bangka Tengah	93	18.374	50,61	23	6.583	34,94	13	7.252	17,93
4	Bangka Barat	131	20.676	63,36	39	8.728	44,69	20	7.960	25,12
5	Bangka Selatan	87	20.071	43,35	31	8.626	35,94	18	8.043	22,38
6	Belitung Timur	105	12.533	83,78	22	6.793	32,39	12	5.154	23,29
7	Pangkal pinang	85	17.971	47,3	24	8.762	27,39	21	7.763	27,05
	Jumlah	809	139.319	58,07	218	62.001	35,16	131	54.719	23,94

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.38
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	808	814	810	811	809
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	124.571	125.231	128.066	135.784	138.919
1.3.	Rasio	64,86	65	63,25	59,73	58,24
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	213	223	215	219	218
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	53.359	53.431	56.561	57.742	62.001
2.3.	Rasio	39,92	41,74	38,01	37,93	35,16
3.	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	124	129	127	130	131
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	52.779	53.062	54.134	56.592	54.729
3.3	Rasio	23,49	24,31	23,46	22,97	23,94

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

2. Rasio murid dan guru

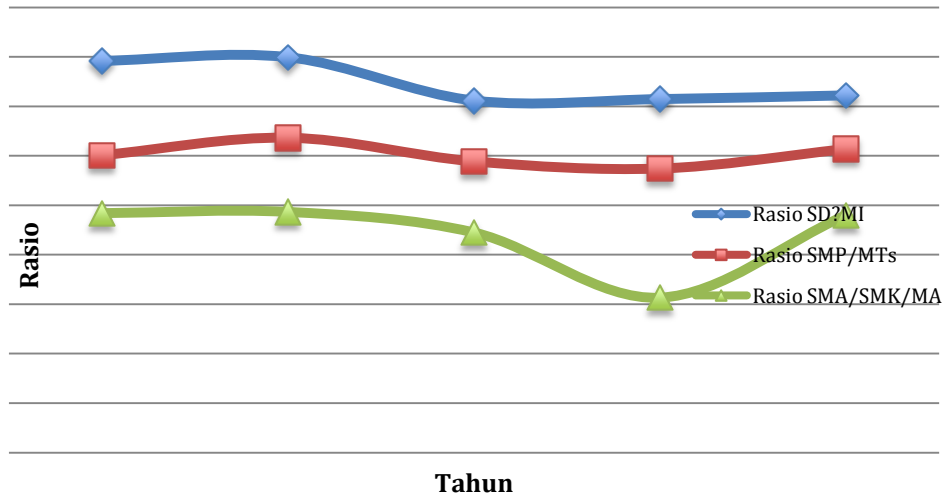
Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel II.39
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	8.092	8.255	9.356	9.561	9.687
1.2.	Jumlah Murid	144.345	148.494	151.827	155.774	159.256
1.3.	Rasio	17,84	17,99	16,23	16,29	16,44
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	3.261	3.295	3.571	3.790	3.753
2.2.	Jumlah Murid	45.724	48.550	49.158	51.101	53.538
2.3.	Rasio	14,02	14,73	13,77	13,48	14,27
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	2.870	2.977	3.124	3.290	3.306
3.2.	Jumlah Murid	33.524	34.938	34.072	27.213	38.356
3.3.	Rasio	11,68	11,73	10,90	8,27	11,60

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Gambar II.16
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2007-2011



Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.40
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	2.129	35.971	59,19	954	3.967	24,05	764	8.981	85,07
2	Belitung	1.324	19.306	68,58	459	1.081	42,46	404	5.187	77,89
3	Bangka Tengah	1.364	21.389	63,77	352	1.143	30,80	312	3.753	83,13
4	Bangka Barat	1.463	24.588	59,50	596	2.090	28,52	437	4.859	89,94
5	Bangka Selatan	1.044	22.976	45,44	441	1.035	42,61	324	3.952	81,98
6	Belitung Timur	1.090	13.312	81,88	362	1.082	33,46	294	3.058	96,14
7	Pangkalpinang	1.273	21.714	58,62	589	1.974	29,84	771	8.566	90,00
Jumlah		9.687	159.256	60,83	3.753	12.372	30,33	3.306	38.356	86,19

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Pemberdayaan gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.41 dan Tabel II.42.

Tabel II.41
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

NO	Kabupaten/kota	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	46.2	46.56	46.85	57.39	52,85
2.	Belitung	45.2	45.36	45.81	49.27	49,21
3.	Bangka Barat	42,0	42.41	43,00	53.32	56,29
4.	Bangka Tengah	46.1	46.07	46.56	52.92	44,54
5.	Bangka Selatan	41.8	42.40	42.49	39.16	43,77
6.	Belitung Timur	47.2	47.29	47.87	42.25	47,21
7.	Kota Pangkal Pinang	46.7	47.59	48.12	49.60	50,01
Prov. Kep. Bangka Belitung		43.7	44.11	44.86	55.62	56,03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Tabel II.42
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	57,6	58,17	58,50	59,65	60,08
2.	Belitung	55,7	56,67	56,80	58,01	58,32
3.	Bangka Barat	58,2	59,07	59,11	59,74	60,25
4.	Bangka Tengah	51,5	54,69	55,23	56,46	56,89
5.	Bangka Selatan	47,1	49,30	49,46	50,36	51,29
6.	Belitung Timur	59,3	59,29	59,69	60,84	61,25
7.	Kota Pangkal Pinang	63,8	64,49	65,15	65,70	66,19
Prov. Kep. Bangka Belitung		59,00	59,69	60,05	60,36	60,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa pembangunan dan perkembangan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

Kesehatan

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.43, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan, namun penurunan yang cukup signifikan juga terjadi yaitu di Kabupaten Belitung.

Tabel II.43
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
		(3)	(4)	(5)
1	Bangka	68,01	30,55	83,3
2	Belitung	11,84	48,15	15,5
3	Bangka Tengah	17,74	62,21	60,8
4	Bangka Barat	85,24	70,86	78,5
5	Bangka Selatan	11,94	13,41	62,7
6	Belitung Timur	2,42	25,49	48,6
7	Kota Pangkalpinang	5,37	13,29	50,6
Kepulauan Bangka Belitung		28,29	36,69	60,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel II.44
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	36,76	9,47	4,05	1,71	1,77
2	Belitung	20,29	6,31	3,20	2,72	2,61
3	Bangka Tengah	38,07	5,06	6,81	5,91	8,27
4	Bangka Barat	86,87	18,50	16,58	14,10	8,62
5	Bangka Selatan	56,07	8,87	14,83	4,93	5,64
6	Belitung Timur	35,62	6,61	9,62	5,03	0,95
7	Kota Pangkalpinang	22,21	10,43	7,35	1,48	1,02
	Kepulauan Bangka Belitung	42,14	9,47	8,46	4,82	4,10

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2007–2011 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

Tabel II.45
Perkembangan Prevelensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	4,58	0,99	0	0	8,33
2	Belitung	6,21	4,67	4,67	0,56	2,70
3	Bangka Tengah	0,00	14,58	0	8,11	2,50
4	Bangka Barat	2,16	9,09	2,37	4,94	0
5	Bangka Selatan	0,001	0,00	2,27	0	3,17
6	Belitung Timur	0,00	2,04	2,84	3,85	0,20
7	Kota Pangkalpinang	8,65	10,99	0	1,96	6,98
	Kepulauan Bangka Belitung	0,02	5,53	3,0	8,11	8,33

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Pertumbuhan dan penyebaran prevelensi HIV di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.51 dimana pada tahun 2007 terjadi sebanyak 0,02 persen kasus namun meningkat dengan cukup signifikan pada tahun 2011 menjadi sebesar 8,33 persen kasus.

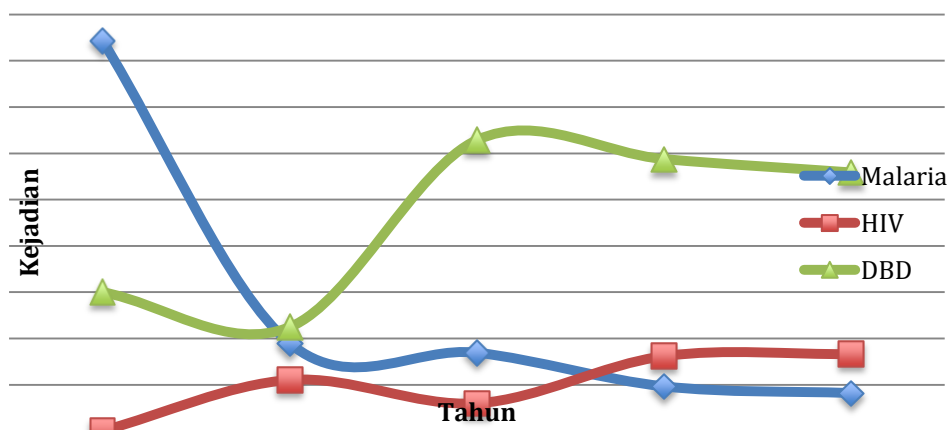
Tabel II.46
Perkembangan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	4,96	4,13	20,82	8,08	5,60
2	Belitung	30,41	38,04	15,02	56,94	19,88
3	Bangka Tengah	10,19	2,13	51,04	38,22	33,33
4	Bangka Barat	26,74	14,03	27,78	40,12	49,10
5	Bangka Selatan	3,90	3,17	9,44	4,15	46,95
6	Belitung Timur	20,16	12,46	56,42	21,16	22,66
7	Kota Pangkalpinang	18,75	11,86	55,07	49,89	29,17
Kepulauan Bangka Belitung		15,01	11,25	31,43	29,37	27,93

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Secara umum, perkembangan angka penyakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007–2011, ditampilkan pada Gambar II.16.

Gambar II.16
Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2007-2011
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.47 dan Tabel II.48.

Tabel II.47
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	11	11	11	11	11
2	Belitung	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	5	7	7	7	7
4	Bangka Barat	6	6	6	8	8
5	Bangka Selatan	6	6	7	8	8
6	Belitung Timur	5	6	6	6	6
7	Kota Pangkalpinang	8	9	9	9	9
Kepulauan Bangka Belitung		50	54	55	58	58

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.48
Perkembangan Jumlah Posyandu Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangka	201	212	212
2	Belitung	165	167	167
3	Bangka Tengah	112	117	116
4	Bangka Barat	143	144	149
5	Bangka Selatan	97	112	109
6	Belitung Timur	127	128	128
7	Kota Pangkalpinang	110	111	111
Kepulauan Bangka Belitung		955	991	992

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Tabel II.49
Perkembangan Jumlah Dokter Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

Wilayah	2007			2008			2009			2010			2011		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Kesehatan Prov Kep Babel	4	2	0	6	2	0	3	2	0	4	2	0	6	1	0
Bangka	31	10	9	38	9	7	48	13	17	63	11	17	60	13	17
Belitung	20	6	4	22	10	3	34	8	4	36	8	3	40	10	2
Bangka Tengah	23	4	0	27	6	1	35	8	2	30	5	0	39	7	2
Bangka Barat	27	3	0	30	3	0	29	4	2	31	6	2	38	5	2
Bangka Selatan	15	4	0	19	2	0	20	3	0	24	4	0	27	5	0
Belitung Timur	18	2	1	24	2	0	24	3	1	14	1	0	34	5	0

Wilayah	2007			2008			2009			2010			2011		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pangkalpinang	44	16	23	55	11	27	63	15	46	59	17	30	61	17	41
Jumlah	182	47	37	221	45	38	256	54	72	261	54	52	305	63	64

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2012

Keterangan :

U : Dokter Umum

G : Dokter gigi

Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.49, terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

Penataan Ruang

Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis; bahwa lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.50.

Tabel II.50
Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

Kriteria	Dalam Kawasan Hutan (Ha)			Jumlah (ha)
	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sangat Kritis (1)	468,35	2.662,49	21.316,10	24.446,94
Kritis (2)	6.695,03	11.903,82	56.101,18	74.700,03
Jumlah (1+2)	7.163,38	14.566,31	77.417,28	99.146,97
Agak Kritis (3)	12.203,46	49.513,58	167.063,78	228.780,8
Jumlah (1+2+3)	19.366,84	64.079,89	244.481,06	327.927,77
Potensial Kritis (4)	12.534,1	78.260,11	114.408,04	205.202,2
Tidak Kritis (5)	1.736,38	12.522,23	101.470,30	115.728,91
Jumlah (4+5)	14.270,48	90.782,34	215.878,34	320.931,11
Jumlah (1+2+3+4+5)	33.637,3	154.862,23	460.359,40	648.858,90

Sumber: Analisa Citra Landsat ETM 7+ tahun 2009, BPDAS Baturusa Cerucuk, 2011

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.51.

Tabel II.51
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	7.555	1.110	4.604	2.061	19.664
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	22	13	5	17	39
3	Rasio daya serap tenaga kerja	343,41	85,38	920,80	121,23	504,20

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.52.

Tabel II.52
Angka Konsumsi RT per Kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total Pengeluaran RT	9.358.747	10.838.810	12.277.355	13.865.667	15.598.162
2	Jumlah RT	276.664	280.632	284.532	288.432	292.332
3	Rasio (1./2.)	33,83	38,62	43,15	48.07	53.36

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Rasio nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.53.

Tabel II.53
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	-	101,19	102,97	107,69	117,57
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	-	105,89	109,07	112,43	118,55
3	Rasio	-	0,96	0,94	0,96	0,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

C. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan tentang konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga. Konsumsi non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.54.

Tabel II.54
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Total pengeluaran RT non pangan	3.075.613	3.748.535	4.333.764	5.021.613	5.817.236
2.	Total pengeluaran	9.358.747	10.947.929	12.407.801	13.925.146	15.598.162
3.	Rasio	3,04	2,92	2,86	2,77	2,68

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.1.4.2 Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

A. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.55.

Tabel II.55
Rasio Luas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	12.350 Ha	282.719 Ha	0.04
2	Kabupaten Bangka Barat	15.560 Ha	266.501 Ha	0.06
3	Kabupaten Bangka Selatan	18.155 Ha	342.553 Ha	0.05
4	Kabupaten Bangka Tengah	23.741 Ha	188.895 Ha	0.13
5	Kabupaten Belitung	46.225 Ha	183.144 Ha	0.25
6	Kabupaten Belitung Timur	40.709 Ha	269.982 Ha	0.19
7	Kota Pangkalpinang	-	11.880 Ha	0.00
Jumlah		156.740 Ha	1.485.674 Ha	0.11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.56.

Tabel II.56
Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Infrastruktur	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,98	4,17	3,67	3,60	4,07
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22	22	22	22	22
3.	Ketaatan terhadap RTRW	50	50	75	75	75
4.	Persentase Penduduk berakses air minum	-	-	12,32	15,02	15,19
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	-	69,29	67,87	65,69	69,9
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	46,20	45,55	48,52	48,06	62,76
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,61	0,62	0,77	0,67	0,61
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,95	0,96	0,93	0,87	0,84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka kriminalitas

Kasus tindak kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kurun waktu 2008-2011 terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 tercatat sebanyak 2068

tindak kejahatan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari tindak kejahatan jenis konvensional sebanyak 1664 kasus, transnasional 88 kasus, dan merugikan negara 315 kasus. Tahun 2009 terdapat 2647 kasus kejahatan (konvensional 2374 kasus, transnasional 125 kasus, dan merugikan negara 144 kasus). Sementara tahun 2010 tercatat sebanyak 2721 kasus tindak kejahatan (konvensional 2363 kasus, transnasional 157 kasus, dan merugikan negara 211 kasus). Sedangkan tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tajam tercatat sebanyak 3361 kasus ((konvensional 2984 kasus, transnasional 194 kasus, dan merugikan negara 183 kasus).

Tabel II.57
Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2011

Jenis Kasus	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konvensional	1664	2374	2363	2984
Transnasional	88	125	157	194
Merugikan negara	315	144	211	183
Berimplikasi kontijensi	1	4	0	0
Total	2068	2647	2721	3361

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. Jumlah demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relative sedikit. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas kehidupan bermasyarakat 47elative baik sehingga mampu menciptakan iklim kehidupan yang kondusif. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.58.

Tabel II.58
Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bidang politik	3	1	3	7	4
2	Ekonomi	22	7	19	18	23
3	Kasus pemogokan kerja	15	5	12	12	16
4	Jumlah unjuk rasa	4	2	8	2	5

Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya manusia

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam proses percepatan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah memberikan gambaran secara tidak langsung terhadap kualitas daerah. Rasio

tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan seperti ditampilkan pada Tabel II.59.

Tabel II.59
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	-	12.842	15.160	18.106	27.797
2.	Jumlah penduduk	1.106.657	1.122.526	1.138.129	1.223.296	1.261.737
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	-	0.0114	0.0133	0.0148	0.0220

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Berdasarkan Tabel II.60 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2011.

Tabel II.60
Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	306,788	162,206	311,308	360,592	190,699
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	44,996	24,002	47,401	44,629	21,063
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	351,784	186,208	358,709	405,221	211,762
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	754,873	936,318	779,420	818,075	1,049,975
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	0.466	0.199	0.460	0.495	0.202

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan

sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Dari jumlah program pada program utama sebanyak 160 program dengan jumlah kegiatan total sebanyak 1.256 kegiatan, terdapat 79 kegiatan yang capaian fisiknya tidak selesai 100%, atau 6,29 % dari seluruh kegiatan yang ada. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.61
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No.	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan Hukum kepada Aparatur	0,00
2	Bantuan Hukum kepada Masyarakat	0,00
3	Bimtek Implementasi SPM di Lingkungan Pemprov. Kep. Babel	0,00
4	Kegiatan Biaya Penyertaan EXPO Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2012	0,00
5	Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga Benda Cagar Budaya Provinsi Kep.Bangka Belitung	0,00
6	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Corporate Social Responsibility Prov.Kep.Bangka Belitung	0,00
7	Kegiatan Tim monitoring dan Pengawasan Harga Migas dan Sembako Provinsi Kep.Bangka Belitung	0,00
8	Land Clearing/Pematangan Lahan Pusat Layanan Autis	0,00
9	Pembangunan Gedung Penunjang Lainnya (BDRS/UTDRS), Alat Penunjang dan IPAL	0,00
10	Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	0,00
11	Pembuatan Leger Jalan Provinsi	0,00
12	Pemeliharaan Kapal Catamaran	0,00
13	Penanganan Kasus Pada Wilayah pemerintahan dibawahnya	0,00
14	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Gol.III	0,00
15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	0,00
16	Pengadaan Kebutuhan Listrik untuk Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	0,00
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit Provinsi	0,00
18	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai RS	0,00
19	Pengadaan Panel Listrik Kantor Dinas Pekerjaan Umum	0,00
20	Pengiriman Kontingan Olahraga Tradisional 2012	0,00
21	Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	0,00
22	Prototipe Huntara dan Atau Human Beton Panel.	0,00
23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00
24	UN/UASBN Pengadaan Peralatan copy Printer bagi SMP, SMA dan SMK	0,00
25	Pengembangan bibit unggul Pertanian/perkebunan	0,35

No.	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)
26	Investigasi Pelacakan Kasus PD31 (Campak, TN, AFP, Difteri)	21,42
27	Kajian Zonasi Kelautan	25,00
28	Peingkatan Pelayanan Rumah Sakit	26,10
29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pegawai RS Provinsi	33,81
30	Evaluasi Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota	35,00
31	Sosialisasi dan Monitoring Pembangunan Pendidikan	35,00
32	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,00
33	Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Sub Spesialis dan Spesialis	50,00
34	Penyediaan alat tulis kantor	50,00
35	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Pekantoran	50,00
36	Penyusunan laporan keuangan semesteran	50,00
37	Penyusunan PERDA Ketenagalistrikan	50,00
38	Penyusunan PERDA Mineral	50,00
39	Penyusunan Perda	53,33
40	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Rumah Sakit Umum Provinsi	56,34
41	Pembangunan Baru Gedung Penunjang Lainnya BDRS RS Provinsi	60,00
42	Pengiriman Spesimen Kasus Campak dan AFP	63,00
43	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	63,84
44	Pelatihan Teknis Kesehatan Indera Bagi Dokter dan Perawat Puskesmas	65,00
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,75
46	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	66,00
47	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	66,00
48	Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat (Jamkesmas) Serumpun Sebalai	75,00
49	Pembinaan & Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Kab/Kota	75,00
50	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	75,00
51	Gerakan perempuan untuk optimalisasi pekarangan (GPOP)	80,00
52	Koordinasi Pengurusan Administrasi, Pengambilan Peralatan Bantuan Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Pusat/BNPB Dan Distribusi Logistik Bencana	80,00
53	Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan Pakaian Khusus (bagi pegawai dan pasien RS)	80,00
54	Penyusunan laporan Tahunan Dinas dan Monev serta Koordinasi	80,00
55	Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemprov Kep. Babel	84,40
56	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data	85,00
57	Validasi Data Cakupan Imunisasi	85,70
58	Pertemuan Teknis Lintas Program Penyakit Filariasis	87,00
59	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Kasus/khusus	88,89
60	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	88,89
61	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	90,00
62	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	90,00

No.	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)
(1)	(2)	(3)
63	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor	90,00
64	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,00
65	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95,00
66	Pertemuan Teknis Program Zoonosis	95,65
67	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	97,14
68	Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu	97,60
69	Honorarium dan Cost Sharing Tenaga Kesehatan Khusus	98,00
70	Pengadaan Komputer	98,00
71	Pengadaan Peralatan Kantor	98,00
72	Penyediaan bahan logistik kantor	98,00
73	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,00
74	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	98,00
75	Penyediaan jasa surat menyurat	98,00
76	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	98,00
77	Penyediaan makanan dan minuman	98,00
78	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	98,00
79	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Penanggulangan Bencana.	99,00

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Untuk program/kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan target kinerja hasil, adalah di luar kegiatan-kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% di atas. Sehingga jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada TA 2012 adalah 1177 kegiatan atau 93,71%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Tidak ada kegiatan yang capaiannya melebihi target kinerja.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah:

- a) Gagal dalam proses lelang.
- b) Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain, sehingga beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.
- c) Terbatasnya waktu pelaksanaan
- d) Belum selesainya dokumen perencanaan, seperti DED, kajian lingkungan.
- e) Belum sekuatnya isi substansi dari beberapa Perda, sehingga beberapa perda belum ditetapkan.
- f) Belum selesainya pembebasan lahan.
- g) Akibat kondisi geografis dan cuaca.

- h) Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah/luar negeri.
 - i) Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.
 - j) Berkurangnya peserta diklat atau pelatihan yang hadir.
 - k) Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.
 - l) Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya pencapaian target RPJMD, maka perlu dialokasikan pada tahun berikutnya.
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan.
- c) Untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditingkatkan sinkronisasi dan sinergi kegiatan yang dibiayai dari seluruh sumber pembiayaan.
- d) Agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh kegiatan oleh masing-masing kepala SKPD.
- e) Untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang memerlukan dukungan perencanaan teknis, maka penyusunan dokumen teknisnya dilakukan sebelum pekerjaan fisik dianggarkan atau dilaksanakan dan disosialisasikan pada awal tahun anggaran.

Pelaksanaan program RKPD sampai tahun 2013 disajikan dalam Tabel II.62.

Tabel II.62
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1			WAJIB									
1	1		PENDIDIKAN									
1	1	1	Program PAUD									
			APK PAUD	50,04%	50	52,00%	19,23%	36,98	25,89%	25,89%	100%	Dindik
			Prestasi PAUD Tk. Nasional	2			0		1	1	100%	Dindik
1	1	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun									
			APK SD sederajat	116,26%	114,64	115,26%	116,22%	100,83	116,23%	116,23%	100%	Dindik
			APM SD sederajat	97,00%	95,27	95,24%	95,07%	99,82	95,45%	95,45%	100%	Dindik
			Angka Melanjutkan SD/MI	100,00%			96,20%		96,96%	96,96%	100%	Dindik
			Angka Mengulang SD/MI	4,00%			8,68%		7,74%	7,74%	100%	Dindik
			Persentase Kelulusan SD/MI	100,00%			100,00%		100,00%	100,00%	100%	Dindik
			Angka DO SD/MI	0,30%			0,45%		0,42%	0,42%	100%	Dindik
			APK SMP sederajat	97,96%	92,07	94,56%	92,38%	97,69	93,51%	93,51%	100%	Dindik
			APM SMP Sederajat	84,00%	64,24	67,79%	64,35%	94,93	68,28%	68,28%	100%	Dindik
			Angka DO SMP/MTs	0,40%			0,90%		0,80%	0,80%	100%	Dindik
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	100,00%			94,32%		95,96%	95,96%	100%	Dindik

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase Kelulusan SMP/MTs	99,90%			98,32%		98,64%	98,64%	100%	Dindik
				Angka Mengulang SMP/MTs	0,45%			0,87%		0,79%	0,79%	100%	Dindik
1	1	3	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi										
				APK Pendidikan Menengah	98,23%	76,06	76,90%	76,65%	99,67	80,97%	80,97%	100%	Dindik
				APM Pendidikan Menengah	70,00%	47,57	52,20%	47,66%	91,3	52,13%	52,13%	100%	Dindik
				Angka DO Pendidikan Menengah	1,40%			2,05%		1,92%	1,92%	100%	Dindik
				Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA	99,95%			98,66%		98,92%	98,92%	100%	Dindik
				Angka Mengulang Pendidikan Menengah	0,60%			0,98%		0,90%	0,90%	100%	Dindik
				Persentase Kelulusan Siswa SMK	99,95%			99,32%		99,45%	99,45%	100%	Dindik
1	1	4	Program Pendidikan Non Formal										
				Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C				8.229		7.912	7.912	100%	Dindik
				Tingkat Kelulusan UNPK									Dindik
				Penduduk Buta		4,17	4,08%	4,37%	107,11	4,00%	4,00%	100%	Dindik

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Aksara									
			Prosentase Pengangguran yang terlatih				15,21%		16,99%	16,99%	100%	Dindik
			Jumlah peserta kursus bersertifikat				4.780		5.220	5.220	100%	Dindik
1	1	5	Program Manajemen Layanan Pendidikan									
			Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel	2 Dok			2 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	Dindik
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan di Prov. Kep. Babel	3 Dok			4 Dok		3 Dok	3 Dok	100%	Dindik
			Tersedianya Dokumen Hasil Monev pendidikan di Prov. Kep. Babel	3 Dok			3 Dok		3 Dok	3 Dok	100%	Dindik
1	2		KESEHATAN									
1	2	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.	100		100		100	100	100%	Dinkes
1	2	2	Program Upaya Kesehatan									Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat										
		Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)	27			35		35	35	100%	Dinkes
		Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU)	98			96,5		96,5	96,5	100%	Dinkes
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28	8,39	9,54	35	366,88	35	35	100%	Dinkes
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (SPM)	100					100	100	100%	Dinkes
		Tersedianya jasa operasional dan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis	265			265		265	265	100%	RSJ
		Jumlah kunjungan ke Puskesmas dan rumah keluarga pasien	95			76		76	76	100%	RSJ
		Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan	22			14		14	14	100%	RSJ

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kesehatan									
				Jumlah pasien yang menerima terapi mental sosial	500			350		350	350	100%	RSJ
				Jumlah anak yang dilayani pada unit tumbuh kembang anak	170			150		150	150	100%	RSJ
				Jumlah pelayanan rumah sakit	25			20		20	20	100%	RSJ
1	2	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
				Persentase Kab/Kota dengan cakupan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (IKU)	70			60		60	60	100%	Dinkes
				Persentase Kab/Kota yang memiliki posyandu mandiri (IKU)	40			28		28	28	100%	Dinkes
1	2	4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentasi balita yang ditimbang berat badan (IKU)	78			55		55	55	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat									
				Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (IKU)	90		75		75	75	100%	Dinkes
				Persentase penduduk yang mengakses air minum berkualitas (IKU)	74		60		60	60	100%	Dinkes
1	2	6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular									
				Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk(API) (IKU)	< 1	4,1	3,75	< 3	< 3	< 3	100%	Dinkes
				Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk (IKU)	< 46	27,93	24,11	< 53	< 53	< 53	100%	Dinkes
				Prevalensi HIV (Persentase kasus terhadap penduduk berisiko) (IKU)	< 10	8,33	7,15	< 10	< 10	< 10	100%	Dinkes
				Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan	90		89		90	90	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan									
			Persentase capaian nilai akreditasi yang diterima (standar Join Commision International (JCI))	50% (Madya)			5 pelayanan		12,50%	12,50%	100%	RSJ
			Jumlah sertifikat BLUD yang diterima	100% (BLUD Penuh)					50% (bertahap)	50% (bertahap)	100%	RSJ
			Jumlah standar pelayanan kesehatan yang tersusun	7					3	3	100%	RSJ
			Jumlah sertifikat izin mendirikan rumah sakit yang diterima	1					1	1	100%	RSJ
			Jumlah sertifikat/izin AMDAL yang terbit	1					1	1	100%	RSJ
1	2	8	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	100			70		100	100	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata									
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (IKU)	100			100		100	100	100%	Dinkes
			Jumlah alat kesehatan belanja modal dan perbekalan kesehatan	60			40		40	40	100%	RSJ
			Jumlah obat generik dan non generik yang tersedia	85			66		66	66	100%	RSJ
			Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	45			35		35	35	100%	RSJ
			Jumlah gudang obat/apotik						1	1	100%	RSJ
			Jumlah ruang terapi yang dikembangkan	2					1	1	100%	RSJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah ruang rontgen rumah sakit	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlag gedung dapur bersih	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlah gedung trauma center	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlah ruang laboratorium rumah sakit sesuai standar	2					1	1	100%	RSJ
				Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah sakit	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlah bangunan rumah sakit yang di rehabilitasi	5					1	1	100%	RSJ
				Jumlah sertifikat penetapan tipe rumah sakit	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlah sistem informasi kegiatan rekam medis	1					1	1	100%	RSJ
1	2	1	0	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu?RS Mata									
				Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah	1					1	1	100%	RSJ

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sakit									
				Jumlah pemeliharaan rutin ruang rawat inap rumah sakit	1					1	1	100%	RSJ
				Jumlah alat kesehatan yang dipelihara	3					3	3	100%	RSJ
				Jumlah alat kesehatan yang teruji dan terkalibrasi	3					3	3	100%	RSJ
1	2	1	1	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan									
				Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7			6,1		6,1	6,1	100%	Dinkes
				Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,3			26,7		26,7	26,7	100%	Dinkes
				Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6			245,8		245,8	245,8	100%	Dinkes
				Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96			70,7		70,7	70,7	100%	Dinkes
1	2	1	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak	28	8,39	9,54	35	366,88	35	35	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			balita										
1	2	1 3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)	100			42		70	70	100%	Dinkes
1	2	1 4	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	85			50		60	60	100%	Dinkes
1	2	1 5	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak										
				Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)	27			35		35	35	100%	Dinkes
				Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28	8,39	9,54	35	366,88	35	35	100%	Dinkes
1	2	1 6	Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU)	100			100		100	100	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	1	Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Persentase RS Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))	100		70		70	70	100%	Dinkes
1	2	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes	Cakupan pelayanan Laboratorium	95		70		70	70	100%	Dinkes
1	2	1	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan									
				Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7		6,1		6,1	6,1	100%	Dinkes
				Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,3		26,7		26,7	26,7	100%	Dinkes
				Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6		245,8		245,8	245,8	100%	Dinkes
				Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96		70,7		70,7	70,7	100%	Dinkes

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	20	Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana	100		100		100	100	100%	Dinkes
1	3		PEKERJAAN UMUM									
1	3	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan*)									
				Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter	12 Km		Jalan yang terbangun sepanjang 29,52 Km		0 km	0 km	100%	Dinas PU
					1870 km		Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter		374 km	374 km	100%	Dinas PU
					125 Km		Peningkatan jalan provinsi sepanjang 53.61 km		25 km	25 km	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	3	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik	874.33 km		Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km		874.33 km	874.33 km	100%	Dinas PU
1	3	3	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan/jembatan yang diakibatkan bencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat	3 unit		0%					Dinas PU
1	3	4	Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan	Tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan provinsi	7 dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi		3 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Dinas PU
1	3	5	Program Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan*)	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium		30 % alat-alat berat dan alat laboratorium		1 unit gedung & 24 unit alat-alat berat, alat lab	1 unit gedung & 24 unit alat-alat berat, alat lab	100%	Dinas PU
1	3	6	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan	7.572 Ha		1.000 Ha		1.000 Ha	1.000 Ha	100%	Dinas PU
1	3	7	Program penyediaan dan pengelolaan air	Terwujudnya layanan air baku untuk air minum	75 Ha		5 Ha		10 Ha	10 Ha	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			baku									
1	3	8	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air	98 Ha		4 Ha		11 Ha	11 Ha	100%	Dinas PU
1	3	9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tersedianya sumber air baku, air bersih dan pengelolaan limbah	3 kws diksk/ksp/ksn		Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%		3 kws di 20 ksk/ksp/ksn	3 kws di 20 ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU
1	3	10	Program pengendalian banjir	Terwujudnya sistem pengendalian banjir	52.515 M'		2.000 M'		15.353 M'	15.353 M'	100%	Dinas PU
1	3	11	Program Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh*)	tersedia infrastruktur di kawasan strategis, khusus dan potensial	3 kws diksk/ksp/ksn		Jumlah Jaringan jalan di kws strategis, khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan, KEK dll		3 kws di 20 ksk/ksp/ksn	3 kws di 20 ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU
1	3	12	Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*)	tersedianya infrastruktur di kawasan perdesaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realis- asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				6 kws di 6 kab			Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%		2 kws di 2 kab	2 kws di 2 kab	100%	Dinas PU
				35 desa			Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %		30 desa di 6 kab	30 desa di 6 kab	100%	Dinas PU
				10 desa di 6 kab			Jumlah Desa terlayani air minum 45%		10 desa di 6 kab	10 desa di 6 kab	100%	Dinas PU
				6 desa/6 kab			Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%		6 desa/6 kab	6 desa/6 kab	100%	Dinas PU
				6 desa/6 kab			Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%		6 desa/6 kab	6 desa/6 kab	100%	Dinas PU
1	4		PERUMAHAN									
1	4	1	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan*)	terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	135 unit di 7 kab/kota		terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani		135 unit di 7 kab/kota	135 unit di 7 kab/kota	100%	Dinas PU

Kode			Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	4	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR	7 kws di 7 kab/kota			terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi		7 kws di 7 kab/kota	7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
1	4	3	Program pemberdayaan komunitas perumahan	terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kws permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat	50 desa di 7 kab/kota			terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman		50 desa di 7 kab/kota	50 desa di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
1	4	4	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Tertanganinya lingkungan perumahan dan kws permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial	7 kws di 7 kab/kota			terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana		7 kws di 7 kab/kota	7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
1	5		PENATAAN RUANG										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 5 1	Program Perencanaan Tata Ruang	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL			Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitasi Percepatan Legislasi RTRW Kab/Kota		Master Plan untuk Review Kawasan Provinsi dan RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru	Master Plan untuk Review Kawasan Provinsi dan RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru	100%	Bappeda dan Statistik
1 5 2	Program Pemanfaatan Ruang	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird,			0		Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat	100%	Bappeda dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Wastek								
1	5	3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggara an PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota			5 PPNS Prov. Kep. Babel/Kab/ Kota		40 PPNS Prov/Kab/Ko ta dan 1 Laporan Penyelengg araan PR	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 1 Laporan Penyelenggara an PR	100%	Bappeda dan Statistik
1	6		PERENCANAAN PEMBANGUNAN										Bappeda dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	6	1	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
			Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dokumen			Tersedianya data wilayah strategis dan cepat tumbuh		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Bappeda dan Statistik
			Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis			0		Perda RTRW	Perda RTRW	100%	Bappeda dan Statistik
1	6	2	Program Kerjasama Pembangunan	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kota), badan usahadan swasta	manfaat/damp ak kerjasama untuk pembangunan Bangka Belitun	4	4	3 (tiga) kerjasama antarprovinsi	rintisan untuk melaksanak an kerjasama	rintisan untuk melaksanakan kerjasama	100%	Bappeda dan Statistik
1	6	3	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan bidang perekonomian	#VALUE!			-	15	15	100%	Bappeda dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realis- asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	6	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	22 dokumen		4 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	Bappeda dan Statistik
1	6	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	23 dokumen		5 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	Bappeda dan Statistik
1	6	6	Program perencanaan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	5 dokumen				3 dokumen	3 dokumen	100%	Bappeda dan Statistik
1	6	7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	5 dokumen		1 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	Bappeda dan Statistik
1	7		PERHUBUNGAN									
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan									
			Kegiatan Koordinasi Dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terbangun	Terpenuhinya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Bangka Belitung	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyusunan Singkronisasi Study Transportasi Bangka Belitung dengan Tatranas				1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun gan
	Kegiatan Penyusunan DED Halaman Parkir Bandara Depati Amir Pangkalpinang	Pengembangan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional	Tersedianya Kajian Pengembang an Bandara dan Penambahan Area		1 Paket	1 Paket	100%				Dinas Perhubun gan
	Kegiatan Penyusunan Kajian Peningkatan Bandara							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun gan
	Penyusunan DED Gedung VIP Terminal bandara Depati Amir Pangkalpinang							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun gan
	Penyusunan DED Pembangunan Masjid Bandara Depati Amir Pangkalpinang							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun gan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ										
	Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Terpeliharany a Prasarana dan Fasilitas Transportasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%				Dinas Perhubun gan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perawatan dan Pemeliharaan Rambu Sungai Selan							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pemilihan dan Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan umum AKDP dan AKAP	Tersedianya terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembang- an terminal AKDP sebanyak 3 terminal	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Peningkatan Pengendalian dan Pemeriksaan Kelaikan Sarana Perhubungan setiap Tahun	Pengendalian dan Pemeriksaan Kelaikan Sarana Perhubungan naik menjadi 70%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Pengawasan Angkutan natal dan Tahun Baru				1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan										Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Navigasi	Pembangunan Dermaga di Pulau- pulau Kecil Berpendeduk	Terpenuhinya Dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk	6 Unit				1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi di sekitar pulau-pulau berpenduduk		hingga 35%					1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Navigasi Alur Kurau dan Sungai Selan			2 Unit							Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pengadaan Rambu Suar Darat Kurau	Peningkatan Pelabuhan beserta Pembangunan Sarana Penunjang Pelabuhan Tanjung Batu	Peningkatan Pelabuhan beserta pembangunan sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100%		1 Unit	1 Unit	100%				Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pembangunan Lanjutan Retaining Wall			101 M							Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Pekerjaan tanah di Bandara Depati Amir pangkalpinang	Pengembangan Bandara Depati Amir	Pengembang- an Bandara Depati Amir		43.617,45 M ³	43.617,45 M ³	100%				Dinas Perhubun- gan
	Kegiatan Penimbunan Tanah Daerah landasan Pacu Bandara hanandjoedin	Pengembangan Bandara Hanandjoeddin	Pengembang- an Bandara Hanandjoeddi n					1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Pekerjaan Pelebaran Airstrip Bandara hanandjoeddin							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Ting- kat at Realis- asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pekerjaan Pemantapan Shoulder Bandara hanandjoeddin							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas										
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas'	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan lalu Lintas di Bangka Belitung	Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan lalu Lintas di Bangka Belitung		230 unit	230 unit	100%				Dinas Perhubun- gan
	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan				520 M	520 M	100%				Dinas Perhubun- gan
	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas simpang empat jalan alexander pangkalpinang				1 Paket	1 Paket	100%				Dinas Perhubun- gan
	Pembangunan Marka Jalan di Tanjungpandan (Desa Kacang Butor) Kelapa - kampit - manggar				19.200 M ²	19.200 M ²	100%				Dinas Perhubun- gan
	Keselamatan Transportasi Darat							1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Pulau Bangka						1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
			Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Pulau Belitung						1 Paket	1 Paket	100%	Dinas Perhubun- gan
1	8		LINGKUNGAN HIDUP									
1	8	1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan									
				Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan	7 kab/kota		0 kab/kota		2 kab/kota	2 kab/kota	100%	BLHD
				Cakupan pelayanan persampahan	3 TPA Regional di Prov.Kep.Bab el		35% TPA Regional yang belum mendapat penanganan (sharing pemerintah pusat)		3 TPA Regional di Prov.Kep.Ba bel	3 TPA Regional di Prov.Kep.Babel	100%	Dinas PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	8	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
			Terpantaunya status mutu air	7 smbr air			2 smbr air		3 smbr air	3 smbr air	100%	BLHD
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	18 org			8 org		10 org	10 org	100%	BLHD
			Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat	1500 org			240 org		500 org	500 org	100%	BLHD
			Adanya Tindakan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	18 kasus			0 kasus		7 kasus	7 kasus	100%	BLHD
			Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL	50 keg			6 keg		15 keg	15 keg	100%	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL	7 kab/kota			6 kab/kota		7 kab/kota	7 kab/kota	100%	BLHD
				Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL	45 keg/usaha			18 keg/usaha		25 keg/usaha	25 keg/usaha	100%	BLHD
				Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen			0 dokumen		-	-		BLHD
1	8	3	Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi SDA dan LH										
				Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	8 jaringan			0 jaringan		2 jaringan	2 jaringan	100%	BLHD
				Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam			terbentuknya 1 unit KPHP model dibangka tengah		terbentuknya 2 unit KPHP Bangka Barat, 1 unit di Belitung timur	terbentuknya 2 unit KPHP Bangka Barat, 1 unit di Belitung timur	100%	Dishut
1	8	4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya status mutu udara	7 kota		1 kota		3 kota	3 kota	100%	BLHD
1	8	5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau									
			Tingkat kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu	14 KSP (30%)			0 KSP (0%)		1 DED RTH 14 KSP	1 DED RTH 14 KSP	100%	Dinas PU
			Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel	7 kab/kota	rasio 23,87%	25%	0 kab/kota		2 kab/kota	2 kab/kota	100%	BLHD

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	1	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
			Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	23,2 % (10 dari 43 SKPD)			0		2,3% (1 dari 43 SKPD)	2,3% (1 dari 43 SKPD)	100%	BPPPAK B
			Persentase SKPD yang memiliki Data Terpilah	23,3 % (10 dari 43 SKPD)			16,3 % (7 dari 43 SKPD)		16,3 % (7 dari 43 SKPD)	16,3 % (7 dari 43 SKPD)	100%	BPPPAK B
				6 Instansi Vertikal			7 Instansi Vertikal		7 Instansi Vertikal	7 Instansi Vertikal	100%	BPPPAK B
			Persentase Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	33			30		30	30	100%	BPPPAK B
1	1	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan									BPPPAK B

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan	1 kebijakan			1 kebijakan		1 kebijakan	1 kebijakan	100%	BPPPAK B
				Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	6,09%			5,90%		0	0	100%	BPPPAK B
				Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,62%			6,17%		6,24%	6,24%	100%	BPPPAK B
1	1	3	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak										BPPPAK B
				Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	10 kebijakan			1 kebijakan		2 kebijakan	2 kebijakan	100%	BPPPAK B
				Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	11			11		11	11	100%	BPPPAK B

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	3			0		0	0	100%	BPPPAK B
1	1	2	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
1	1	2	Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana									BPPPAK B
			Jumlah kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	1 kebijakan			1 kebijakan		1 kebijakan	1 kebijakan	100%	BPPPAK B
			Tingkat prevalensi peserta KB aktif	78,76%			78,70%		78,71%	78,71%	100%	BPPPAK B
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	10,69%			13,69%		13,19%	13,19%	100%	BPPPAK B
1	1	3	SOSIAL									
1	1	3	Program Rehabilitasi Sosial									

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7.375 orang			14.745 orang		1.475 orang	1.475 orang	100%	Dinkesos
				Persentase desa yang di interpersi program				6,70%		6,70%	6,70%	100%	Dinkesos
				Persentase kelurahan yang di interpersi program				6%		6%	6%	100%	Dinkesos
1	1	2	3	Program perlindungan dan Jaminan sosial									Dinkesos
				Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial				560 orang		575 orang	575 orang	100%	Dinkesos
				Persentase desa yang di interpersi program				10,30%		10,30%	10,30%	100%	Dinkesos

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase kelurahan yang di interpensi program				10%		10%	10%	100%	Dinkesos
1	1	3	Program Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan									Dinkesos
			Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan	#REF!			3.416		1.900	1.900	100%	Dinkesos
			persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraanke sejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial				320					Dinkesos
			Persentase desa yang di interpensi program				14,30%					Dinkesos
			Persentase kelurahan yang di interpensi program				13,40%					Dinkesos
1	1	4	Program Pembinaan Generasi Muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan tehnik kepemudaan	#REF!		0		20	20	100%	Biro Kesra

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	5	Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel								Biro Kesra
1	1	6	Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel			0					Biro Kesra
1	1	7	Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah	Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal	90%		30%		50%	50%	100%	Biro Kesra
1	1	8	Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika	Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur	90%				50%	50%	100%	Biro Kesra
1	1	9	Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama	90%				50%	50%	100%	Biro Kesra
1	1	10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni	60				10	10	100%	Biro Kesra
1	1	4	KETENAGAKERJAAN									
1	1	1	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									Disnakertrans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing				0		60	60	100%	Disnakertrans
			Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.				0		50	50	100%	Disnakertrans
			Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri.				0		25	25	100%	Disnakertrans
			Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompetensi	1000 org			1000 Org		160 Org	160 Org	100%	Disnakertrans
			Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru (pasca lulusan pelatihan BLKI)	800 Org			800 Org		160 Org	160 Org	100%	Disnakertrans
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	700 Org			700 Pelaku Usahadi 35 Desa		140 Org	140 Org	100%	Disnakertrans
			Pembinaan Desa Produktif	35 Desa			35 desa		7 Desa	7 Desa	100%	Disnakertrans
							700 Org		140 Org	140 Org	100%	Disnakertrans
1	1	2	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja									Disnakertrans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan	750 org			20 org		150 org	150 org	100%	Disnakertrans
			Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pedesaan dan perkotaan	750 org			0		150 org	150 org	100%	Disnakertrans
			Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna	750 org			0		150 org	150 org	100%	Disnakertrans
			Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga	100 org			0		20 org	20 org	100%	Disnakertrans
1	1	3	Program Pengembangan HI dan Jamsostek									Disnakertrans
			Jumlah PP yg disahkan	660 PP			135 PP		35 PP	35 PP	100%	Disnakertrans
			Jumlah Perajjian Kerja Bersama(PKB) yg terdaftar	554 PKB			29 PKB		35 PKB	35 PKB	100%	Disnakertrans
			Jumlah perusahaan yg menerapkan kesetaraan di tempat kerja	765 Prshn			20 Prshn		35 Prshn	35 Prshn	100%	Disnakertrans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit di Perusahaan	475 Prshn			25 Prshn		70 Prshn	70 Prshn	100%	Disnakert rans
		Jumlah pembinaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit di kab/kota	7 Kab/Kota			7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	Disnakert rans
		Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama	75%			60%		75%	75%	100%	Disnakert rans
		Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (DHK) yang menjadi peserta jamsostek	50.356 Tk			48.456 Tk		250 Tk	250 Tk	100%	Disnakert rans
		Jumlah TK Luar Hubungan Kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek	1000 Tk			-		200 Tk	200 Tk	100%	Disnakert rans

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah	865 Prshn			690		35 Prshn	35 Prshn	100%	Disnaker rans
1	1	4	4	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan									Disnaker rans
				Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	500 anak			-		100 anak	100 anak	100%	Disnaker rans
				Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak	60%			10%		10%	10%	100%	Disnaker rans
				Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak	60%			10%		10%	10%	100%	Disnaker rans
				Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan	65%			15%		10%	10%	100%	Disnaker rans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja	60%			10%		10%	10%	100%	Disnakert rans
		Perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat	70%			20%		10%	10%	100%	Disnakert rans
		Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK)	100%			50%		10%	10%	100%	Disnakert rans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	60%			10%		10%	10%	100%	Disnakert rans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, bejana tekan, listrik, konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran	50%			10%		10%	10%	100%	Disnakert rans
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya	70%			20%		10%	10%	100%	Disnakert rans

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kualitas teknis Pemeriksaan norma ketenagakerjaan	85%			65%		10%	10%	100%	Disnaker rans
			Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan	100%			50%		10%	10%	100%	Disnaker rans
1	1	5	Program Revitalisasi BLKI	Persentase Infrastruktur yang terbangun	100%		15%					Disnaker rans
1	1	6	Program Perencanaan Tenaga Kerja									Disnaker rans
			Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD	95%			0		50%	50%	100%	Disnaker rans
1	1	5	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH									
1	1	1	Program Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi									Dinas KUMKM
			Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM									Dinas KUMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah ragam kemasan KUMKM	9 jenis		0		2 jenis	2 jenis	100%	Dinas KUMKM
				Meningkatnya jumlah usaha menengah, kecil dan mikro			Jumlah usaha menengah 704 unit					Dinas KUMKM
							Jumlah Usaha kecil 74.019 unit					Dinas KUMKM
							Jumlah usaha mikro 222.065 unit					Dinas KUMKM
1	1	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah									Dinas KUMKM
			Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan	kredit perbankan=2, 60T, dana BUMN/CSR=2 8M, Daba pemerintah=7 0M, dana LPDB=2M			kredit perbankan=2, 225T, dana BUMN/ CSR=24,24M, Daba pemerintah=6 7,839M, dana LPDB=2M		kredit perbankan= 2,25T, dana BUMN/CSR= 25M, Daba pemerintah= 68M, dana LPDB=2M	kredit perbankan=2,25 T, dana BUMN/CSR=25 M, Daba pemerintah=68 M, dana LPDB=2M	100%	Dinas KUMKM

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN	Lembaga perbankan=8, lembaga penjamin kredit=1, BUMN=14			Lembaga perbankan=4, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=4		Lembaga perbankan= 1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=2	Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=2	100%	Dinas KUMKM
				Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota	20 pasar			3		2 pasar	2 pasar	100%	Dinas KUMKM
				Jumlah OVOP UMKM	12			2		2	2	100%	Dinas KUMKM
1	1	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit)	DED Balatkop			-		DED Balatkop	DED Balatkop	100%	Dinas KUMKM
				Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi	1 unit gedung promosi dan bisnis			-					Dinas KUMKM
				jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM	Pedesaan= 375, perkotaan= 678			Pedesaan= 305, perkotaan= 643		Pedesaan=1 4, perkotaan=7	Pedesaan=14, perkotaan=7	100%	Dinas KUMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab	
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan	Perikanan=32 %, perkebunan=48 %, pariwisata=7 %, perdagangan=236 %, pangan=85 %		Perikanan=22 %, perkebunan=28 %, pariwisata=2 %, perdagangan=188 %, pangan=60 %		Perikanan=2 %, perkebunan=4 %, pariwisata=1 %, perdagangan=6 %, pangan=5 %	Perikanan=2 %, perkebunan=4 %, pariwisata=1 %, perdagangan=6 %, pangan=5 %	100 %	Dinas KUMKM	
			Persentase koperasi aktif	80 %		78 %		78 %	78 %	100 %	Dinas KUMKM	
			Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal	25 produk		0		5 produk	5 produk	100 %	Dinas KUMKM	
1	15	7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan								Dinas KUMKM	
			Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60 %					12 %	12 %	100 %	Dinas KUMKM	
1	15	5	Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih	103.837 orang		101.837 org		400 org	400 org	100 %	Dinas KUMKM
1	16		PENANAMAN MODAL DAERAH							100 %	BKPM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing	terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor		-		4 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri	4 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri	100%	BKPM
1	1	2	Program Peningkatan Iklim Investasi	terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal		-		10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaika n 1 permasalah an penanaman modal	10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaikan 1 permasalahan penanaman modal	100%	BKPM
1	1	3	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah	tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		data potensi investasi yang tersedia belum lengkap		3 sektor usaha unggulan	3 sektor usaha unggulan	100%	BKPM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1 6	4	Program Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat	60 standar operasional prosedur		tersedianya sarana dan prasarana penyelenggara an perizinan penanaman modal		31 standar operasional prosedur	31 standar operasional prosedur	100%	BKPM
1	1 7		KEBUDAYAAN									
1	1 7	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan	80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik		50%		55%	55%	100%	Disbudpa r
1	1 8		PEMUDA DAN OLAH RAGA									
1	1 8	1	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda	1428 pemuda		316 pemuda		280 pemuda	280 pemuda	100%	Dispora
1	1 8	2	Program Peningkatan Upaya Penuhungan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keter ampilan	370 Pemuda		136 Pemuda		74 Pemuda	74 Pemuda	100%	Dispora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	3	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba	250 pemuda		70 pemuda		50 Pemuda	50 Pemuda	100%	Dispora
1	1	4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga	15 kali		5 kali		3 kali	3 kali	100%	Dispora
1	1	5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									Dispora
			Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS)	28 Even			24 even		6 even (POPNAS,P OPCANAS, Rekreasi, SKJ,Kejurda dan HAORNAS)	6 even (POPNAS,POP CANAS, Rekreasi, SKJ,Kejurda dan HAORNAS)	100%	Dispora
			Jumlah atlet dan pelatih yang dibina	333 orang			75 orang		53 orang	53 orang	100%	Dispora

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 Sapras		1 GOR		1 Stadion Terbuka	1 Stadion Terbuka	100%	Dispora
1	1	7	Program Pembinaan Generasi Muda									Dispora/Biro Kesra
			Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda	160 pemuda			160 pemuda		32 pemuda	32 pemuda	100%	Dispora/Biro Kesra
			Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 kali			5 kali		1 kali	1 kali	100%	Dispora/Biro Kesra
1	1	9	KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1	1	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									Kesbanglinmas

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									20%	20%	100%	Kesbangli nmas
1	1	2	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal									Kesbangli nmas
									20%	20%	100%	Kesbangli nmas
1	1	6	Program pendidikan politik masyarakat									Kesbangli nmas
									20%	20%	100%	Kesbangli nmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1	7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan									Kesbangli nmas
									30%	30%	100%	Kesbangli nmas
			Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)									
1	1	8	Program Kemitraan Kamtibmas								100%	Kesbangli nmas
									40%	40%	100%	Kesbangli nmas
			Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas									

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	0	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;									
1	2	0	1 Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah									
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30 Diklat		30 Diklat		6 Diklat	6 Diklat	100%	Sekretari at DPRD
				Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub					3 Bulan	3 Bulan	100%	Sekretari at DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tertibnya administrasi proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu		Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPUD		Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	100%	Biro Pemerintahan
1	20	2	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah								
			peningkatan fasilitas pelayanan pemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi)	5 kali acara halal bihalal		4 kali acara halal bihalal		1 kali acara halal bihalal	1 kali acara halal bihalal	100% 100%	Kantor Perwakilan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pemilukada Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah		Terlaksananya fasilitasi pelantikan 3 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan pilkada 3 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya fasilitasi pelantikan 3 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan pilkada 3 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	Biro Pemerintahan
1	2	3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatut tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan pelaksanaan keuangan di daerah			- Belum terlaksananya pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, masih kurangnya pemahaman oleh SDM tentang aturan-aturan pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah provinsi dan belum optimalnya penyampaian laporan keuangan pembantuan di wilayah provinsi dan di daerah		Adanya Perda dan pelaksanaan TP di 2 Kab/kota serta peningkatan kualitas SDMsebanyak 80 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 kab/kota	Adanya Perda dan pelaksanaan TP di 2 Kab/kota serta peningkatan kualitas SDMsebanyak 80 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 kab/kota	100%	Biro Pemerintah ahan
						RKPD 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Beli					II-106

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desan dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuda			-Belum terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah, belum terlaksananya rakor pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, belum terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah, belum tersedianya data base sumber pendapatan desa, kekayaan desa dan pungutan desa.		Terlaksanan ya satu kali rapat evaluasi dan dua kali monitoring ke kabupaten/kota, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan desa dan pungutan desa	Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan dua kali monitoring ke kabupaten/kota, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan desa dan pungutan desa	100%	Biro Pemerint ahan
			tersedianya			RKPD 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Beli					II-107

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	4	0	Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah					Rp125.000	Rp125.000	100%	Inspektoral, Satpol-PP
				jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti	4659 Rekomendasi			3534 Rekomendasi		200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	100% 100%	Inspektoral, Satpol-PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)	41 SKPD			8 SKPD		5 SKPD	5 SKPD	100%	Inspekt or at, Biro Organisa si
1	2	5	0	Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejang jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya								100%	Inspektora, Badan Diklat, BKD
		a. Pegawai sudah sertifikasi penjejang JFA/P2UPD	84 Orang			45 Orang		6 Orang	6 Orang	100%	Inspektora, Badan Diklat, BKD
		b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat	277 Orang			40 Orang		43 Orang	43 Orang	100%	Inspektora, Badan Diklat, BKD
		Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								100%	Inspektora, Badan Diklat, BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	6	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi	adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan	2 Sistem		0 Sistem		-	-	100%	Inspektor at
				Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			LAKIP (Nilai C)		LAKIP (Nilai C)	LAKIP (Nilai C)	100%	Biro Organisa si, Inspektor at
1	2	7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	27 Kasus		3 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	100%	Inspektor at

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah		Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulan an potensi konnflik antar daerah yang berbatasan			Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum adanya database potensi kerjasama daerah, dan masih kurangnya pemahaman aparat pelaksana kerjasama tentang kerjasama daerah		Tersusunnya database bidang/potensi kerjasama di daerah perbatasan provinsi dan kab/kota, terfasilitasi pembinaan kerjasama daerah, serta terfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar SKPD provinsi yang terkait dan pelaksana kerjasama daerah	100%	Biro Pemerint ahan	
1	2	9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan							100%	Biro Hukum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 2 0 0	1	0	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Terwujudnya harmonisasi penyelenggara an otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara an otonomi daerah serta masih belum tertatanya urusan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kot a		Terlaksanan ya pembinaan dan pengawasan penyelengga raan otonomi daerah di 2 kabupaten/k ota serta terlaksananya a sosialisasi 6 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/k ota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara n otonomi daerah di 2 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 6 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	100%	Biro Pmerinta han
			Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah									

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan		Terwujudnya penyelenggar aan pemerintahan kecamatan, desa/kelurah an yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurah an terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut		Belum maksimalnya penyelenggara an pemerintahan kecamatan, desa/kelurah an serta kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan		Tersedianya Pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurah an, terselenggg aranya penyelengga raan pemerintah an kecamatan, desa/kelurah an yang baik, serta meningkatny a pemahaman aparatur	Tersedianya Pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurah an, terselenggg aranya penyelengga raan pemerintah an kecamatan, desa/kelurah an yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur	100%	Biro Pemerint ahan
1	2	1	Program pengembangan dan	efektifnya penataan jabatan berdasarkan			42 SKPD (ABK);		42 SKPD (SKJ)	42 SKPD (SKJ)	100%	Biro Organisa

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan			42 SKPD (Peta Jabatan);				100%	si
1	2	1	Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah			Dokumen SOP, SPM, Maklumat, IKM, SP Belum disusun, TND belum disosialisasikan		42 SKPD (SOP, SPM, TND)	42 SKPD (SOP, SPM, TND)	100%	Biro Organisasi
1	2	1	Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)									
			Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar	61 Perda			61 PERDA (2007 s/d 2011)		12 Perda	12 Perda	100%	Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah	Terwujudnya kinerja pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah		Masih rendahnya kinerja pelaporan Kepala Daerah serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem pelaporan Kepala Daerah		Tersusunnya pelaporan kepala daerah yang akuntabel dan peningkatan pemahaman SDM sebanyak 40 orang terhadap sistem pelaporan kepala daerah	Tersusunnya pelaporan kepala daerah yang akuntabel dan peningkatan pemahaman SDM sebanyak 40 orang terhadap sistem pelaporan kepala daerah	100%	Biro Pemerintah
1	2	2	Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD			-		2 SKRT	2 SKRT	100%	Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	Program pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD			-		2 Kab	2 Kab	100%	Biro Organisasi
1	2	2	program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya manajemen pengelolaan SKPD			-		2 SKRT	2 SKRT	100%	Biro Organisasi
1	2	2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana									
			Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk	100%			14%		28%	28%	100%	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpersi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%			100%		100%	100%	100%	BPBD
1	2	2	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat									
			Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana	100%			100%		100%	100%	100%	BPBD
			Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana	100%			25%		30%	30%	100%	BPBD
			Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana	75%			5%		15%	15%	100%	BPBD
1	2	2	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana									
			Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon	50%			0%		10%	10%	100%	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana	70%			0%		20%	20%	100%	BPBD
1	2	3	0	Program Pendidikan Kedinasan				0		55	55	100%	BKD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									Bandiklat
				Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III	80 org	80 org	80 org	80 org	100%	80 org	80 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Terwujudnya aparatur yang profesional untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural	80 org	40 org	40 org	40 org	100%	80 org	80 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III	Terwujudnya calon PNS yang memiliki kompetensi tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai PNS	165 org	144 org	80 org	-	0	155 org	155 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan II dan I	Terwujudnya calon PNS yang memiliki kompetensi dasar dalam menjalankan tugas secara profesional	165 org	164 org				175 org	175 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Bimtek Sosialisasi Bahasa Inggris untuk Diklat PIM III, IV, II dan I	Meningkatnya kualitas karakter kepemimpinan yang diindikasikan dengan kemampuan pengelolaan kualitas diri, khususnya kemampuan bahasa Inggris	170 org		140 org	140 org	100%	180 org	180 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab/Kot	Terciptanya kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an APBD	Mewujudkan aparatur yang memahami dan memiliki kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawab an APBD	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Diklat Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mewujudkan aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur	Mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki dinamika pola pikir yang lebih berkembang	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas camat	meningkatkan pengetahuan, kempuan dan wawasan para camat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan						40 org	40 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Diklat Bendahara Pengeluaran	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah	40 org		40 org	40 org	100%	40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Bendahara Penerimaan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Teknis Pengelola Barang Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bendahara barang/pengurus barang tentang manajemen barang aset daerah	40 org		40 org	40 org	100%	40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	Terpenuhinya persyaratan sesuai Perpres 54 Tahun 2010	100 org	152 org				100 org	100 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kegiatan Ujian Seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV		827 org				1000 org	1000 org	100%	Bandiklat
		Kegiatan Diklat Manajemen of Training (MOT)	30 org		30 org	30 org	100%	30 org	30 org	100%	Bandiklat
		Kegiatan Diklat Training Officer Course (TOC)	30 org		30 org	30 org	100%	30 org	30 org	100%	Bandiklat
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyaiswara	30 org					30 org	30 org	100%	Bandiklat
		Kegiatan penyusunan produk- produk hukum (legal drafting)	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Diklat Emotional Spiritual Quotients (ESQ)	Meningkatnya ketakwa-an dan keimanan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur pemerintah	100 org					100 org	100 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Penyusunan APB Desa	Meningkatnya pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara profesional	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Program Pengendalian Kegiatan bagi PPTK	Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengendalian kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara profesional		40 org							Bandiklat
	Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan LAKIP	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah		36 org							Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu	Terlayannya diklat aparatur pemerintah secara terpadu dan profesional	40 org					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Diklat Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	40 org								Bandiklat
	Kegiatan Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja			40 org	40 org	100%				Bandiklat
	Kegiatan Diklat Analisis Kompetensi Jabatan	Meningkatkan kompetensi aparatur bidan analisis standar kompetensi jabatan			40 org	40 org	100%				Bandiklat
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas									Bandiklat
	Kegiatan Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya	50 org	48 org				50 org	50 org	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengembangan Kediklatan (AKD, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengembangan kediklatan	30 org					30 org	30 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terpahaminya standar kualifikasi dalam kompetensi sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menganalisa permasalahan dan kebutuhan program	1	1	1	1	100%	1	1	100%	Bandiklat
	Kegiatan Bimtek Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Dasar	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melakukan evaluasi dan pelaporan di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		35							Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Bimtek Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Lanjutan	Terwujudnya petugas evaluasi dan pelaporan yang memahami tupoksi dalam menjalankan tugas			40 org	40 org	100%				Bandiklat
	Kegiatan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pemahaman sumber daya aparatur bidang penatausahaan keuangan daerah			40 org	40 org	100%				Bandiklat
	Kegiatan Penyusunan Profile Kediklatan	Memberikan gambaran data dan informasi berkenaan dengan aparatur pada Badan Diklat Prov. Kep. Babel	100		50 org	50 org	100%	100	100	100%	Bandiklat
	Kegiatan Pengembangan Kediklatan	Menentukan diklat yang relevan untuk aparatur di lingkungan pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung						30 org	30 org	100%	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Kediklatan	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan	30					40 org	40 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Skala Prioritas Diklat	Menyamakan persepsi tentang skala prioritas diklat aparatur di lingkungan pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	60					60 org	60 org	100%	Bandiklat
	Kegiatan Evaluasi Kurikulum dan Bahan Ajar Kediklatan	Tersusunnya dokumen dan bahan ajar kediklatan hasil evaluasi	1					1	1	100%	Bandiklat
	Kegiatan Evaluasi Dampak Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Tersusunnya hasil evaluasi dampak diklat aparatur pada setiap SKPD	1					1	1	100%	Bandiklat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menentukan skala prioritas diklat	40 org							Bandiklat
			Kegiatan Diklat Penelitian Kediklatan	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penelitian pengembangan kediklatan	30 org							Bandiklat
1	2	1	KETAHANAN PANGAN									
1	2	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
				Persentase cadangan pangan pemerintah	100%		0		50%	50%	100%	Badan Ketahana n Pangan
				Skor pola pangan harapan	95		80,6		83,9	83,9	100%	Badan Ketahana n Pangan
				Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel			35		40	40	100%	Badan Ketahana n Pangan

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatkan ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%)	95%			70%		75%	75%	100%	Badan Ketahanan Pangan
			Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun	15 desa			-		3 desa	3 desa	100%	Badan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa)	75 desa			60		3	3	100%	Badan Ketahanan Pangan
1	2	2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
1	2	1	Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa									
			Persentase BUMDes yang aktif	100%			10%		30%	30%	100%	BPMPD
			Jumlah pasar desa yang aktif	50			2 desa		5 desa	5 desa	100%	BPMPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PKK aktif (Jumlah seluruh PKK)	100%			85%		85%	85%	100%	BPMPD
			Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu)	100%			90%		95%	95%	100%	BPMPD
			Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang berfungsi (jumlah keseluruhan desa)	90%			30%		50%	50%	100%	BPMPD
			Prosentase pasar desa yang aktif	100%			10%		20%	20%	100%	BPMPD
1	2	2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan									BPMPD
			Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)	90%			10%		15%	15%	100%	BPMPD

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)				100%		100%	100%	100%	BPMPD
1	2	3	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan										BPMPD
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan)	100%			50%		60%	60%	100%	BPMPD

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kon disi skr 6 kelompok))	0,60%			0,21%		0,28%	0,28%	100%	BPMPD
1	2	5	Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG										BPMPD
				Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan)	100%			10%		30%	30%	100%	BPMPD
				Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa)	100%			10%		20%	20%	100%	BPMPD
				Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG	55%			15%		20%	20%	100%	BPMPD

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	6	Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)	100%			100%		100%	100%	100%	BPMPD
1	2		KEARSIPAN										
1	2	4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan	180 desa/ kelurahan			0 desa/keluraha n		20 desa/kelurah an	20 desa/kelurahan	100%	BPAD
1	2	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan	680 org			0 orang		40 org	40 org	100%	BPAD
1	2		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab	
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Penyediaan koneksi bandwith internet	Tersedianya Bandwith Jaringan Internet Provinsi	32 Mbps	16 Mbps	24 Mbps	24 Mbps	100%	32 Mbps	32 Mbps	100%	Diskominf o
		Penyediaan jasa hosting	Terlaksananya Hosting Website Provinsi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		Pengadaan peralatan data center	Tersedianya Peralatan Data Center	7 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		Pembangunan infrastruktur jaringan hotspot	Tersedianya 45 titik Hotspot di 7 Kabupaten/Kota	70 Paket		14 Paket	14 Paket	0%	14 Paket	14 Paket	100%	Diskominf o
		Sewa bandwith VSAT	Tersedianya Jaringan Vsat Mobile	3 Paket					1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		operasionalisasi M_CAP	Tersedianya Dana Operasional M-CAP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Diskominf o
		Pembangunan Lab Development Software Klinik Implementasi Open Source	Tersedianya Lab Development Software Klinik Implementasi Open Source	2 Paket					1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		Pengadaan peralatan dan monitoring NOC	Tersedianya Peralatan Monitoring NOC	2 Paket					1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		Pengelolaan dan opersional TVRI Bangka Belitung	Tersampaiannya informasi ke masyarakat	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengelolaan dan operasional stasiun radio, media center dan mobile unit	Terpublikasinya program-program pemerintah melalui Stasiun radio, media center dan mobil unit	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
			Fasilitasi Pembentukan KID Prov. Kep. Babel	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan KID Prov. Kep. Babel	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
1 2			Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media baleho	Tersedianya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media baleho	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
			Monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan kementerian komunikasi dan informatika RI	Terlaksananya Pengawasan bantuan peralatan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	1 Paket				1 paket	1 paket	100%	Diskominfo
			Rapat koordinasi dan sosialisasi masalah Telekomunikasi Diskominfo. Babel.	Terjalin Koordinasi di Bidang Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi antara Prov. Dengan Provider Telekomunikasi dan Pemerintah kab/kota	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengadaan peralatan monitoring sinyal telekomunikasi tetap dan bergerak	Terlaksananya pengawasan terhadap jangkauan peralatan provider telekomunikasi di Babel	1 Paket	1 Paket						Diskominfo
		Pembinaan dan pengawasan Jarkomsanda Prov. Kep. Babel	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Jarkomsanda Prov. Kep. Babel	5 Paket				1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Pembangunan Call Center yg terintegrasi dengan Pusat Informasi Layanan VOIP, SMS gateway, internet dan contact center	Tersedianya pusat informasi yg dapat memberikan informasi secara interaktif	5 Paket				1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Updating pusat informasi pembangunan daerah	Termuktahirnya data-data pembangunan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Ting- kat at Realis- asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengembangan portal induk dan updating pusat informasi Prov. Babel	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Pengadaan peralatan VOIP	40 Paket	40 Paket			0%				Diskominfo
		Pengadaan Server/NAS	30 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%	Diskominfo
			45 Paket FO	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%	Diskominfo
			8 Paket	8 Paket							Diskominfo
			7 paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	Diskominfo
		Pengadaan peralatan komunikasi VOIP	45 Paket		20 Paket	20 Paket	100%				Diskominfo
			45 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%	Diskominfo
			5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tersedianya Peralatan DRC	2 Paket		1 Paket	1 Paket	100%				Diskominfo
			Tersedianya Peralatan Lab hardware dan Jaringan	2 Paket	1 Paket							Diskominfo
			Tersedianya 45 Titik Jaringan Perdesaan di 7 Kab/kota	70 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	100%	14 Paket	14 Paket	100%	Diskominfo
			Tersedianya 45 Titik Jaringan Pesisir dan Pulau-pulau kecil di 7 Kab/kota	70 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	100%	14 Paket	14 Paket	100%	Diskominfo
			Terselenggaranya Rakor Bidang TIK dan Pengolahan TIK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Keg	1 Keg	100%	Diskominfo
			Tersedianya peta Cellplan Menara Telekomunikasi di Prov. Kep. Babel			1 Paket	1 Paket	100%				Diskominfo
			Perbaikan dan perawatan jaringan	terwujudnya perbaikan dan perawatan jaringan	1 Kegiatan							Diskominfo
256			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi									Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengumpulan data dan informasi	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota	250 org	50 org	50 org	50 org	100%	50 org	50 org	100%	Diskominfo
		Bimtek bidang pengembangan dan pengelolaan website berbasis content manajemen system	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	Diskominfo
		Tersedianya data Monev Kab/Kota	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
		Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan	1 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Telekomunikasi									
1	2	1	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika										Diskominfo
				Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Pos dan Bidang Telekomunikasi melalui Bimtek dan Pelatihan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
				Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo
				Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi dan kamar sandi representatif dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	1	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media										Diskominf o
			Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tersampaikan informasi kegiatan pembangunan daerah melalui website Prov. Kep. Babel	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
			Penyebaran komunikasi dan informasi melalui tatap muka	- Penyampaian informasi masyarakat melalui tatap muka	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
1	2		Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak	Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui Media cetak	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
			Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik nasional	Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui Media Elektronik	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tersedianya Majalah Kominfo Prov.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
	Bimtek jurnalistik	Terlaksananya Bimtek Bidang Pengembangan Kominfo Kehumasan Instansi Pemerintah se- Prov. Kep. Babel	1 Keg	2 kali							Diskominf o
		Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
	Penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah daerah	Tersampainya kegiatan/permasala han dan informasi penting dari masyarakat di kab/kota	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Diskominf o
		Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi Masyarakat	1 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	Diskominf o

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan peringatan hari Pers nasional	1 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%	Diskominfo
			Publikasi sail wakatobi Belitong 2011		1 paket							Diskominfo
1	2	6	PERPUSTAKAAN									
1	2	6	1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
				592 desa			65 desa		102 desa	102 desa	100%	BPAD
			Persentase desa/kelurahan yang diinterpendi pengembangan budaya baca									
			Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan	105 desa/kel			0		21 desa/kel	21 desa/kel	100%	BPAD
			Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina	680 org			0		80 org	80 org	100%	BPAD
2			PILIHAN									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	3	PERTANIAN										
2	1	3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an										
				Pengembangan kawasan perkebunan	Tersedianya sarana prasarana teknologi pertanian/perk ebunan yang tepat guna yang memadai			Sarana prasarana teknologi pertanian/perk ebunan yang tepat guna dirasa belum memadai		Meningkatny a sarana prasarana teknologi pertanian/pe rkebunan yang tepat guna	Meningkatnya sarana prasarana teknologi pertanian/perkeb unan yang tepat guna	100%	Distanbu nak
				Terlaksananya pelatihan Penerapan teknologi pertanian/perkebuna n yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada	Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan			-		Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan	Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan	100%	Distanbu nak
2	1	4	Program Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebuna n										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai	Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan			sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi belum memadai		Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan	100%	Distanbu nak
		Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper)	Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada			-		Meningkatny a kesejahteraa n petani dan lada	Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada	100%	Distanbu nak
		kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi	pengembang an integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perk ebunan					pengemban gan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/pe rkebunan	pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan	100%	Distanbu nak
		Pengembangan gambilik	25ha			-		5ha	5ha	100%	Distanbu nak
		Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang di bina)									

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung		-		Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	100%	Distanbu nak
2	1	6	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)					50%	50%	100%	Distanbu nak
2	1	7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan		-		Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	100%	Distanbu nak
2	1	7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan		-		Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan	100%	Distanbu nak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	8	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha										
				Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahnya	100 kelompok			20 kelompok		20 kelompok	20 kelompok	100%	Bakorluh
				Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dengan metode percontohan	95 kelompok			19 kelompok		19 kelompok	19 kelompok	100%	Bakorluh

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	9	Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha									
			Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	150 penyuluh			30 penyuluh		30 penyuluh	30 penyuluh	100%	Bakorluh
			Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya	750 orang			150 orang		150 orang	150 orang	100%	Bakorluh
2	1	10	Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi	30 judul leaflet, 15			6 judul leaflet, 3		6 judul leaflet, 3	6 judul leaflet, 3	100%	Bakorluh
		dalam berbagai media cetak	judul brosur)			judul brosur)		judul brosur)	judul brosur)	100%	
		Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamata n yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7	30 unit BPP/BPK			6 unit BPP/BPK		6 unit BPP/BPK	6 unit BPP/BPK	100%	Bakorluh
		kabupaten/kota se- Prov. Babel								100%	
2	2	KEHUTANAN									
2	2	1	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan								
		Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi	4 kelompok			4 kelompok		4 kelompok	4 kelompok	100%	Dishut

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat	6 kabupaten			-		6 kabupaten	6 kabupaten	100%	Dishut
2	2	2	Program Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat									
			Terencanannya pengelolaan DAS terpadu	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir			Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Ajang Mabat-Macung		Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu pada 1 SWP Cerucuk-Lenggang	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu pada 1 SWP Cerucuk-Lenggang	100%	Dishut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas			Terbentuknya tim pengendali rehabilitasi dan reklamasi hutan provinsi kep. Babel		Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	100%	Dishut

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 2 3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal			Keputusan mentri hehutanna Nomor SK.357/Menhu t-II/2004 tentang penunjukan Kawasan hutan wilaya provinsi kepulauan bangka belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitian tim terpadu penyelesaian subtansi kehutanan dalam rangka penyusunan RTRWP.		Meningkatny a pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertipe penata gunaan kawasan hutan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertipe penata gunaan kawasan hutan	100%	Dishut
2 2 4	Program perlindungan dan konservasi SDA										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)			Penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (Honoror)		terlaksananya a perlindungan n dan pengamana n hutan dan hasil hutan	terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan	100%	Dishut

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terbentuknya dan beroprasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi pemnfaatan SDA dalam rangka terselenggara nya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam			Penetapan 2 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Menteri Kehutanan , 6 lokasi hutan konservsi dan penetapan 3 kawasan lindung (di kab. Bangka Tengah, Kab Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang)		Pembentuka n KPHL	Pembentukan KPHL	100%	Dishut
2	3	ENERGI DAN SUMBER DAYA									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			MINERAL										
2	3	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi										
				DBH sektor Migas (milyar rupiah)	30	180,50%	6	8,8	148%	6.000	6.000	100%	Distam- ben
				DBH sektor tambang (milyar rupiah)	325	133,40%	65	89,58	137,81 %	65.000	65.000	100%	Distam- ben
				Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK)	300.000	-	-	-	-	100.000	100.000	100%	Distam- ben
				Jumlah SPBG (unit)	2	-	-	-	-	-	-	100%	Distam- ben

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	3	2	Program pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah	Tersedianya laporan pelaksanaan program reklamasi dan pasca Tambang sebanyak 75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiaan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	75 lap, 1 Pergub mineral, 65 pelaku tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	-	-	-	15 Pelaksanaa n reklamasi dan pasca tambang, 1 PERGUB Mineral, 13 Lap pelaku tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM	15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 1 PERGUB Mineral, 13 Lap pelaku tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM	100%	Distambe n
2	3	3	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		PLT Hybrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur	PLT Hybrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur		5 unit (15 KW-APBN)			PLT hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 76,5 MW; JTM 270,4 kms; JTR 302,9 kms	PLT hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 76,5 MW; JTM 270,4 kms; JTR 302,9 kms	100%	Distam- ben
		Jumlah desa mandiri energi	3 desa					1 desa	1 desa	100%	Distam- ben
		Tingkat penerapan hemat energi	32% penghematan					7%	7%	100%	Distam- ben

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan	2 PLTU								Distam- be n
2	3	4	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung	200 laporan					40 lap. Kegiatan penambang an di provinsi Kep. Babel	40 lap. Kegiatan penambangan di provinsi Kep. Babel	100%	Distam- be n
2	3	5	Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi *)	Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi	1 perda					persiapan penyusunan perda Distribusi BBM Tk. provinsi	persiapan penyusunan perda Distribusi BBM Tk. provinsi	100%	
2	3	6	Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *)	Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal	8 unit energi alternatif			-		2 unit pengemban- gan energi alternatif	2 unit pengembangan energi alternatif	100%	
2	4		PARIWISATA										
2	4	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab	
							Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Jumlah Desa sebagai Desa Wisata (Destinasi)	95			31		35	35	100%	Disbudpa r	
				Persentase Peningkatan Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata	75%			45%		55%	55%	100%	Disbudpa r	
2	5		KELAUTAN DAN PERIKANAN											
			Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan											
			Kegiatan Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Laut	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha)	550.000			300.000	496.792	350.000	400.000	400.000	100%	DKP

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	12		3	4	133,33	7	7	100%	DKP
2	5		Kegiatan Produksi dan Pengendalian Budidaya Ikan	69.000	7.990,30	35.000	8.107,50	23,16	42.000	42.000	100%	DKP
			Kegiatan Pembudidayaan, Pembenihan dan Kesehatan	127	90,54	118	90	76,04	119	119	100%	DKP
2	5		Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	181.000	153.933	159.000	208.722	131,27	161.000	161.000	100%	DKP
2	5	4	Kegiatan Usaha dan Prasarana		90,54	118	89,73	79,04	119	119	100%	DKP

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan									
		Kegiatan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	2.800		1.470	1.303	86,64	1.700	1.700	100%	DKP
		Kegiatan Fasilitas Pemasaran dan Permodalan	24	9.039.957	9	7.991.971	85,38	11	11	100%	DKP
		Kegiatan Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan	49	38	38	41,5	109,21	43	43	100%	DKP
		Jumlah kredit yang difasilitasi KKMB (kelompok)		74	75	77	102,67				
2	6	PERDAGANGAN									
		Program Perlindungan konsumen dan	6	-	-	-	-	2	2	100%	Disperind ag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengamanan Perdagangan	Konsumen									
		- Jumlah PPNS	14	-	-	-	-	10	10	100%	Disperind ag
		- Jumlah kecamatan menerima Pelayanan Kemetrologian	50	-	-	-	-	43	43	100%	Disperind ag
		- Jumlah MOU yang terbentuk	5	-	-	-	-	1	1	100%	Disperind ag
		- Retribusi Tera (Rp 000)	1.221.020	146.146				200.000	200.000	100%	Disperind ag
		- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2,351	1.151	1,351	1,225	- 90,67 %	1,551	1,551	100%	Disperind ag
	Pelayanan Kemetrologian	Terjaminnya Kebenaran Alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli		1 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Monev Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			3 kali/Pasar Modern						Disperind ag
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian	Terjaminnya Kebenaran Alat UTTP dalam			15000 buah dari 30000	15000 buah dari 30000 buah (sebesar	100%				Disperind ag

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	daerah	Transaksi Jual Beli			buah (sebesar 50%)	50%					
	Pengadaan Peralatan Standar dan Alat laboratorium	Optimalnya Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP			1 paket	1 paket	100%				Disperind ag
	Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli dalam Persaingan Usaha tidak sehat	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli dalam Persaingan Usaha tidak sehat	4 x kegiatan / 50 orang	1 x kegiatan	1 x kegiatan / 40 orang	1 x kegiatan / 40 orang	100,00 %	1 x kegiatan / 60 orang	1 x kegiatan / 60 orang	100%	Disperind ag
	Penguatan kelembagaan perlindungan konsumen	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan perlindungan konsumen	2 x kegiatan / 50 orang	-	1 x kegiatan / 40 orang	1 x kegiatan / 40 orang	100,00 %	1 x kegiatan / 40 orang	1 x kegiatan / 40 orang	100%	Disperind ag
	Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli dalam Persaingan Usaha	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli dalam									

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	tidak sehat	Persaingan Usaha tidak sehat									
	Pengawasan dan monitoring terhadap barang beredar	Pengawasan dan monitoring terhadap barang beredar	14 x kegiatan	-	7 x kegiatan	7 x kegiatan	100,00 %	10 x kegiatan	10 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Forum Koordinasi Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi dunia usaha	2 x kegiatan	-	-	-	-	2 x kegiatan	2 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	- Peningkatan volume ekspor (ton)	411.800	307.29				338.789	338.789	100%	Disperind ag
		- Total Nilai Ekspor (US\$)	2.239.828.431	1.671.394,46				1.842.712.3 92	1.842.712.392	100%	Disperind ag
		- Retribusi pengambilan contoh dan pengujian (Rp 000)		88.460.000							
	Peningkatan Kapasitas Lab Penguji mutu barang ekspor dan impor	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Laboratorium Penguji Mutu barang			1 kegiatan	1 kegiatan	100%				Disperind ag
	Bimbingan Teknis dan Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Implementasi Kebijakan	2 x kegiatan / 60 orang peserta	1 x kegiatan /42 orang peserta	2 x kegiatan / 50 orang peserta	2 x kegiatan / 45 orang peserta	100 % / 90 %	2 x kegiatan / 50 orang peserta	2 x kegiatan / 50 orang peserta	100%	Disperind ag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Ting- kat at Realis- asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Negeri	Perdagangan Luar Negeri									
	Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor Mengenal Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	2 x kegiatan	1 x kegiatan	2 x kegiatan	2 x kegiatan	100%	2 kali / 100%	2 kali / 100%	100%	Disperind ag
	Forum Koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan kebijakan Perdagangan Luar Negeri	terlaksananya Rapat Koordinasi Instansi terkait dan tingkat provinsi	3 x kegiatan		3 x kegiatan	2 x kegiatan	66,70 %	3 x kegiatan	3 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan impor	Terlaksananya Pemahaman tentang ekspor dan impor	2 x kegiatan	1 x kegiatan	2 x kegiatan	1 x kegiatan	50%	2 x kegiatan	2 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Fasilitasi dan pendampingan masalah ekspor dan impor bagi pelaku usaha	Bagi Pemecahan masalah, 5 kasus pertahun	9 kasus					5 kasus	5 kasus	100%	Disperind ag
	Bimbingan teknis	5 (lima) orang									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kebijakan perdagangan luar negeri		7 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang / 100%	5 orang / 100%	100%	Disperind ag
	Bimbingan teknis Pelatihan UKM Ekspor	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi eksportir dan calon eksportir	20 eksportir/calon eksportir					10 eksportir/cal on eksportir	10 eksportir/calon eksportir	100%	Disperind ag
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Jumlah Pedagang UMKM	1.378	-	-	-	-	1.298	1.298	100%	Disperind ag
		- Jumlah Pasar Percontohan	7	-	-	-	-	1	1	100%	Disperind ag
	Partisipasi Promosi Produk Andalan daerah	Terlaksananya Partisipasi Promosi Produk Andalan daerah	2 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	2 x kegiatan	2 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Pemantauan Harga dan stok kebutuhan pokok	Terlaksananya harga dan stok kebutuhanh pokok	1 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Pelaksanaan pasar murah	Terlaksananya Pelaksanaan pasar murah	2 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	2 x kegiatan	2 x kegiatan	100%	Disperind ag
	Sosialisasi peningkatan	Terlaksananya Sosialisasi	1 x kegiatan		1 x kegiatan	1 x kegiatan	90%	1 x kegiatan	1 x kegiatan	100%	Disperind ag

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penanggu ng Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingkat at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		penggunaan produk dalam negeri	peningkatan penggunaan produk dalam negeri								
2	7	PERINDUSTRIAN									
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Jumlah IKM (unit)	7.145	7116			6.868	6.868	100%	Disperind ag
			- Total nilai investasi IKM (Rp 000)	363.157.330	332.596.707			348.987.057	348.987.057		
		Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM Yang memiliki Sertifikasi Halal	140		10 buah	10 buah	100%	10 buah	100%	Disperind ag
		Partisipasi Pameran di Luar daerah	Terlaksananya Partisipasi Pameran di Luar Daerah	12		3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3	100%	Disperind ag
		Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merk	Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi halal								
		Pemberdayaan Klinik Kemasan	Terbentuknya lembaga Klinik Kemasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1				1	1	100%	Disperind ag
		Pembentukan Forum Koordinasi	Terbentuknya Forum Koordinasi								

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	OVOP Provinsi	OVOP di 7 Kab/kota									
	Fasilitasi Rapat Koordinasi Nasional IKM	Tersusunnya Kesimpulan dan Berita Acara Hasil Rakornas IKM	1					1	1	100%	Disperind ag
	Bimbingan dan Pelatihan Teknis Bagi perajin dan Masyarakat	Jumlah IKM yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan Teknis	400					80	80	100%	Disperind ag
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk	Meningkatnya mutu produk IKM									
	Bimbingan dan Pelatihan Teknis	Meningkatnya SDM masyarakat dan perajin dan tumbuhnya wirausaha baru									
	Fasilitasi akses perbankan/swasta bagi industri Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah IKM yang mendapatkan bantuan permodalan									
	Verifikasi data IKM	Tersedianya data IKM yang Valid dan up to date	4 x kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyerediaan sarana dan prasarana IKM center	1								
		Penyuluhan dan pemdampingan langsung tyerhadap IKM oleh Shindan Shi dan PFPF	1								
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Jumlah IKM (unit)	4.323	7116			6.868	6.868	100%	Disperind ag
			- Total nilai investasi IKM (Rp 000)	84.434.775	332.596.707			348.987.057	348.987.057		
		Bimbingan Teknis Pengolahan bahan Baku Keramik, Pengolaha n Pangan berbasis ubi kayu dan peningkatan mutu olah karet	Terlaksananya Pembinaan Keterampilan dan Kualitas Aparatur dan Masyarakat								
		Sosialisasi tentang teknologi pengolahan yang lebih baik serta penemuan balai-balai penelitian	Meningkatnya SDM masyarakat dan perajin								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peningkatan keterampilan teknik dan profesionalisme bagi aparatur dan dunia usaha	Terlaksananya diklat teknik industri dan manajemen industri								
		Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Penerapan teknologi proses hasil riset industri,tersedianya mesin dan peralatan produksi sesuai standar								
		Bantuan alat pengolahan bagi IKM	Tersedianya alat pengolahan bagi IKM								
		Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Terlaksananya penerapan dan pengawasan SNI produk								
		Program Penataan Struktur Industri	- Jumlah IKM (unit)	4.323	7116			6.868	6.868	100%	Disperind ag
			- Total nilai investasi IKM (Rp 000)	84.434.775	332.596.707			348.987.057	348.987.057		

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengembangan Kluster Industri Prioritas	Jumlah Lokus Kluster Industri,tersusunnya dokumen kajian pengembangan industri prioritas,tersusunnya a data potensi dan pengembangan industri								
		Pembinaan keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir	Terlaksananya Forum Koordinasi dan kerjasama pengembangan industri prioritas								
		Fasilitasi kelembagaan serta sarana dan prasarana klinik kemasan	terbentuknya Klinik Kemasan	1				1	1	100%	Disperind ag
		Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP	Terbentuknya OVOP industri potensial								
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	- Jumlah IKM (unit)	4323	64,60%		6.868	6.936	6.936	100%	Disperind ag
			- Total nilai investasi IKM (Rp 000)	84434775	293%		348.98 7.057	352.476.927	352.476.927		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penang- gung Jawab
					Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi Penyediaan sarana informasi pasar dan peningkatan teknologi informasi	Tersedianya sarana informasi bagi IKM	1							
		Pembentukan, pemberdayaan klinik IKM kerajinan Pewter	Terbentuknya Klinik Kerajinan Pewter								
		Program Promosi Produk Unggulan Daerah									
		Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah	Terlaksananya fasilitasi promosi dan pengembangan akses pasar								
		Program pengembangan Industri Berbasis Sumber daya Alam (Agro dan Non Agro)	Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan	5	-	-	-	1	1	100%	Disperind ag
		Pembelajaran kelembagaan pengembangan komoditi berbasis agro/non agro									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)			Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013		SKPD Penangg ung Jawab
						Target RKPD Tahun 2012	Realisasi RKPD Tahun 2012	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Diseminasi hasil penelitian pengolahan komoditi agro/non agro									
			Forum Diskusi pengembangan industri berbasis komoditi agro/non agro									
			Bimbingan dan pelatihan teknis proses pembuatan barang jadi karet									
2	8		KETRANSMIGRASI AN									
2	8	1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah pemukiman dalam kawasan transmigrasi	600 kk		0		200 kk	200 kk	100%	Disnakert rans
2	8	2	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya masyarakat dalam kawasan transmigrasi yang berintegrasi	28 kgf		0		4 kgf	4 kgf	100%	Disnakert rans

2.3 Pokok-pokok Fikiran DPRD

Tabel II. 63
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Honor P3N yang sangat Kecil			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
2	Pemberian Insentif bagi Guru TK, TPA			Paya benua, Kuto Panji, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
3	Asuransi kesehatan untuk masyarakat tidak mampu			Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
4	Kemudahan bagi pengguna kartu Jamkesmas dan Jamkesda			Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
5	Penyaluran Raskin tepat sasaran			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinkessos	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
6	Bantuan Pengembangan Pariwisata Daerah			Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	Disbudpar	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Pemberian insentif honor bagi guru TPA			Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	Biro Kesra	Belum termasuk rencana Biro Kesra
8	Bantuan Sarana mesjid Raya Al-Iman			Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
9	Sosialisasi/penyebaran informasi peraturan daerah tentang dana hibah			Sungailiat, Zed-Mendo Barat, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah termasuk rencana Biro Kesra
10	Bantuan Pembangunan Menara Masjid			Penyamun, Pemali, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
11	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren dan rumah-rumah ibadah di Desa Mangka			Desa Mangka - Bakam, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
12	Pembangunan Mushola			Desa Bukit Terak, Kabupaten Barat	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
13	Rehab masjid			Pal III, Kabupaten Barat	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
14	Pembangunan Mushola SD		SD madrasah 08	desa air belo, Kabupaten Barat	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
15	Pembangunan Masjid			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Selatan		verifikasi lebih lanjut
16	Bantuan Musholla			Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
17	Pembangunan Masjid			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
18	Bantuan penerangan lampu di dalam mesjid			Dusun Bukit Indah Desa Kacang Butor, Kabupaten Belitung	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
19	Bantuan Musholla			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
20	Kuota BBM Bersubsidi			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
21	Memajukan sektor tanbunak			Namang, Kabupaten Tengah	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
22	Memajukan sektor tanbunak dan kelautan			Lubuk Besar, Kabupaten Tengah	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
23	Sinergitas Pemprov dan DPRD untuk menaikkan harga karet dan buah sawit milik petani			Namang, Kabupaten Tengah	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
24	Penyesuaian harga karet/sawit			desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Distanbunnak	sudah ada tim terpadu penentuan harga TBS

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Membantu pemasaran hasil bumi (kelapa sawit,karet, ubi)			Kecamatan Kelapa, Kabupaten Barat	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
26	Perlunya Campur Tangan Pemerintah agar pengerjaan sawah didesa Rias dikerjakan secara serempak oleh masyarakat			Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, tindaklanjut kebijakan
27	Andil dari pemerintah setempat dalam pemasaran hasil panen			Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, tindaklanjut kebijakan
28	Bantuan Persawahan diharapkan dilakukan secara rutin			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, tindaklanjut kebijakan
29	Masalah berapa luas sawah yang akan dicetak oleh kelompok Gapoktan			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, tindaklanjut kebijakan
30	Daba untuk desa/kecamatan (Satam Emas)			Kab. Bangka	DPPKAD	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
31	Agar kelurahan diberikan Dana ADD			Koba, Kabupaten Tengah	DPPKAD	Tindaklanjut kebijakan
32	Penertiban dan pengaturan saat jam masuk dan pulang sekolah			Depan SMPN 2, Kota Pangkalpinang	Polres	Tindaklanjut dan rekomendasi kepada Polres Pangkalpinang
33	Pembangunan Universitas			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas Pendidikan	Perlu Verifikasi

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Penurunan harga tiket pesawat			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas Perhubungan	Perlu Verifikasi
35	Perencanaan Pembangunan Daerah			Kabupaten Bangka	Bappeda	Sudah termasuk rencana Bappeda dan Statistik
36	Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Timah			Belinyu, Kabupaten Bangka	Bappeda	Sudah termasuk rencana Bappeda dan Statistik
37	Program Pro Rakyat			Koba dan Pangkalan Baru, Kabupaten Tengah	Bappeda	Sudah termasuk rencana Bappeda dan Statistik
38	Penetapan daerah wisata bebas tambang			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Bappeda	Sudah termasuk rencana Bappeda dan Statistik
39	Percepatan penyelesaian RTRW			Provinsi Kep. Bangka Belitung	Bappeda	Sudah termasuk rencana Bappeda dan Statistik
40	Peningkatan kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan (olahraga dan keagamaan)			Paya Benua, Kuto Panji-Belinyu, Bakam, Kabupaten Bangka	Biro Kesra	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
41	Pendataan jumlah masyarakat pendatang			Sungailiat, Kabupaten Bangka	Biro Pemerintahan	Dilaksanakan melalui program penataan administrasi kependudukan
42	Prona sertifikasi tanah		200 persil	desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Biro Pemerintahan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
43	Pelatihan Pertanahan			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten	Biro Pemerintahan	Perlu Verifikasi

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Belitung		
44	Pelepasan hutan untuk kawasan pemukiman			Sungailiat, Kabupaten Bangka	Dinas Kehutanan	Sudah diakomodir dalam RTRWP
45	Alih Fungsi Hutan Produksi			Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Kehutanan	Perlu Verifikasi
46	Pembebasan hutan lindung			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas Kehutanan	Perlu Verifikasi
47	Alih Fungsi Hutan Lindung			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas Kehutanan	Perlu Verifikasi
48	Alih Fungsi Hutan Lindung			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas Kehutanan	Perlu Verifikasi
49	Bantuan perahu dan alat tangkap			desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
49	Pembangunan kolam ikan masyarakat dan bantuan bibit ikan			Banyu Asin, Kabupaten Bangka	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
50	Bantuan Kapal Nelayan			Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
51	Pembuatan Dermaga Tambatan Perahu			Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
52	Pengembangan KUMKM			Sungailiat,	Dinas KUMKM	Sudah sesuai dengan program

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM)			Kabupaten Bangka		prioritas daerah
53	Pengadaan Alat Industri Rumah Tangga			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Disperindag	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
54	Pelabuhan Nusantara (internasional)			Desa Bukit Terak, Kabupaten Barat	Dinas Perhubungan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
55	Pengerukan Pelabuhan P. Seliu			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas Perhubungan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
56	Pemasangan Rambu-rambu lalin			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas Perhubungan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
57	Pembangunan pelabuhan nelayan			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas Perhubungan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
58	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Sungailiat, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
59	Pendalaman alur pelabuhan			Pelabuhan nelayan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Belum dianggarkan
60	Peningkatan status jalan kabupaten jadi jalan provinsi		350 km	Desa Bukit Terak, Kabupaten Barat	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						disesuaikan dengan kewenangan
61	Pengadaan Hand Traktor			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
62	Pembuatan Pintu Air Irigasi Batu Betumpang			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
63	Pembangunan jembatan penghubung			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Sudah sesuai, masih tahap proses pengkajian
64	Perbaikan jalan provinsi			Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
65	Irigasi sawah			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
66	Talud Pantai			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
67	Pembangunan jembatan			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
68	Perbaikan dan pengaspalan jalan propinsi termasuk siring-siringnya			Desa Kelubi Kec. Manggar	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
69	Pembangunan jalan tembus agar dilanjutkan			Dari Desa Jangkang (Kab. Beltim) ke Desa Kemiri Kec. Membalong (Kab.	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Belitung)		
70	Batu pemecah gelombang			Oliver sampai Pantai Serdang dan Pelabuhan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Dinas PU	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
71	Pencegahan dan Pemberantasan narkoba dan Miras			Kec. Sungai Selan dan Lubuk Besar, Kabupaten Tengah	Dinas Sosial	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
72	Jamkesda			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi
73	Pelayanan Kesehatan			Kecamatan Kelapa, Kabupaten Barat	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
74	peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan			Kp. Tanjung , Kabupaten Barat	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
75	peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan			simpang teritip, Kabupaten Barat	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
76	Masalah Kesehatan Masyarakat			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						pemerintahan
77	Sarana Prasarana RSUD			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinkes	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
78	Rehabilitasi Sosial (Bantuan terhadap penyandang cacat)			Sungailiat, Kabupaten Bangka	Dinkessos	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
79	Lapangan pekerjaan pasca tambang timah			Sungai Selan dan Pangkalan Baru, Kabupaten Tengah	Disnakertrans	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah
80	Pembangunan Pasar Ikan Modern			Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Disperindag	sudah sesuai, lokasi akan di verifikasi sesuai dengan kewenangan tingkatan pemerintahan
81	Bantuan sumur bor			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
82	Listrik Masyarakat			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
83	Listrik BBI Tj. Rusa			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
84	Penerangan lampu jalan			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
85	Listrik desa			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
86	Pembangunan lampu jalan			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87	Lampu jalan			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Distamben	Sesuai usulan, lokasi perlu di verifikasi
88	Bantuan mesin pengolahan ubi kayu			desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
89	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan pembagian bibit karet atau komoditas pertanian lainnya			Paya Benua, Kuto Panji, Banyu Asin – Riau Silip, Kabupaten Bangka	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
90	Pengadaan Soil Tester			Sungai Selan , Kabupaten Tengah	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
91	Pengadaan bibit sawo			desa Tugang, Kabupaten Barat	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
92	Pengadaan bibit Sapi			desa Tugang, Kabupaten Barat	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
93	Pola Kemitraan antara pemerintah, perkebunan kelapa sawit dan masyarakat.			Kecamatan Kelapa, Kabupaten Barat	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
94	Bantuan bibit karet		10.000 bibit	Kabupaten Barat	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
95	Bantuan Bibit sapi			Kec. Membalong,	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kabupaten Belitung		prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
96	Bantuan Hand Traktor			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
97	Bantuan Mesin Tapioka (2 unit)			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
98	Dukungan bibit, modal dan pesaran bagi petani karet			Desa Kelubi Kec. Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
99	Bangunan untuk mesin penggiling, sedangkan mesinnya sudah ada			Desa Batan Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
100	Revitalisasi lada, karet dan ubi sagu			Lubuk Besar, Kabupaten Tengah	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
101	Pengadaan Bibit sesuai Kondisi Alam Desa Rias			Desa Rias Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Tindaklanjut kebijakan
102	Pengadaan Bibit Unggul Palawija, Karet, Lada dan Sawit			Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
103	Pengadaan Bibit Sapi Unggulan			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Selatan		verifikasi lebih lanjut
104	Pengadaan Racun Hama Babi			Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
105	Pengadaan Bibit Palawija, Karet dan Sawit			Simbang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
106	Pembagian Bibit Yang Merata			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Distanbunnak	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, tindaklanjut kebijakan
107	Penertiban terhadap balap liar			Jembatan 12, Kota Pangkalpinang	Pol PP	Sudah sesuai rencana, perlu tindaklanjut
108	Pembangunan Jembatan Tanjung Gudang – Tanjung Ru			Tj, Gudang – Tj. Ru, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, pendanaan akan diupayakan melalui dana APBN
109	Beasiswa bagi lulusan SMU untuk melanjutkan kuliah.			Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	Dinas Pendidikan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
110	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Desa Puding – Desa Saing dan Kudai - Bakam, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
111	Perbaikan tangki air			Jade Bahrin, Merawang,	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kabupaten Bangka		verifikasi lebih lanjut
112	Pembangunan jalan poros (Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)			Mendo Barat, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
113	Perbaikan dan pembersihan saluran air			Petaling Banjar, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, namun masih diprioritaskan pada daerah lain
114	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Mendo Barat, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
115	Pembangunan jalan poros (Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)			Bakam, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
116	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Riau Silip, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
117	Perbaikan drainase			Sekitar jalan A. Yani, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
118	Perbaikan drainase			Jl. Melintang menuju	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jl. Depati Amir, Kota Pangkalpinang		prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
119	Banjir			Belakang SDN 43, Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
120	Menjadikan kelurahan sebagai SKPD			Koba, Kabupaten Tengah	Biro Organisasi	Perlu Verifikasi
121	Menolak adanya Transmigrasi Baru			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Disnakertrans	Perlu Verifikasi
122	Pemenuhan kebutuhan bahan bakar			Sungai Selan, Kabupaten Tengah	Distamben	Tindaklanjut kebijakan/rekomendasi ke PT. Pertamina (Persero)
123	Pendirian Depot/Agen minyak tanah bersubsidi			Sungai Selan, Kabupaten Tengah	Distamben	Tindaklanjut kebijakan/rekomendasi ke PT. Pertamina (Persero)
124	Pemasangan aliran listrik			desa Tugang, Kabupaten Barat	Distamben	Tindaklanjut kebijakan/rekomendasi ke PT. PLN (Persero)
125	Koordinasi Pemprov dengan Pemda Bangka Selatan maupun Pertamina terkait			Simbang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Distamben	Tindaklanjut kebijakan/rekomendasi ke PT. Pertamina (Persero)

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan tidak adanya SPBU di Simpang Rimba, Payung dan Pulau Besar					
126	Masalah PLN yang sering mati			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Distamben	Tindaklanjut kebijakan/rekomendasi ke PT. PLN (Persero)
127	Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan SMU.			Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang	Disnaker	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut
128	Perlindungan harga komoditi pertanian			Paya Benua, Zed, Kuto Panji, Kabupaten Bangka	Disperindag	Perlu Verifikasi
129	pengawasan peredaran minuman keras			simpang teritip, Kabupaten Barat	Disperindag	Perlu Verifikasi
130	Pembangunan 2 unit rumah layak huni			Kelurahan Sinar bulan, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
131	Pembangunan rumah layak huni			desa Tugang, Kabupaten Barat	Dinas PU	
132	Pembangunan Rumah Layak Huni			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
133	Pembangunan Rumah Layak Huni			Lepar Pongok, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Sudah sesuai, akan dialokasikan melalui Program

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Selatan		Satam Emas
134	Pembebasan lahan			Sinar Jaya, Kabupaten Bangka	Biro Pemerintahan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
136	Penentuan tapal batas antar desa			desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Biro Pemerintahan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
137	Pembangunan Balai Pertemuan			Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Biro Pemerintahan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
138	Batas-batas desa			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Biro Pemerintahan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
139	Bantuan Kendaraan dinas			Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung	Biro Umum	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
140	Pembuatan Balai Desa			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	BPMPD	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
141	Peningkatan status Dusun Kelubi menjadi Desa			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	BPMPD	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
142	Rehab Rumah Dinas Guru			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas Pendidikan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
143	Pembangunan Dermaga			Desa Tanjung Niur,	Dinas	Belum dianggarkan karena

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kabupaten Barat	Perhubungan	menjadi kewenangan kabupaten
144	Pembangunan Dermaga		500 meter	dusun 2 desa belo laut, Kabupaten Barat	Dinas Perhubungan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
145	Pembangunan jalan Desa			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
146	Perbaikan jalan dan lampu penerangan			Perumahan Korpri Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
147	Lahan pekuburan baru			Kelurahan Semabung, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
148	Perbaikan jalan dan lampu jalan			di daerah jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
149	Perbaikan jalan menuju Tua Tunu			Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkalpinang	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						disesuaikan dengan kewenangan
150	Pengawalan pembangunan PDAM			Kec. Sungai Selan, Kabupaten Tengah	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
151	Pemasangan tiang pancang/beton			desa Air Menduyung ke Tada, Kabupaten Barat	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
152	Pembangunan jalan			Desa Belanak ke Tanjung Niur, Kabupaten Barat	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
153	Pembangunan Pagar Makam			desa Air Menduyung , Kabupaten Barat	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan
154	Pembangunan WC,Pagar sekolah, musholah dan sumur bor untuk madrasah aliyah negeri			Desa Bukit Terak, Kabupaten Barat	Dinas PU	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut disesuaikan dengan kewenangan

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
155	Pengaspalan jalan			Desa Bukit Terak, Kabupaten Barat	Dinas PU	di gang-gang
156	Pembuatan siring jalan			desa Tugang, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
157	peningkatan akses jalan		2.800 meter	Kp. Tanjung ke pantai batu rakit, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
158	Peningkatan jalan			Kp. Tanjung , Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
159	Pembangunan Pagar Makam			Kp. Tanjung , Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
160	perbaikan jalan dan siring			Kec. Jebus ke Kec. Parittiga, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
161	Pembangunan balai dusun I Rintis			Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
162	pembangunan jalan tembus		17 km	desa air limau ke kampung air mas, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
163	pengaspalan jalan dusun jungku ke selindung			Desa air putih, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
164	jalan lingkar		gg. TPA dan Jalan sekolah	Desa air putih, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
165	peningkatan jalan lingkar		3000 meter	dusun tanjung ular, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
166	peningkatan jalan			dusun jungku, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
167	Rehabilitas			Dusun Airputih, Kabupaten Barat	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
168	Pembangunan Drainase sepanjang Jalan di daerah Transmigrasi Rias			Desa Rias Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
169	Pemeliharaan Jalan Pasir Putih-Simpang Tiga Sadai			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
170	Pembangunan Jalan Desa			Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
171	Rehab Jalan Penutuk-Tj. Labu-Tj. Sangkar			Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
172	Koordinasi SKPD dalam Pembangunan Infrastruktur			Simbang Rimba, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Selatan		kabupaten
173	Pembangunan Infrastruktur Jalan			Simbang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
174	Pembuatan Pagar Kubur di Desa Ranggung			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
175	Kendala bahan Bakar dalam Operasional Sumur di Ds Ranggung			Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Distamben	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
176	Pemeliharaan Jalan Air Gegas-Payung			Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
177	Pembangunan Jalan Ketinbai_Ds.Tungkal			Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
178	Perbaikan Jalan Pulau Besar dan Air Bara Pulau Besar			Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
179	Pembangunan jalan setapak			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
180	Pelebaran Drainase			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
181	Pengaspalan jalan			Kec. Tanjung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pandan, Kabupaten Belitung		menjadi kewenangan kabupaten
182	Pembangunan Talud saluran air			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
183	Perbaikan jalan			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
184	Pengaspalan jalan			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
185	Pembangunan Kantor Desa			Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
186	Pembangunan Jalan			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
187	Pembangunan Drainase			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
188	Pembangunan trotoar jalan			Kec. Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
189	Infrastruktur jaringan air bersih			Desa Kelubi Kec. Manggar, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Timur		
190	Pengaspalan jalan akses menuju sekolah			Desa Kelubi dan desa-desa lain di Kec. Manggar, kabupaten Belitung Timur	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
191	Pembangunan jalan dan jembatan			Dari Kampung Ujung (Desa Baru) sampai Kampung Arab, Kabupaten Belitung Timur	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
192	Perbaikan jalan tembus, pelebaran, sisi kiri kanan ditimbun tanah puru			Dari Air Raya ke Membalong, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
193	Peningkatan perbaikan jalan lingkar			Jalan Pemuda 1,5 km di Dusun Air Malik dan 1,5 km di Dusun Batan, Kabupaten Belitung	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
194	Perbaikan dan pengelolaan air bersih			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinkes	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
195	Perbaikan lapangan bola			Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	Dispora	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
196	pembangunan pagar		14 x 4 meter	Kabupaten Barat	dispora	Belum dianggarkan karena

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	lapangan bola					menjadi kewenangan kabupaten
197	Perbaikan lapangan bola			Dusun Bukit Indah Desa Kacang Butor, Kabupaten Belitung	Dispora	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
198	Lapangan yang diplester untuk olah raga sepak bola, volly ball, badminton			Pemuda "Ikim" Desa Kacang Butor, Kabupaten Belitung	Dispora	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
199	Pagar Kuburan			Sinar Jaya, Kabupaten Bangka	Dinas PU	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
200	Normalisasi sungai sijuk			Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	Dinas Perhubungan	Belum dianggarkan karena menjadi kewenangan kabupaten
201	Peningkatan kesejahteraan perangkat desa/kelurahan dan tenaga pengajar di desa			Sungailiat, Kabupaten Bangka	BPMPD, Dinas Pendidikan	Bantuan diberikan kepada tenaga kependidikan
202	Penambahan ruang kelas		ruang kelas, 1 ruang	dusun jungku desa air putih, Kabupaten Barat	Dinas Pendidikan	Sudah sesuai dengan program prioritas daerah, lokasi akan di verifikasi lebih lanjut

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memperhatikan permasalahan seperti yang disajikan pada Tabel II.63, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya disajikan sebagai berikut.

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

APK SD/MI masih dibawah nasional, masih tingginya angka putus sekolah, masih tingginya disparitas mutu pendidikan dan masih rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pendidikan di semua kawasan, untuk semua umur dan semua golongan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan peran orangtua dan masyarakat dalam dunia pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan di desa dan kota, meningkatkan akses pendidikan ke perguruan tinggi.

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan diantaranya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk, rendahnya persentase penduduk ber-KB, angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi, dan rendahnya rasio dokter dengan pasien. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui program Dua Anak Lebih Baik dan akurasi pendataan jumlah penduduk dan pendatang, peningkatan persentase pencapaian target peserta ber-KB, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup menjadi 70 tahun sesuai dengan angka harapan hidup nasional, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, dan penambahan jumlah dokter khususnya dokter spesialis di rumah sakit dan Puskesmas.

3. Pekerjaan Umum dan Perumahan

Permasalahan pekerjaan umum diantaranya penanganan dan peningkatan persentase ruas jalan nasional belum maksimal, masih adanya rumah belum layak huni dan belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan irigasi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan/peningkatan jalan nasional secara rutin (1 tahun sekali) atau dalam kondisi tertentu dan pemeliharaan secara berkala (5 tahun sekali) terutama pada ruas jalan dalam kondisi rusak, meningkatkan jumlah pembangunan rumah sederhana dan meningkatkan rasio jaringan irigasi yang selama ini terpusat di Bangka Selatan.

4. Penataan Ruang

Permasalahan dalam penataan ruang lebih disebabkan karena belum ditetapkannya Perda RTRW baik RTRW Provinsi maupun sebagian RTRW kabupaten. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan ruang baik untuk kegiatan ekonomi maupun untuk pengembangan infrastruktur. Strategi

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui percepatan penyelesaian RTRW baik provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan perencanaan pembangunan yang masih terjadi yaitu tingkat keselarasan dan keserasian antar dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota masih rendah. Serta belum optimalnya keterpaduan rencana pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi proses perencanaan, sehingga tingkat keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan semakin meningkat.

6. Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan diantaranya yaitu rendahnya jumlah penumpang darat yang terlayani oleh angkutan umum, belum tersedianya transportasi laut antarpulau-pulau kecil, serta belum tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang berstandar internasional. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui pendataan terhadap jumlah penumpang angkutan darat, penyediaan dan peningkatan transportasi antar pulau yang memenuhi standar keselamatan laut serta melalui percepatan pembangunan pelabuhan kelas dunia.

7. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diantaranya rendahnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya frekuensi terjadinya bencana serta rendahnya persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun bencana sosial, pembangunan ekonomi ibukota provinsi yang didasarkan pada green ekonomi serta pembangunan ruang terbuka hijau sebagai asset ekonomi di kota Pangkalpinang.

8. Pertanahan

Permasalahan pertanahan diantaranya masih ada lahan pemerintah yang terbengkalai, sering terjadi sengketa kepemilikan lahan, sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan serta tingginya biaya sertifikasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengelolaan dan pengamanan lahan milik pemerintah, mediasi penyelesaian sengketa lahan, kerjasama pengadaan lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), subsidi pembuatan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang kurang mampu.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan kependudukan yaitu tingginya laju migrasi penduduk dari luar daerah, masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akte kelahiran termasuk yang belum memiliki e-KTP. Upaya yang dapat dilakukan yaitu

melalui pendataan penduduk dari luar daerah, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran termasuk e-KTP.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya yaitu rendahnya indeks pembangunan gender, perdagangan manusia (trafficking), mempekerjakan anak dibawah umur. Upaya yang dapat dilakukan yaitu penerapan perencanaan yang responsif gender, peningkatan pengawasan di tempat-tempat hiburan, meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di semua wilayah (wajib belajar 12 tahun).

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diantaranya adalah rendahnya persentase penduduk ber-KB dan tingginya angka kelahiran. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui program Dua Anak Lebih Baik, peningkatan persentase pencapaian target peserta ber-KB, dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi.

12. Sosial

Permasalahan sosial yang dihadapi yaitu masih tingginya persentase penduduk miskin di pedesaan, masih rendahnya angka harapan hidup, masih rendahnya masa rata-rata sekolah, masih terjadinya kasus gizi buruk, masih tingginya indeks gini, meningkatnya masyarakat pra sejahtera dan tingginya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan lapangan pekerjaan di pedesaan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, meningkatkan akses pendidikan di kawasan pedesaan, internalisasi gerakan “Dardik” (sadar pendidikan) serta peningkatan penyebaran distribusi pendapatan yang seimbang, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian/pendampingan PMKS.

13. Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan yaitu masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya tingkat ketergantungan lapangan kerja pada sektor pertambangan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu meningkatkan peluang investasi, meningkatkan fokus pada investasi yang padat karya serta mempersiapkan sektor selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung.

14. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu rendahnya persentase KUMKM produktif, minimnya koperasi di pedesaan, belum optimalnya pemanfaatan alokasi program CSR untuk UMKM, minimnya persentase penyerapan kredit UMKM, serta masih terbatasnya UMKM yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui pembentukan dan bantuan KUMKM, pembentukan dan peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi di

perdesaan, pengembangan dan pembentukan koperasi komoditi, peningkatan kepedulian perusahaan untuk membantu UMKM terutama para petani dan nelayan, peningkatan target kuantitas dan kualitas kredit bagi UMKM, peningkatan target dan pencapaian kredit produktif non konsumtif, serta menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan.

15. Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal diantaranya yaitu minimnya persentase penyerapan kredit UMKM, dan rendahnya alokasi kredit perbankan. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui peningkatan target kuantitas dan kualitas kredit bagi UMKM, peningkatan target dan pencapaian kredit produktif non konsumtif.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu masih terbatasnya jumlah kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan.

17. Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan pemuda dan olah raga yaitu masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional dan internasional, belum produktifnya organisasi kepemudaan, serta minimnya penyelenggaraan turnamen tingkat daerah sehingga upaya penelusuran atlet berbakat belum maksimal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pembangunan dan peningkatan sarana sarana olah raga, peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan serta peningkatan even dan atau turnamen olah raga.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu terjadinya peningkatan angka kriminalitas dan demonstrasi serta rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan hukum dan sosial serta meningkatkan koordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk dengan seluruh komponen masyarakat lainnya. Kemudian dapat juga dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ini yaitu belum tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP), belum transparannya penyusunan perda di Kabupaten/Kota. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan, menindaklanjuti temuan BPK serta mendorong implementasi Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dalam mendukung *Good Governance and Clean Government*.

20. Ketahanan Pangan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya terbatasnya jumlah penyuluh, tingginya konsumsi beras, tingginya tingkat ketergantungan pangan dan masih tingginya peredaran bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, peningkatan dan pengembangan profesionalitas penyuluh, penganekaragaman pangan, memperlancar distribusi bahan pangan, pemantauan peredaran bahan makanan.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan yang dihadapi diantaranya, lemahnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, belum adanya rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah desa serta minimnya sarana prasarana pendukung di pedesaan. Strategi yang dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola pemerintah desa, pendampingan penyusunan RPJMDes, peningkatan kompetensi aparatur desa serta penyediaan sarana prasarana yang memadai di pedesaan.

22. Statistik

Permasalahan statistik yaitu, belum terpadunya pengelolaan data dan informasi daerah, belum tersedianya pusat data dan informasi, masih ada perbedaan data yang disajikan oleh penyedia data serta kurang tersedianya database di masing-masing SKPD secara time series. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembentukan pusat data dan informasi daerah secara terpadu.

23. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan komunikasi dan informatika yaitu belum terpadunya sistem informasi telekomunikasi serta terbatasnya akses internet di lokasi fasilitas umum dan objek-objek pariwisata.

B. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar petani, produksi produk pertanian masih rendah, serta rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, stabilisasi harga hasil pertanian, percepatan peningkatan produksi dan

produktifitas padi, serta penetapan arah pengembangan pertanian berkelanjutan.

2. Kehutanan

Permasalahan kehutanan diantaranya yaitu rendahnya persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perlindungan dan perluasan tutupan hutan, perbaikan izin pertambangan timah yang memperhatikan ekosistem hutan, percepatan pemulihan lahan kritis dan lahan eks tambang.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya elektrifikasi, rendahnya kapasitas tenaga listrik, kelangkaan bahan bakar terutama solar serta ketergantungan pada sektor pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan kapasitas pembangkit, menyiapkan infrastruktur kelistrikan, peningkatan perawatan pembangkit listrik, penyelesaian pembangkit listrik yang sedang dibangun, mempersiapkan pembangkit-pembangkit listrik yang baru, memperlancar proses distribusi BBM dan mempersiapkan sektor lain selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung.

4. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum terpadunya pengelolaan dan promosi pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah sebagai komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata serta tingginya biaya transportasi dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kalender wisata dan travel pattern secara terpadu, pemberdayaan budaya lokal, peningkatan dan penyediaan transportasi umum menuju objek wisata, peningkatan dan sosialisasi sadar wisata, serta melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan.

5. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar nelayan, serta rendahnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PDRB. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk kelautan perikanan, percepatan peningkatan produksi dan produktifitas budidaya perikanan, stabilisasi harga hasil perikanan di pasar serta penetapan arah pengembangan perikanan berkelanjutan.

6. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan yaitu tingginya tingkat ketergantungan kebutuhan bahan pokok terhadap daerah lain dan ekonomi biaya tinggi. Upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra produksi, memperlancar proses distribusi barang yang masuk ke Bangka Belitung.

7. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kawasan industri dan industri hilir, minimnya produk hasil industri yang memenuhi standar. Upaya yang dapat dilakukan mempercepat pengembangan kawasan industri, pengembangan OVOP, pengembangan industri hilir, memperkuat kerja sama desa dan kota (*rural urban linkages*) serta meningkatkan kualitas hasil industri.

8. Ketransmigrasian

Permasalahan ketransmigrasian yang dihadapi meliputi belum terpadunya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang termasuk wilayah transmigrasi lainnya. Upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan antar tingkat pemerintahan guna percepatan pengembangan KTM.

2.4.1. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berikut beberapa permasalahan yang memiliki nilai prioritas bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya RPJMD 2012-2017, RKPD tahun 2014, 4 track strategy, MDG's, SPM, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan.

2.4.1.1. Four Track Strategy

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dalam RPJMN 2010-2014 harus menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai angka 4,2%. Berdasarkan data diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2012 mencapai 5,37% menunjukkan adanya kenaikan dibanding tahun sebelumnya (5,16%). Menurut distribusinya, jumlah penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Bangka, diikuti Kabupaten Belitung. Dari sisi persentasenya terhadap jumlah penduduk setempat, tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung.

Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengurangi angka kemiskinan tersebut. Prioritas pengentasan kemiskinan, khususnya pada *the poorest of the poor* untuk mendorong kelompok miskin keluar dari garis kemiskinan. Selain itu juga untuk mempertahankan kelompok masyarakat yang hampir miskin agar tidak 'jatuh' menjadi kelompok miskin, antara lain melalui pencegahan inflasi tinggi dan pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan strategis karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. Strategi perencanaan pro masyarakat miskin (pro poor), pro lapangan kerja (pro job), pro pertumbuhan (pro growth), serta pro lingkungan (pro environment) diintensifkan selain penerapan prinsip penanggulangan kemiskinan yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu:

- a. Pembangunan yang inklusif.
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
- c. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan

- d. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini juga telah melaksanakan program-program yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program klaster 1, 2, 3, dan 4. Program tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan memberdayakan masyarakat miskin agar dapat lebih mandiri dan dapat keluar dari garis kemiskinan. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibangun mekanisme yang intensif antar SKPD terkait dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu diperlukan komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana termuat dalam Misi Ke 2 RPJMD 2012-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM (Society Empowerment)” melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia MP3KI. Lokasi quickwins yang telah ditetapkan sebagai lokus prioritas pembangunan baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD yaitu Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar di Kabupaten Bangka, dan Kecamatan Membalong dan Kecamatan Sijuk di Kabupaten Belitung. Program-program yang dijabarkan didalam Renstra SKPD tentang penanggulangan kemiskinan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang sasarannya adalah orang miskin, rumah tangga miskin, desa tertinggal, desa terpencil dan daerah kumuh. Dengan demikian diharapkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.4.1.2. Millenium Development Goals (MDGs)

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 52 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan. Selanjutnya melalui hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi percepatan pencapaian target MDG's. Pencapaian tujuan MDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.64

**Evaluasi Pelaksanaan MDGs sampai dengan Tahun 2013
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

 1 Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
1. Status Capaian Tujuan ke-1 MDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1,1	Penduduk dibawah garis kemiskinan nasional (%)	11,62 (2002)	5,53 (2012)	5,00		BPS
1,2	Indeks kedalaman kemiskinan/P1 (%)	1,68 (2007)	0,664 (2012)	Menurun (0,85)		BPS
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.3	Rasio pekerja terhadap penduduk > 15 tahun (%)	0,935 (2007)	0,938 (2011)	Meningkat		BPS
1.4	Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) (%)	6,49 (2007)	3,49 (2012)	menurun		BPS
1.5	Total Usia Angkatan Bekerja / total penduduk yang bekerja	1,069 (2007)	1,036 (2012)	Menurun		BPS
1.6	Laju pertumbuhan PDRB per pertumbuhan tenaga kerja	3,302	-5,14	Meningkat		BPS (data diolah)
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.7	Persentase balita kekurangan gizi	18,3 (2007)	1,77 (2012)	15,05		Dinkes Provinsi
	Persentase balita gizi buruk	4,6 (2007)	0,14 (2012)	3,6		Dinkes Provinsi
	Persentase balita gizi kurang	13,7 (2007)	2,22 (2012)	11,9		Dinkes Provinsi
1.8	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum					
	Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) <1400	8,34	9,37	8,5		BPS, Susenas
		2008	2010			
	Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) <2000 → data kementan	56,48	57,52	35,32		BPS, Susenas
		2008	2010			
Keterangan :  Sudah tercapai;  Akan tercapai; dan  Perlu perhatian khusus						

**2**ACHIEVE UNIVERSAL
PRIMARY EDUCATION**Tujuan 2.
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua****2. Status Capaian Tujuan ke-2 MDGs Kepulauan Bangka Belitung****Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar**

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk semua					
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar					
2,1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A	95,71% (2009/2010)	95,27% (2010/2011)	100%		Dinas Pendidikan
2,2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI	107,26% (2009/2010)	112,13% (2010/2011)	100%		Dinas Pendidikan
2,3 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki laki	95,40 (2007)	95,83% (2011)	100%		Dinas Pendidikan

Keterangan : Sudah tercapai; Akan tercapai; dan Perlu perhatian khusus

**3**PROMOTE GENDER
EQUALITY AND
EMPOWER WOMEN**Tujuan 3.
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan****3. Status Capaian Tujuan ke-3 MDGs Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.					
3,1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi					
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, MI & Paket A	98,87 (2009/2010)	99,04 (2010/2011)	100		BPS, Susenas dan Diknas Babel

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian MDGs 2015	Status	Sumber
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, MTs & Paket B	107,91	111,74	100		BPS, Susenas dan Diknas Babel
	(2009/2010)	(2009/2010)			
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	109,20	114,83	100		BPS, Susenas dan Diknas Babel
	(2009/2010)	(2009/2010)			
Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	106,07		100		BPS, Susenas dan Diknas Babel
	(2009/2010)	(2009/2010)			
3,2 Rasio melek huruf perempuan/laki-laki usia 15-24 tahun	99,10	99,68	100%		BPS, Susenas
	(2007)	(2009)			
3,3 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (non-pertanian) (%)	57,69 (2007)	66,41 (2009)	Meningkat		BPS Babel
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,14% (Pileg 2000- 2004)	11,11% (Pileg 2009-2014)	Meningkat		BPPKBP A (Profil Gender)

Keterangan :  Sudah tercapai;  Akan tercapai; dan  Perlu perhatian khusus



Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

4. Status Capaian Tujuan 4 MDGs Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	Acuan		Capaian	Status	Sumber
	Dasar	Saat Ini	MDGs		
	2015				
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015					

Indikator	Acuan		Capaian	Status	Sumber
	Dasar	Saat Ini	MDGs		
			2015		
4,1 Angka kematian balita/AKABA (5q0)	0,964 (2007)	10,45 (2012)	9 (31)		Dinkes Provinsi
4,2 Angka kematian bayi/AKB (1q0)	6,91 (2007)	9,67 (2012)	8 (35)		Dinkes Provinsi
Angka kematian neonatal (NN)	20 (2007)	8,29 (2012)	16		Dinkes Provinsi
4,3 Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak total	67 (2007)	96,73 (2012)	95		Dinkes Provinsi

Keterangan :  Sudah tercapai;  Akan tercapai; dan  Perlu perhatian khusus



Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

5. Status Capaian Tujuan ke-5 MDGs Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian	Status	Sumber
			MDGs		
			2015		
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu					
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015					
5,1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	160,73/41 (2010)	137,56 (2012)	29		Dinkes Provinsi
5,2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	90,75 (2007)	94,42 (2012)	98		Dinkes Provinsi
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015					
5,3 Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) bagi pasangan usia subur (PUS) usia 15 – 49 tahun semua cara.	64,7 (2007)	68,01 (2012)	70		Dinkes Provinsi
5,4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun	tidak ada data survey dari BKKBN	7,53 (2012)	-	-	
5,5 Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)					

Indikator	Acuan Dasar	Saat Ini	Capaian MDGs 2015	Status	Sumber
cakupan pelayanan antenatal satu kali (K1)	98,3	94,6	95		
cakupan pelayanan antenatal empat kali (K4)	86,2 (2007)	93,02 (2012)	90		
5,6 Unmet need (kebutuhan Keluarga Berencana/KB) yang tidak terpenuhi	3,2 (2007)	7,41 (2012)	5		

Keterangan : Sudah tercapai; Akan tercapai; dan Perlu perhatian khusus



6. Status Capaian Tujuan ke-6 MDGs Kepulauan Bangka Belitung

Indikator	Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya					
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015					
6.1 Prevalensi HIV/AIDS	0.01 (2009)	0.01 (2012)	Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS > 0,5		Dinkes Provinsi
6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi	-	10,86% (2012)	Meningkat (70%)		Dinkes Provinsi
6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	-	2,97% (2012)	Meningkat (100%)		Dinkes Provinsi
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015					
6.4 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral	-	100% (2012)	Meningkat (95%)		Dinkes Provinsi
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015					
6.5 Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)	111/100.000 (2009)	110.37 (2012)	163/100.000 Menurun		Dinkes Provinsi

	Indikator	Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
6.6	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	160/100.000 (2009)	114.63/100.000 (2012)	222/100.000 Menurun		Dinkes
6.7	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.8/100.000 (2009)	6,128.40/100.000 (2012)	Menurun (27)		Dinkes Provinsi
6.8	Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS	51 (2009)	53.39 (2012)	90		Dinkes Provinsi
6.9	Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate)	85 (2009)	87.74 (2012)	88		Dinkes Provinsi
6.10	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	9,47 (2008)	2.36 (2012)	Menurun		Dinkes Provinsi
Penyakit Menular Lainnya: DBD **)						
6.11	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	55/100.000	85.53/100.000	Menurun (35)		Dinkes
6.12	Angka Kematian DBD	-	2.41 (2012)	Menurun (1)		Dinkes
Keterangan :  Sudah tercapai  Akan tercapai  Perlu perhatian khusus						



Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

7. Status Capaian Tujuan ke-7 MDGs Kepulauan Bangka Belitung

	Indikator	Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	30,05% (2008)	34,12% (2010)	meningkat		Dinas Kehutanan
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)	-	-	-	-	-
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak	-	16,8 ton (2010)	0 CFCs dengan mengurangi		Badan LH Daerah

Indikator	Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
ozon (BPO)			HCFCs		
7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		101,48% (2010)	100,00%		Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010					
7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	20.02 % (2008)	23,83% (2010) (kawasan hutan terdiri dari hutan Negara)	meningkat		Dinas Kehutanan
7.6 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial		65.000 ha (2010)	meningkat		Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.					
7.7 Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak					
Akses terhadap sumber air minum layak (perkotaan)	39,39% (2005)	62.53% (2012)	Meningkat (78%)		Dinkes Provinsi
Akses terhadap sumber air minum layak (perdesaan)	29,36% (2005)	51.14% (2012)	Meningkat (67%)		Dinkes Provinsi
7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak					
Akses terhadap sanitasi layak (perkotaan)	55,41% (2006)	72.56% (2012)	Meningkat (95%)		Dinkes Provinsi
Akses terhadap sanitasi layak (perdesaan)	28,20% (2006)	49.41% (2012)	Meningkat (70%)		Dinkes Provinsi
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020					
7.9 Pengurangan luas kawasan kumuh perkotaan (ha)		555,56 ha	Menurun		Dinas PU
Keterangan :  Sudah tercapai  Akan tercapai  Perlu perhatian khusus					

2.4.1.3. Standar Pelayanan Minimal

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pd batas waktu pencapaian SPM secr Nasional yg ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pd analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yg ditetapkan oleh Daerah, digunakan utk mengukur

kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yg berbasis pd pelayanan dasar, daerah dpt menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dr batas waktu yg ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.

Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel II.65 di bawah ini.

Tabel II.65
Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	SPM	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perumahan*)	2	3	2025
2	Pemdagri	3	6	2011
3	Sosial*)	4	14	2015
4	Kesehatan	4	18	2015
5	PP & PA*)	5	8	2014
6	Lingkungan Hidup*)	7	7	2013
7	KB & KS	3	9	2014
8	Ketenaga Kerjaan*)	5	8	2016
9	Pendidikan	2	27	2014
10	PU & PR	8	23	2014
11	Ketahanan Pangan*)	4	7	2015
112	Kesenian*)	2	7	2014
13	Kominfo	1	2	2014
14	Perhubungan*)	8	43	2014
15	Penanaman Modal*)	7	10	2014
Jumlah		65	192	

2.4.1.4. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kegiatan yang relevan yang mendukung pencapaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Penggunaan pupuk organik semaksimal mungkin;
2. Pengarahan kepada petani untuk membuka lahan pertanian tanpa di bakar;
3. Pelatihan PTT dan PHT;
4. Rehabilitasi hutan/reboisasi hutan (gerhan);
5. Gerakan penanaman sejuta pohon.

Pada tahun 2013 akan dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Reporting (MER), namun sampai saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu mekanisme MER yang akan digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan diperkirakan akan mulai dilaksanakan pada bulan April, dimana pada saat ini sedang dalam tahap persiapan.

2.4.1.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut.

Adapun tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati bersama;
2. Terwujudnya model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektivitas dan keadilan;
3. Terwujudnya sosok aparatur negara yang profesional, bersih dari praktek KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparatur negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi;
4. Tersedianya ruang bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;
5. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima.

Berbagai persoalan yang dihadapi birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya. Tumpang tindih terjadi baik antar dinas ataupun antara dinas dengan lembaga teknik daerah lainnya.
- b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang profesional. Pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.
- c. Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.
- d. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai “C”.
- e. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Hasil penilaian (*assessment*) terhadap kondisi organisasi saat ini memunculkan 2 hal yang ingin dicapai yaitu pertama, dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan birokrasi yang memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi. Kedua, mengidentifikasi berbagai pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Untuk bisa melakukan diagnosis yang akurat terhadap problematika actual dan juga berbagai capaian yang sudah diraih maka sangat penting untuk melibatkan *stakeholders* yang berasal perwakilan SKPD terkait dalam *assessment* yang difokuskan pada area-area perubahan reformasi birokrasi. Berikut adalah hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan bulan Juli-Desember 2012, melibatkan pimpinan dan staf dari SKPD provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama, tokoh kepemudaan, masyarakat pengusaha dan cendekiawan dari universitas-universitas di Bangka Belitung. Dalam FGD tersebut dibahas berbagai isu yang menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi oleh birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, rekomendasi dan saran-saran yang bisa diajukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, serta postur ideal yang terbentuk lima tahun ke depan. Untuk mempertajam lingkup birokrasi yang dibahas, maka pembahasan bertolak dari 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan dalam program reformasi birokrasi nasional, yakni:

1. Area Kelembagaan
2. Area Ketatalaksanaan
3. Area Perundang-undangan (kebijakan/regulasi)
4. Area Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Area Pengawasan
6. Area Akuntabilitas
7. Area Pelayanan Publik
8. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja (*Mindset dan Cultureset*).

2.4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah merupakan suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis”.

Penentuan indeks tata kelola pemerintah mencakup pengukuran pada arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Pada pemerintahan meliputi fungsi-fungsi kerangka kebijakan, penganggaran, koordinasi pembangunan, dan pengawasan pembangunan. Pada arena birokrasi meliputi pengumpul pendapatan daerah, pelayanan publik, pengatur kegiatan ekonomi. Pada arena masyarakat sipil meliputi fungsi advokasi dan pemberdayaan. Pada arena masyarakat ekonomi meliputi fungsi upaya perlindungan kepentingan bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha. Pada masing-masing arena dan fungsi tersebut ada indikator partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas.

Hasil penelitian menunjukkan tata kelola pemerintahan tahun 2012 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi ke 11 diantara 33 provinsi. Indeks yang diperoleh sebesar 5,95, diatas rata-rata nasional yaitu 5,67. Secara umum prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah masuk kategori “CUKUP” diatas rata-rata nasional, dengan catatan sebagai berikut:

1. Diperlukan sarana partisipasi publik untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2. Akses informasi yang lebih terbuka untuk dokumen-dokumen publik (APBD, Perda/Pergub, RKA/DPA, Dana Aspirasi dan lain-lain), karena ini dijamin dalam UU Kebebasan Informasi.
3. Ekologi dan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pasca tambang perlu dipikirkan secara lebih serius dan *actionable*.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Tabel II.66.

Tabel II.66
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib (Kesbangpol)	Jika tingkat kriminalitas menurun	
	Keselarasn dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib (Pemerintahan)	Jika sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan meningkat	Lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi
	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib (Perencanaan)	Jika keterkaitan perencanaan dan penganggaran meningkat	Lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib (Pemerintahan)	Jika keselarasn perencanaan dan penganggaran secara politik dan teknokratik meningkat	Kurangnya sinerginya antar unsur pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib (Pemerintahan)	Jika implementasi Perda yang diterbitkan meningkat	- Kurangnya penerapan perda yang di terbitkan - Belum tersediannya petunjuk teknis dan pentunjuk pelaksanaan perda di maksud
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib (Pemerintahan)	Jika implementasi Pergub dan keputusan gubernur yang diterbitkan meningkat	- Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang di terbitkan - Belum tersediannya petunjuk teknis dan pentunjuk pelaksanaan Pergub dan Keputusan Gubernur dimaksud

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib (Hukum)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Rendahnya tingkat pelayanan publik
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib (Perencanaan)	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana strategis pemerintahan
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatnya kualitas penilaian penyelenggaraan keuangan daerah	Belum tersusunnya data aset daerah
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber pembiayaan yang sah
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib (Perencanaan dan Pengawasan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD	- Rendahnya kapasitas perencana di masing-masing SKPD - Rendahnya realisasi APBD - Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD
	Pengelolaan potensi daerah	Pilihan	Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB	Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Meningkatnya inovasi daerah	- Belum adanya kelembagaan litbang - Belum tersedianya SDM fungsional perencana dan fungsional peneliti
b. Tataran Pelaksana Kebijakan				
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan	Wajib	Tersedianya dokumen pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah	Belum tersedianya SOP

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemerintahan			
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
	Tingkat capaian SPM	Wajib	Target SPM SKPD terkait tercapai	Belum ada kesesuaian antara program di SKPD untuk mencapai target SPM tersebut
	Penataan kelembagaan daerah	Wajib	Kesesuaian visi dan misi RPJMD dengan struktur organisasi kelembagaan daerah	Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap visi dan misi RPJMD dalam penataan kelembagaan daerah
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib (Kepegawaian)	- Tersedianya grand design kepegawaian daerah sesuai visi dan misi RPJMD	- Belum optimalnya perencanaan kepegawaian (beban kerja, kompetensi)
	Perencanaan pembangunan daerah	Wajib (Perencanaan Pembangunan)	Tercapainya indikator pembangunan daerah	- Perencanaan masih bersifat sektoral - Belum berlandaskan data dan informasi yang akurat - Belum optimalnya sinergi perencanaan dan penganggaran
	Pengelolaan keuangan daerah	Wajib (Keuangan Daerah)	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru
	Pengelolaan barang milik daerah	Wajib (DPPKAD)	Tertibnya administrasi pengelolaan barang daerah	Banyaknya asset daerah yang tidak terdata
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Wajib	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan
II	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
	Kesejahteraan masyarakat	Wajib (Kesra)	- Menurunnya tingkat kemiskinan - Menurunnya tingkat pengangguran - Meningkatnya pembangunan manusia	Belum optimalnya sinergisitas program antar sektor, antar wilayah, dan antar hierarki pemerintahan
	Pelayanan umum	Wajib	Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan umum	Masih minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan umum
	Daya saing daerah	Wajib (Aspek	Meningkatnya investasi	- Belum optimalnya pelayanan

No	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ekonomi, Hankam)		terpadu - Belum tersedianya infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih)
III	Daerah Otonomi Baru			
	• Perkembangan perangkat daerah	penyusunan Wajib (Organisasi)	Tersusunnya SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD	Belum adanya dokumen perencanaan kebutuhan SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD
	• Pengisian personil	Wajib (Kepegawaian)	Terpenuhinya personil sesuai kebutuhan	Belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan pegawai
	• Pengisian keanggotaan DPRD	Wajib	Terpenuhinya keanggotaan DPRD berbasis gender (keterwakilan perempuan)	Masih rendahnya kompetensi calon legislatif perempuan
	• Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan	Wajib	Terlaksananya semua urusan pemerintah daerah (wajib dan pilihan)	- Masih terjadinya tumpang tindih tupoksi - Belum efektifnya SOTK
	• Pembiayaan	Wajib	Terlaksananya kebijakan program strategis sesuai dengan isu-isu daerah dan nasional	Dana yang tersedia belum sepenuhnya dapat membiayai penyelesaian isu-isu strategis
	• Pengalihan aset dan dokumen	Wajib	Meningkatnya akuntabilitas status aset daerah	Belum tertibnya penatausahaan aset dan dokumen
	• Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Wajib	Terwujudnya kesepakatan batas antar wilayah	Masih adanya kepentingan pengelolaan kewilayahan oleh masing-masing kepala daerah (kabupaten/kota)
	• Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Wajib	Tersedianya sarana prasarana pemerintah untuk mendukung operasional pelayanan publik	- Masih ada SKPD yang belum memiliki kantor yang representatif - Belum terpadunya sistem teknologi informasi
	• Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Wajib	-	-

Tabel II.67
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

Isu Penting dan Masalah Mendesak		
Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)
1. Kebijakan Pemerintah AS akan lebih pada pengetatan fiskal 2. Pemulihan Zona Eropa masih berjalan dengan lambat, sehingga memerlukan waktu untuk ekonomi pulih seperti sebelum krisis 3. Pertumbuhan ekonomi China akan lebih moderat, dan kebijakan pemerintah akan lebih difokuskan pada perekonomian domestik 4. Pengendalian defisit perdagangan 5. Mempertahankan momentum pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, khususnya investasi langsung (FDI) 6. Mempercepat proses pembebasan lahan 7. Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah-swasta 8. Meningkatkan infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia 9. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional 10. Mengembangkan sumber energi terbarukan 11. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan 12. Meningkatkan <i>allocative</i> dan <i>technical efficiency</i> belanja pemerintah 13. Meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja pemerintah	1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam, 2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, 3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana yang belum memadai, 4. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap, 5. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap, 6. Sosial Budaya, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas; masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); pengendalian penyakit menular dan tidak menular; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal 7. Pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir 8. Linkage pembangunan desa dan kota 9. Pemilukada di 2 kabupaten dan 1 kota 10. Ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi	1. Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah; 2. Terbatasnya sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal; 3. Belum terintegrasinya jaringan transportasi intermoda wilayah; 4. Meningkatnya laju migrasi penduduk dari luar daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung tahun 2012 masih tumbuh dengan cukup baik meskipun mengalami sedikit perlambatan dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 sebesar 5,7 persen merupakan suatu pencapaian yang baik ditengah kondisi perekonomian global yang masih belum pulih pasca terjadinya krisis ekonomi global. Penopang utama pertumbuhan ekonomi berasal dari kuatnya permintaan domestik yang didorong oleh terjaganya optimisme masyarakat atas kondisi perekonomian serta kegiatan kegiatan investasi untuk ekspansi bisnis. Tingginya investasi di Bangka Belitung antara lain juga disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta didukung oleh kemudahan investasi. Namun di sisi lain, perlu adanya dukungan infrastruktur seperti penambahan kapasitas listrik.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2012, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan migas sebesar 34.325,4 milyar rupiah, sedangkan PDRB tanpa migas sebesar 33.676,7 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas adalah 30.415,6 milyar rupiah dan PDRB tanpa migas sebesar 29.778,7 milyar rupiah. Demikian juga, PDRB atas dasar harga konstan 2000 baik dengan migas maupun tanpa migas pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 adalah sebesar 5,7 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2011 yang tumbuh sebesar 6,5 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan serta sektor konstruksi sebesar 11,0 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,5 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,0 persen.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2012 dan proyeksi 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	4.977,93	5.495,72	6.399,99	7.304,27
2. Pertambangan & Penggalian	4.687,36	5.128,23	5.413,30	5.854,18
3. Industri PengolaHan	5.649,56	6.203,05	6.601,89	7.155,38
4. Listrik, Gas & Air Bersih	171,60	209,94	243,42	276,90
5. Konstruksi	1.917,92	2.354,84	2.868,26	3.305,18
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	4.935,46	5.813,33	6.560,37	7.282,48
7. Pengangkutan & Komunikasi	847,99	1.000,74	1.185,69	1.338,44
8. Keuangan, Real estate & JasaPerusahaan	663,71	788,72	953,86	1.078,86
9. Jasa-Jasa	2.861,43	3.421,06	4.098,63	4.658,25
PDRB Dengan Migas	26.712,97	30.415,64	34.325,42	38.253,95
PDRB Tanpa Migas	26.107,45	29.778,69	33.676,67	37.451,70

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

Tabel III.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2010-2013 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	2.493,37	2.609,25	2.812,98	3.016,72
2. Pertambangan & Penggalian	1.523,25	1.579,18	1.597,14	1.618,84
3. Industri PengolaHan	2.359,88	2.433,12	2.485,84	2.559,07
4. Listrik, Gas & Air Bersih	60,90	69,17	74,34	82,61
5. Konstruksi	736,08	834,53	925,97	1.017,40
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.119,01	2.309,36	2.446,96	2.602,57
7. Pengangkutan & Komunikasi	395,54	432,72	473,68	514,65
8. Keuangan, Real estate & Jasa Perusahaan	397,02	432,95	480,39	527,82
9. Jasa-Jasa	799,88	887,47	953,71	1.026,78
PDRB Dengan Migas	10.884,95	11.587,75	12.251,02	12.968,50
PDRB Tanpa Migas	10.714,79	11.414,91	12.079,67	12.794,79

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

Perlambatan pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 antara lain dipicu oleh rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan yang terhambat karena rendahnya harga komoditas timah sebagai komoditas unggulan Kepulauan Bangka Belitung di pasar internasional sebagai dampak melemahnya permintaan eksternal.

Selain itu, disebabkan pula oleh penerapan aturan penambangan baru yang dalam jangka pendek akan menurunkan produksi komoditas timah. Berdasarkan

rilis berita PT. Timah Tbk triwulan III, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, PT Timah Tbk menjalankan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Mineral dan Batubara, dimana pada periode berjalan, perusahaan telah melakukan penyesuaian bentuk kerjasama penambangan. Dalam jangka pendek, implementasi kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan produksi sebesar 3-5 persen, namun dalam jangka panjang, kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap (1) konversi cadangan, (2) pengendalian produksi, (3) reklamasi dan program pasca tambang.

Pertumbuhan *output* dunia tahun 2013 diperkirakan oleh *International Monetary Fund* (IMF) lebih baik dibanding tahun 2012, didorong oleh subsidi yang dilakukan oleh beberapa negara yang mendorong kegiatan perekonomian. Namun, proyeksi penguatan ini lebih rendah dibanding perkiraan IMF sebelumnya di bulan Oktober 2012. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menguat pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,3%-6,8%, sejalan dengan kinerja perekonomian dunia yang meningkat. Kontribusi terbesar berasal dari perekonomian domestik baik dari konsumsi maupun investasi, kondisi iklim usaha yang kondusif mendorong terciptanya pertumbuhan investasi di Indonesia. Konsumsi diperkirakan akan meningkat jelang pemilu 2014. Sementara dari sisi eksternal, sejalan dengan perbaikan perekonomian global, permintaan ekspor diperkirakan naik.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penggunaan, PDRB atas dasar harga yang berlaku tahun 2012 Rp34.325,42 miliar, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp17.814,52 miliar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp336,91 miliar. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi pemerintah sebesar Rp5.518,34 miliar, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp 9.235,28miliar, perubahan inventori sebesar Rp1.077.45 miliar, transaksi ekspor sebesar Rp20.113.22 miliar dan impor sebesar Rp19.770,31 miliar.

Perkembangan nilai PDRB menurut penggunaan pada tahun 2010-2013 dapat terlihat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4 berikut:

Tabel III.3
Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010-2013
Atas Dasar Harga Berlaku

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13.925,14	15.598,16	17.814,52	19.853,38
2. Konsumsi LNPRT	274,02	302,80	336,91	375,47
3. Konsumsi Pemerintah	4.046,23	4.865,27	5.518,34	6.149,91
4. PMTB	6.826,80	7.811,27	9.235,28	10.292,26
5. Perubahan Inventori	512,42	919,49	1.077,45	1.200,76
6. Ekspor	17.738,99	18.621,47	20.113,22	22.415,17
7. <u>Dikurangi</u> Impor	16.610,63	17.702,82	19.770,31	22.033,01
PDRB	26.712,97	30.415,64	34.325,42	38.253,95

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

Tabel III.4
Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010 -2013
Atas Dasar Harga Konstan

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5.370.62	5.676,56	6.044,28	6.406.44
2. Konsumsi LNPRT	93.10	97,51	101,78	129.68
3. Konsumsi Pemerintah	1.261.61	1.360,77	1.411,30	1.646.99
4. PMTB	2.639.50	2.848,30	3.050,42	3.358.84
5. Perubahan Inventori	186.57	370,49	668,25	674.36
6. Ekspor	6.528.90	6.622,10	6.614,53	6.725.82
7. <u>Dikurangi</u> Impor	5.195.36	5.387,97	5.639,55	5.973.65
PDRB	10.884.95	11.587,75	12.251,02	12.968,50

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

Pada tahun 2013 diperkirakan sumber utama pertumbuhan dari sisi penggunaan tetap akan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pelaku usaha masih terlihat optimis untuk meningkatkan kinerja dari sisi volume.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan kuat pada tahun 2013 hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya Tingkat Keyakinan Konsumen di Kota Pangkalpinang yang masih menunjukkan optimisme. Peningkatan harga timah pada tahun 2013 secara gradual sehingga secara perlahan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi pada tahun 2013 diperkirakan akan mengalami moderasi seiring dengan perlambatan laju kredit investasi yang terjadi namun masih tetap tinggi terkait dengan adanya rencana penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis yang didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah.

Ekspor diperkirakan akan naik seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tumbuh. Harga timah pada tahun 2013 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh defisit karena pengaturan produksi timah.

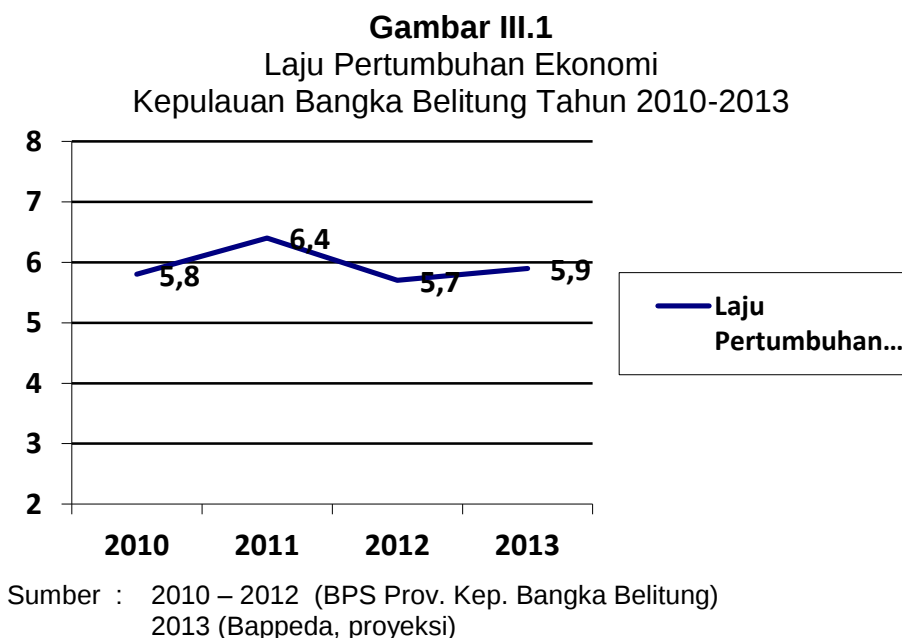
3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013, diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi dengan perkiraan angka pertumbuhan pada kisaran 5,6 – 6,1 persen. Pertumbuhan PDRB akan didorong oleh perbaikan perdagangan internasional diperkirakan akan mulai membaik dengan percepatan ekspor dan perlambatan impor. Disisi sektoral, harga timah di pasar internasional diperkirakan meningkat secara gradual, terdorong oleh mulai membaiknya perekonomian global.

Dampak positif dari implementasi kebijakan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Mineral dan Batubara diperkirakan akan mulai dirasakan. Konversi cadangan dan pengendalian produksi diyakini akan membuat harga timah di pasaran dunia akan terdongkrak. Selain itu, sektor pertanian diperkirakan akan terus memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi. Gambaran mengenai perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2010-2012 dapat terlihat pada Gambar III.1.



Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5
Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 - 2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	7,8	4,6	7,8	7,2
2. Pertambangan & Penggalian	0,8	3,7	1,1	1,4
3. Industri Pengolahan	3,7	3,1	2,2	2,9
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8,0	13,6	7,5	11,1
5. Konstruksi	9,5	13,4	11,0	9,9
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,8	9,0	6,0	6,4
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,8	9,4	9,5	8,6
8. Keuangan, Real estate, & Jasa Perusahaan	9,3	9,1	11,0	9,9
9. Jasa-Jasa	10,1	10,9	7,5	7,7
PDRB DENGAN MIGAS	6,0	6,5	5,7	5,9
PDRB NON MIGAS	6,1	6,5	5,8	5,9

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu daerah. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima masyarakat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2013 dilihat dari sisi produksi, diproyeksikan masih tetap didominasi oleh sektor primer terutama sektor pertanian dan sektor penggalian, kemudian sektor sekunder yaitu sektor pengolahan yang berbasis pada sumber daya alam dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan yang terjadi di semua subsektor yaitu perkebunan, tanaman bahan makan, dan perikanan. Permintaan akan subsektor perkebunan, kelapa sawit, karet, lada, diperkirakan tetap tinggi, sehingga meningkatkan harga. Meski demikian, diperkirakan kondisi cuaca tetap akan membatasi produksi.

Pada tahun 2013 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan didalam RPJMN 2009-2014 adalah sebesar 6,1 – 6,7 persen, dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, angka yang telah ditetapkan di RPJMN tersebut diperkirakan dapat tercapai dan berada pada kisaran 5,9 – 6,2 persen.

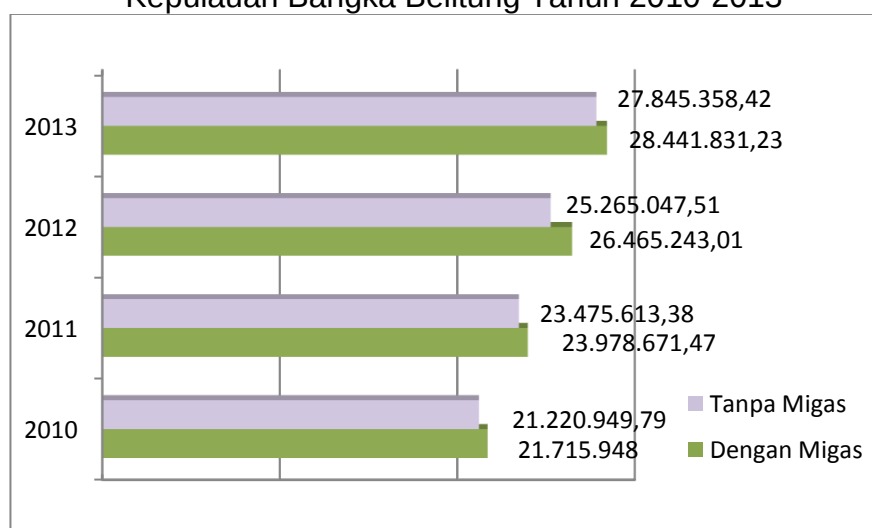
Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah strategis guna mempercepat proses transformasi ekonomi dari yang berbasis pertambangan menjadi perekonomian yang berbasis

potensi lokal lainnya sehingga pembangunan sektor dan sub sektor lain harus terus dipacu. Berdasarkan data dan berbagai kajian yang ada, beberapa sektor dan sub sektor yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bangka Belitung yaitu pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata sementara sektor industri dan sektor lainnya pun harus diarahkan pada sektor yang menjadi potensi lokal tersebut.

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah.

Gambar III.2
PDRB Per Kapita
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013



Sumber: 2010 – 2012 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)
2013 (Bappeda, proyeksi)

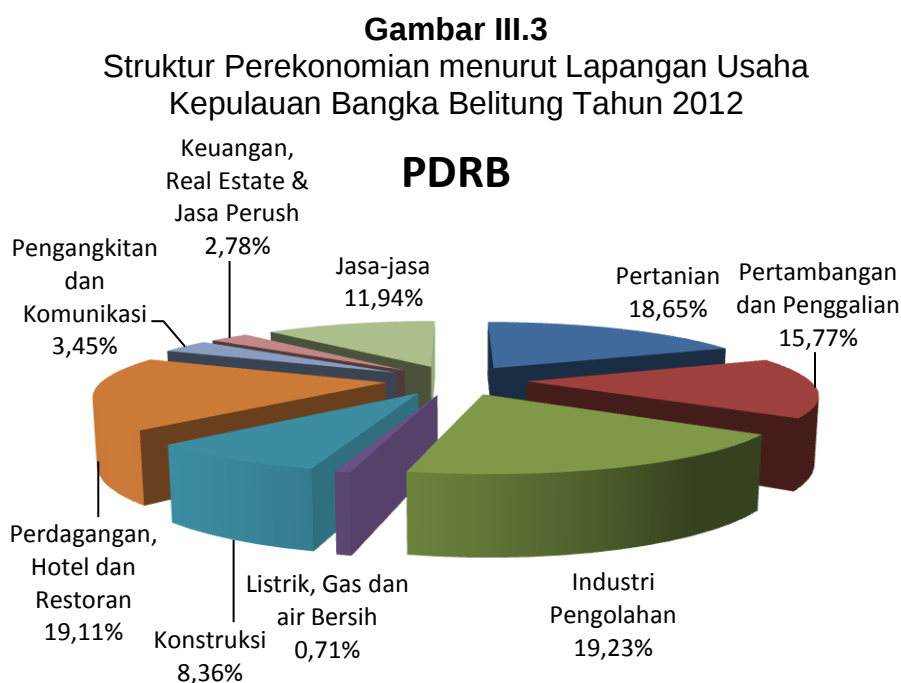
Dalam kurun waktu 2010-2012 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, PDRB perkapita penduduk berdasarkan Harga berlaku di Kepulauan Bangka Belitung tanpa migas adalah sebesar Rp.25.265.047,51 sedangkan dengan migas adalah sebesar Rp.26.465.243,01. Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB perkapita Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan hingga Rp.28.441.831,2 pada 2013 dengan migas sementara tanpa migas diperkirakan akan mencapai Rp. 27.845.358,4 pada tahun yang sama.

3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi

Sementara dari struktur ekonomi, dimana struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi

pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2012 secara umum tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun mengalami penurunan, namun sektor Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi pada pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 19,23 persen, penurunan pada sektor Industri Pengolahan ini lebih kepada sebagai akibat dari semakin menurunnya sektor Pertambangan dan Penggalian disebabkan karena tingginya sub sektor industri pengolahan logam besi dan baja dalam memberikan kontribusi terhadap sektor tersebut. Selanjutnya diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 19,11 persen, sektor pertanian sebesar 18,65 persen. Gambaran mengenai distribusi persentase sektoral terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 dapat terlihat pada Gambar III.3.



Sumber: Bappeda & Statistik (data diolah)

Sementara itu, pada tahun 2013, diperkirakan akan terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan menggeser sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sebagaimana tergambar pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Distribusi Persentase PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 – 2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
----------------	------	------	------	--------------------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian		18,63	18,07	18,65	19,09
2. Pertambangan & Penggalian		17,55	16,86	15,77	15,30
3. Industri Pengolahan		21,15	20,39	19,23	18,70
4. Listrik, Gas & Air Bersih		0,64	0,69	0,71	0,72
5. Konstruksi		7,18	7,74	8,36	8,64
6. Perdagangan, Hotel & Restoran		18,48	19,11	19,11	19,04
7. Pengangkutan & Komunikasi		3,17	3,29	3,45	3,50
8. Keuangan, Real estate, & Js. Prs		2,48	2,59	2,78	2,82
9. Jasa-Jasa		10,71	11,25	11,94	12,18
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

*) Angka Proyeksi Bappeda & Statistik

3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi penggunaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 s/d 2013, kecuali perbandingan antar ekspor dikurangi impor yang cenderung mengalami penurunan (Tabel III.7).

Tabel III.7
Struktur PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2010 – 2013 (persen)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	49,34	48,99	49,34	49,40
2. Konsumsi Lembaga Swasta Niralaba	0,86	0,84	0,83	1,00
3. Konsumsi Pemerintah	11,59	11,74	11,52	12,70
4. PMTB	24,25	24,58	24,90	25,90
5. Perubahan Inventori	1,71	3,20	5,45	5,20
6. Ekspor <u>Dikurangi</u> Impor	12,25	10,65	7,96	5,80
PDRB	100	100	100	100

Sumber: Bappeda & Statistik (Data diolah)

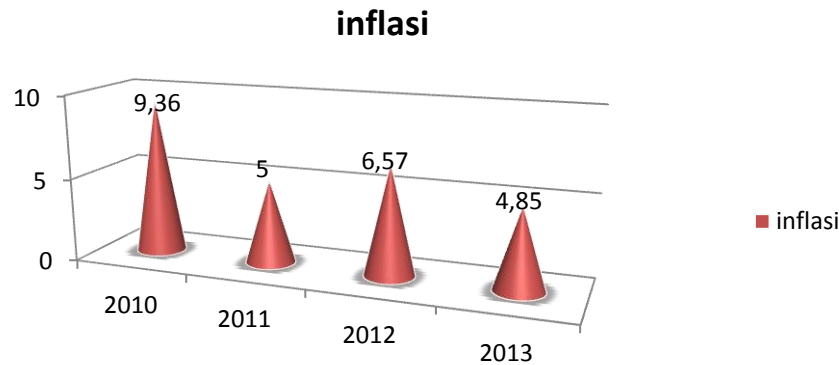
*) 2013 angka proyeksi

3.1.4 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Dalam periode waktu tahun 2010 - 2012, terjadi fluktuasi inflasi di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2010 Inflasi mencapai angka 9,36 persen, kemudian mengalami penurunan laju inflasi pada tahun berikutnya. Pada tahun 2011 inflasi menjadi 5 persen. Inflasi kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 6,57 persen. Gambaran mengenai trend inflasi 2010-2012 dan perkiraan 2013 serta nilai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar III.4 dan Tabel III.8.

Gambar III.4
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2013



Keterangan : 2010-2012 (BPS), 2013 (Proyeksi)

Capaian inflasi tahun 2012 Pangkalpinang berada di atas inflasi nasional sebesar 4,30% (yoy). Sementara itu disisi pergerakan inflasi tahunan Kota Pangkalpinang bergerak searah dengan inflasi nasional, meskipun tetap lebih tinggi dibanding inflasi nasional.

Jika dicermati menurut kelompoknya, pada tahun 2012 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 10,31 persen, diikuti oleh kelompok bahan makanan yang sebesar 8,50 persen.

Tabel III.8.
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2010-2012

Kelompok Pengeluaran	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	9,36	5,00	6,57
1. Bahan Makanan	17,68	-0,50	8,50
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,01	5,32	7,95
3. Perumahan	4,08	7,52	5,81
4. Sandang	4,86	8,83	5,79
5. Kesehatan	2,98	7,09	5,19
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	21,33	8,73	10,31
7. Transportasi dan Komunikasi	0,68	10,55	-0,11

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel

Pada tahun 2013, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai 4,85 persen, dimana Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

3.1.5 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Nilai investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 adalah sebesar US\$ 59.183,38 ribu dan investasi PMDN tahun 2012 adalah sebesar Rp 533.460,80 juta. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar di dalam Tabel III.9.

Tabel III.9
Kondisi Investasi PMA dan PMDN
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012

Uraian	Investasi	
	PMA	PMDN
(1)	(2)	(3)
Jumlah Investasi	3 perusahaan	20 perusahaan
Nilai Investasi	59.183,38 (ribu US\$)	533.460,80 (juta Rupiah)
Tenaga Kerja yang Terserap	5.893 Orang	7.263 Orang

Sumber: BKPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2013 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Investasi memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan tingkat investasi yang tinggi. Karena kebutuhan investasi masih belum mampu dipenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, usaha untuk menarik investasi asing masih harus terus dilakukan, terutama melalui usaha perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/ pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus

dilakukan. Industrialisasi terhadap sektor pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

Ekspor dan Impor

Nilai ekspor dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor 2011. Pada tahun 2011, ekspor mencapai US\$2.792,2 juta (berdasarkan Harga *Free On Board*, FOB), Sementara pada tahun 2012 turun menjadi US\$ 2.280,9 juta.

Komoditi Timah merupakan penyumbang ekspor terbesar dari total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 dengan nilai sebesar US\$ 1.559,4 juta sementara itu untuk ekspor komoditi non timah sebesar US\$ 721,5 juta.

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 mencapai US\$89,0 juta, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar US\$91,6 juta. Penurunan nilai impor tersebut disebabkan oleh turunnya impor migas sebesar dari US\$18,6 juta pada tahun 2011 menjadi US\$15,3 juta pada tahun 2012. Sedangkan impor non migas mengalami peningkatan dari US\$73,0 pada tahun 2011 juta menjadi US\$73,7 juta pada tahun 2012. Informasi mengenai perkembangan nilai ekspor-impor berdasarkan nilai dan negara dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Ringkasan Perkembangan Ekspor – Impor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010–2012

Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai FOB (Juta US \$)			
Total Ekspor	1.787,5	2.792,2	2.280,9
Timah	1.419,1	2.089,0	1.559,4
Non Timah	337,3	703,2	721,5
Nilai CIF (Juta US \$)			
Total Impor	73,7	91,6	89,0
Migas	11,5	18,6	15,3
Non Migas	62,2	73,0	73,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel

Berdasarkan negara tujuan utama, ekspor timah terbesar adalah Singapura yang mencapai US\$1.057,6 juta atau, diikuti Malaysia US\$138,8 juta, Belanda US\$98,8 juta, Jepang US\$ 52,7 juta dan Taiwan US\$15,7 juta. Informasi mengenai negara tujuan timah terbesar dapat terlihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel III.11
Negara Tujuan Ekspor Timah dan Negara Asal Impor
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2012

Negara	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara Tujuan Ekspor (Juta US \$)			
1. Singapura	1.092,9	1.445,3	1.057,6
2. Malaysia	62,9	159,2	138,8
3. Belanda	66,2	144,4	98,8
4. Taiwan	45,8	77,6	15,37
5. Jepang	43,7	73,5	52,7
Total 5 Negara	1.311,5	1.900,0	1.363,2
Lainnya	107,7	189,0	721,5
Total Ekspor Timah	1.419,2	2.089,0	1.559,4
Negara Asal Impor (Juta US \$)			
1. Thailand	15,9	37,0	22,9
3. Malaysia	7,7	25,4	30,5
2. Singapura	12,7	14,3	8,3
4. Vietnam	5,3	6,3	6,9
5. China	29,1	5,3	4,5
Total 5 Negara	70,7	88,3	73,1
Lainnya	2,9	3,2	15,9
Total Impor	73,6	91,5	89,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel

Lima negara pemasok barang impor terbesar tahun 2012 adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam dan China. Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Malaysia selama tahun 2012 mencapai angka terbesar yakni US\$30,5 juta, diikuti Thailand sebesar US\$22,9 juta, Singapura sebesar US\$8,3 juta, Vietnam sebesar US\$6,9 juta dan China sebesar US\$4,5 juta.

Pada tahun 2013 diperkirakan ekspor akan meningkat pesat seiring dengan stabilnya kondisi perekonomian global. Upaya peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk meningkatkan ekspor non timah. Sedangkan impor pada tahun yang sama diharapkan dapat ditekan pertumbuhannya, seiring dengan pertumbuhan industri pengolahan di daerah.

3.1.6 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka pada tahun 2012 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011. TPT pada 2011 sebesar 5,63 persen menjadi 3,5 persen pada 2012.

Tabel III.12
Angka Tingka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2013

Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	3,6	3,5	3,05

Sumber: 2010 – 2012 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)

*) Angka Proyeksi (Bappeda Prov. Kep. Babel)

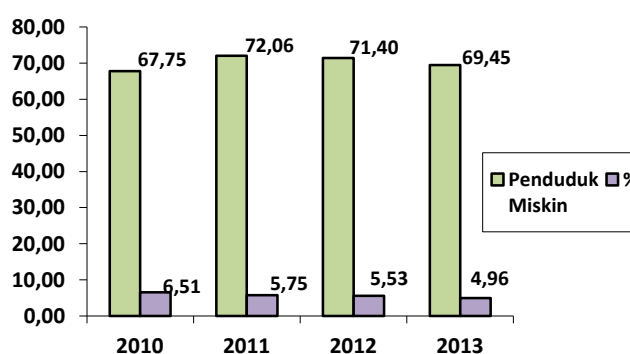
Pada tahun 2013, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor raw materials akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh berkembang yang akhirnya akan berimbas bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru.

3.1.7 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Pada 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 72,06 ribu jiwa dengan persentase 5,75 persen sementara pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin turun menjadi 71,40 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 5,53 persen.

Gambar III.5
Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013



Sumber: 2010 – 2012 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)
2013 (Proyeksi Bappeda)

Pada tahun 2013, angka kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat di Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan tertinggi terjadi di daerah perdesaan.

3.1.8 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan regional antara daerah diukur dengan indeks ketimpangan Williamson. Semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Indeks Williamson pada tahun 2010 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti ditampilkan pada Tabel III.3.1.10, proyeksi Indeks tersebut menurun pada tahun 2011 menjadi 44,40 dari 45,17 pada tahun 2010. Sedangkan proyeksinya pada tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi 44,42 (2011) dan 44,45 (2012). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketidakmerataan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.13
Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2013)

Tahun	Indeks Ketimpangan Willamson
(1)	(2)
2010	
2011	
2012	
2013	

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013 dan Hasil olahan

3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan indikator koefisien Gini. Ketimpangan pendapatan yang membesar ditunjukkan angka koefisien Gini yang meningkat (lihat Tabel III.3.1.11). Proyeksi koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2011 adalah 32,78 yang mengalami peningkatan dibandingkan indeks tahun 2010 yang sebesar 30,88. Proyeksi koefisien tersebut turun pada 2012 dan 2013 masing-masing menjadi 31,97 dan 31,84. Perkembangan koefisien tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung semakin mengecil.

Tabel III.14
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010 – 2013)

Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)
2010	
2011	
2012	
2013	

Sumber: Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2011 - 2013 dan Hasil olahan

3.1.10 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

A. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015

Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan sering bertolak belakang. Belajar dari kenyataan ini, dalam usaha untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan 2015 perlu diikuti langkah-langkah

konkret untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan. Salah satu tolok ukur kualitas pertumbuhan ini adalah adanya pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan yang optimal. Tanpa adanya unsur pemerataan, disparitas pembangunan akan semakin melebar. Jika ini yang terjadi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan dinikmati oleh daerah tertentu. Kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dicapai antara lain dengan menggenjot laju pertumbuhan pada sektor-sektor yang memungkinkan menciptakan lapangan kerja cukup besar dengan sasaran menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dapat terwujud apabila APBD disusun lebih mengakomodir kebutuhan sektor tersebut. Belanja pemerintah lebih diarahkan pada sektor-sektor yang padat karya dan meningkatkan alokasi untuk bantuan pendanaan usaha mikro. Melihat tantangan yang cukup berat pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu menjamin dan meneruskan, bahkan semakin menfokuskan arah kebijakan yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*.

Diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014 dan 2015 diperkirakan masih mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan social
- 3) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
- 4) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitungsaat ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan

- pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang pelayanan, dan penyederhanaan prosedur perizinan termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
 - 6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan pemerataan serta diharapkan mampu memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan memperhatikan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015

Membaiknya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekspor Babel yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang terjadi tidak optimal dikarenakan kapasitas yang terbatas akibat tergerusnya produksi komoditas primer akibat anomali cuaca. Hal ini juga berdampak *inflatoir*, yaitu akan meningkatnya tingkat inflasi yang cukup tinggi.

Pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih cukup tinggi. Faktor pendorong ekonomi masih berasal dari tingginya harga timah sementara kapasitas masih terbatas. Ketergantungan beberapa sektor terhadap sektor pertambangan menjadi kendala dalam meningkatkan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Revitalisasi sektor unggulan non pertambangan harus segera dipercepat. Sektor Pertanian, kelautan dan perikanan serta jasa-jasa menjadi alternatif untuk didorong sebagai sektor penopang pertumbuhan ekonomi yang baru. Sementara itu upaya untuk mendorong investasi swasta harus terus dilakukan, yang dalam hal ini dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah.

Kinerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2012 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Bangka Belitung pada tahun 2014 dan 2015. Selain itu, dengan semakin gencarnya sektor perbankan dalam menyalurkan kredit dan bangkitnya pasar perdagangan secara amat cepat, diharapkan menjadi pendorong utama bagi perbaikan ekonomi secara optimal. Peningkatan investasi yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Bangka Belitung dimasa yang akan datang, di samping sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan.

3.1.11 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2010-2012, arah kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2014 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan
- 2) Peningkatan nilai tambah produksi berdasarkan potensi lokal
- 3) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- 4) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah
- 5) Pengendalian angka inflasi
- 6) Pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- 2) Dana perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang syah, meliputi Hibah, Dana darurat, Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana penyesuaian dan Dana alternatif khusus, serta Dana bantuan keuangan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan pinjaman daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel III.15.

Tabel III.15

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Proyeksi /Target 2013	Proyeksi /Target 2014	Proyeksi /Target 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	462.399.264.365,83	439,009,839,975.64	465.931.500.628,21	519.716.851.026,91	572.771.978.178,91
1.1.1	Pajak daerah	418.359.726.160,95	396,527,427,024.20	427.503.933.406,21	482.898.762.701,00	535.531.240.482,00
1.1.2	Retribusi daerah	3.565.501.452,21	3,688,856,557.31	3.106.854.000,00	4.591.260.198,00	5.013.909.569,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.016.265.932,59	7,193,085,574.73	5.000.000.000,00	1.906.601.353,95	1.906.601.353,95
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	36.457.770.820,08	31,600,470,819.40	30.320.713.222,00	30.320.226.773,96	30.320.226.773,96
1.2	Dana perimbangan	700.510.364.139,00	821,562,832,517.00	933.756.954.111,00	933.756.954.111,00	933.756.954.111,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	201.039.549.139,00	162,339,367,517.00	172.446.266.111,00	172.446.266.111,00	172.446.266.111,00
1.2.2	Dana alokasi umum	481.589.915.000,00	634,087,815,000.00	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	17.880.900.000,00	25,135,650,000.00	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	33.778.571.000,00	124,736,861,500.00	141.976.850.000,00	141.976.850.000,00	141.976.850.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.778.571.000,00	124,736,861,500.00	141.976.850.000,00	141.976.850.000,00	141.976.850.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)	1.196.688.199.504,83	1,385,309,533,992.64	1.541.665.304.739,21	1.595.450.655.137,91	1.648.505.782.289,91

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2014 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- 1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- 4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Isu-isu strategis, fenomena dan kondisi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah: *“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi Lokal, Dukungan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Memantapkan Perekonomian Nasional”*.

Dalam rangka pencapaian target RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017, arah kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada:

- 1) Peningkatan proporsi belanja dalam rangka penanganan isu strategis daerah dan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di daerah;

- 2) Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat (*Quick Win*);
- 3) Mempertahankan alokasi belanja sebesar minimal 20% untuk pembiayaan pendidikan dan 10% untuk kesehatan;
- 4) Penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada Anggaran Responsif Gender.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Table III.16.

Tabel III.16

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Proyeksi /Target 2013	Proyeksi /Target 2014	Proyeksi /Target 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	496.523.145.823,69	775,147,048,645.18	933.393.590.808,95	586.974.313.050,67	586.974.313.050,67
2.1.1	Belanja pegawai	191.502.928.805,50	216,255,124,736.98	291.846.964.478,48	267.076.757.213,00	267.076.757.213,00
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	65.910.255.600,00	208,331,548,575.00	223.129.839.829,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	21.922.054.000,00	669,500,000.00	2.278.150.000,00	2.945.655.188,00	2.945.655.188,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	132.893.986.920,79	212,792,435,968.20	168.790.322.331,47	199.951.900.649,67	199.951.900.649,67
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	84.293.920.497,40	137,098,439,365.00	239.229.313.188,00	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	-	8.119.000.982,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
B	Jumlah Belanja Tidak Langsung	496.523.145.823,69	775,147,048,645.18	933.393.590.808,95	586.974.313.050,67	586.974.313.050,67
2.2	Belanja Langsung	683.797.480.161,63	576,982,947,602.18	975.865.064.553,00	1.047.520.421.688,33	1.047.520.421.688,33
2.2.1	Belanja pegawai	36.699.987.500,00	49,827,644,899.42	92.748.562.396,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	163.338.864.175,42	244,578,341,525.76	400.764.845.143,00		
2.2.3	Belanja modal	483.758.628.486,21	282,576,961,177.00	482.351.657.014,00		
C	Jumlah Belanja Langsung	683.797.480.161,63	576,982,947,602.18	975.865.064.553,00	1.047.520.421.688,33	1.047.520.421.688,33
D	Total Jumlah Belanja	1.180.320.625.985,32	1,352,129,996,247.36	1.909.258.655.361,95	1.634.494.734.739,00	1.634.494.734.739,00

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Bagi perekonomian daerah yang berbasis sektor primer seperti Kepulauan Bangka Belitung, peranan anggaran pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi daerah menuntut kebijakan yang cenderung ekspansif. Salah satu alternatif bagi pembiayaan daerah adalah mencari sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pihak luar yang diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan dana segar, selain itu diharapkan pula untuk dapat meningkatkan alternatif investasi daerah, maupun meningkatkan mobilitas pendapatan lokal. Di lain pihak, risiko yang harus ditanggung adalah kondisi stabilitas ekonomi makro, baik berupa fluktuasi nilai tukar maupun tingkat suku bunga, merupakan faktor eksternal yang perlu dicermati dalam memilih alternatif sumber pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.17, diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2014;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Tabel III.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Proyeksi/Target 2013	Proyeksi/Target 2014	Proyeksi/Target 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	240.432.352.331,03	242,245,781,562.54	377.593.350.622,24	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	240.432.352.331,03	242,245,781,562.54	377.593.350.622,24	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	240.432.352.331,03	242,245,781,562.54	377.593.350.622,24	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	15.000.000.000,00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	15.000.000.000,00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	225.432.352.331,03	232,245,781,562.54	387.593.350.622,24	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala (SiLPA)	241.799.925.850,54	265,425,319,307.82	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

B A B IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2014 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2012–2017) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun III (2012–2017) adalah Ekonomi dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, Prasarana dan Sarana, SDM dan Kependudukan, Pemerintahan, dan Sosial, Budaya dan Politik.
2. Draf Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2012-2032
Pembangunan Daerah Tahun 2013 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2012-2016). Draf Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2032, dimana dalam rangka perwujudan Pemantapan Sistem Perkotaan, Sistem Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang, dan Kawasan Strategis, salah satunya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, termasuk upaya peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.
Pembangunan Daerah Tahun 2014 adalah tahun kedua dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”***.
4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012
 - b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya
 - c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
 - 1) Ketergantungan SDA masih tinggi serta daya dukung lingkungan cenderung melemah
 - 2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah rendah
 - 3) Pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir
 - 4) Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014
 - 5) Kualitas SDM perlu ditingkatkan
 - 6) Linkage pembangunan desa dan kota
 - 7) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan perlu ditingkatkan
 - 8) Ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi
5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2014 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tiga kata kunci (*key word*) utama tema yaitu:
 - a. Pemantapan Perekonomian Nasional

- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
- c. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, Dukungan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan Perekonomian Nasional.”***

Makna tema:

1. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**, dimaknai sebagai upaya yang mengarah kepada pembangunan SDM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, mitigasi bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pengembangan ekonomi kerakyatan**, mengarah pada langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dengan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal yang berorientasi ekspor, seperti lada, karet, hasil laut dan hasil pertambangan. Berdasarkan Data BPS Bangka Belitung, 2011 diketahui bahwa sebaran penduduk miskin dari tahun 2007 sampai dengan 2011 masih dominan berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan desa masih mencapai 6,91%, sedangkan di kota hanya 3,35%. Jadi pengembangan ekonomi kerakyatan akan menjadi langkah strategis bagi pengurangan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat desa secara utuh dan terus menerus menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Bangka Belitung selama ini belum berjalan secara optimal. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produksi dan minimnya jiwa wirausaha. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat Bangka Belitung, khususnya di perdesaan yang dominan bekerja di sektor primer. Di sisi yang lain, belum berkembangnya lembaga koperasi yang berbasis potensi lokal, masalah pemasaran, serta masih terkendalanya permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan membutuhkan dukungan sektor lain, seperti sektor perbankan, industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong sektor-sektor ekonomi rakyat untuk dapat lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Jadi, kebijakan-kebijakan pada sektor-sektor lain tersebut harus pula menopang dan bersinergi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan ekonomi kerakyatan sangat terkait dengan permasalahan ekonomi yang lain, seperti daya saing, inflasi, pengembangan pariwisata, kelautan, perikanan dan

lain-lain. Sektor-sektor ekonomi kerakyatan dapat maju ketika mampu berdaya saing dan dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, kondisi geografis, serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian dan lain-lain dapat mendukung berbagai pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mengoptimalkan keunggulan komparatif memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Keunggulan-keunggulan ini misalnya dapat digali dari kekhasan daerah yang tidak dimiliki daerah lain sehingga sektor ekonomi kerakyatan yang dikembangkan memiliki keunggulan dan bersifat lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan sebagai provinsi kepulauan.

- 3. Dukungan Infrastruktur**, dimaknai bahwa prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur akan membuka akses daerah dan membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan, ketersediaan prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai bertujuan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, seperti sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan; sarana dan prasarana perumahan dan permukiman maupun sarana dan prasarana energi dan kelistrikan bagi memenuhi kebutuhan energi dan listrik masyarakat Bangka Belitung; sarana transportasi laut, darat, dan udara; serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara bertahap sampai ke pelosok perdesaan.

- 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup**, dimaknai sebagai upaya pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai salah satu daerah penghasil tambang, maka Bangka Belitung sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, sehingga segala bentuk pemanfaatan tata ruang juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Pembangunan Bangka Belitung masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam disamping kualitas SDM. Oleh karena itu, pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, tambang dan lain-lain harus dioptimalkan dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, partisipatif dan berwawasan lingkungan.

Persentase lahan kritis di Bangka Belitung semakin meningkat. Sementara laju kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor

lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a) Alih fungsi hutan/lahan

Salah satu upaya menjadi kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah dengan alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan syarat yang ketat sesuai dengan peruntukannya. Alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan lain-lain.

b) Kerusakan wilayah pesisir

Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi merusak hutan bakau dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan pengembangan potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak wilayah pesisir.

c) Lahan Kritis

Perbandingan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2004 dengan tahun 2010, untuk lahan sangat kritis dan kritis mengalami penurunan masing-masing sebesar 95,88% dan 81,24%. Sementara luas lahan yang tergolong agak kritis, potensial dan tidak kritis mengalami kenaikan masing-masing sebesar 78,41%, 243,26% dan 149,23%. Secara umum, luas lahan kritis di provinsi ini tahun 2010 adalah 112,838.87 Ha atau 6,93 % dari luas seluruhnya wilayah yang tersebar di 7 kab/kota.

Data ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di provinsi ini mengalami perbaikan karena luas lahan kritis mengalami penurunan dan lahan yang tidak kritis mengalami kenaikan. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya penanaman, reklamasi dan perbaikan kualitas lingkungan oleh berbagai pihak. Namun demikian, penurunan luas lahan kritis ini masih belum mencapai titik optimal, karena penurunan tingkat kualitas lahan kritis pada tahun 2010 mendominasi pada tingkat potensial kritis. Perubahan parameter kondisi lahan masih menimbulkan luasan lahan kritis bertambah.

d) Pencemaran sungai dan wilayah pesisir

Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas penambangan di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, kini

tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan pencemaran sungai dengan sinergisitas antardaerah yang dilalui sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan sungai.

e) *Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging*

Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam penambangan, pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.

Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun represif melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek *illegal mining* yang melakukan penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, berpotensi akan merusak lingkungan dan hutan dan berpotensi kerugian negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya. Begitupula dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini.

5. Pemantapan Perekonomian Nasional, dimaknai sebagai upaya untuk daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peningkatan daya saing (*competitiveness*) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik *talented people*, investasi, dan *mobile factors* lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi.

Penguatan daya tahan (*resillience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak). Perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi dan transformasi

kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (*flexibility*) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (*conducive*) terciptanya iklim usaha yang sehat.

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2014 diidentifikasi ada dua prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014

Adapun permasalahan seputar pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi politik masyarakat

Partisipasi politik masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012. Dari 872.102 pemilih dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hanya 536.365 orang menggunakan hak pilih. Sisanya, 335.797 atau 38,497 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih atau golput. Ini artinya tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah. Penyebabnya disebabkan oleh banyak faktor misalnya dari minimnya sosialisasi KPUD, apatisme masyarakat, pilihan politik warga dan seterusnya. Mengingat rendahnya angka partisipasi pemilih tersebut, maka fenomena golput ini perlu mendapat perhatian secara khusus.

b) Partisipasi politik perempuan

Persentase *Gender Development Index* (GDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam setiap tahun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan tertinggi pada tahun 2008, yaitu 61,03. Persentase kenaikan GDI dari tahun 2004 sampai tahun 2008 yaitu 54,34, 55,44, 57,8, 59,00, dan 61,03. Angka *Gender Empowerment Measurement* (GEM) juga mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Kenaikan angka GEM dari tahun 2004 sampai tahun 2008 yaitu 39,61, 40,22, 42,4, 43,7, dan 45,56. Disisi lain indeks pembangunan gender (IPG) tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Perkembangan IPG dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, yaitu 54,3, 55,4, 57,8, 59,69, 60,05, dan 60,36. Pembangunan dalam lima tahun ke depan kiranya memperhatikan aspek ini.

c) Penegakan hukum

Indeks Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menunjukkan kenaikan kuantitas dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut dari tahun 2005 s.d. 2009 adalah 1596, 2032, 2232, 2529, dan 2570. Sementara itu, Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif, yaitu naik pada

tahun 2007 dan 2008, yaitu sebesar 57,09%, 58,53%, namun kemudian menurun drastis pada tahun 2009 yaitu 55,30%. Disisi lain, Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional relatif fluktuatif, yaitu 92,18 % pada tahun 2007, kemudian menurun pada tahun 2008, yaitu 90,84%, dan kemudian naik sempurna pada tahun 2009, yaitu 100%. Penegakkan hukum kiranya berkaitan dengan rasa nyaman dan tenang sehingga bersama-sama dengan para *stakeholders* terkait, aspek ini patut mendapatkan perhatian yang lebih intens.

d) Indeks Demokrasi Indonesia

Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama UNDP (Program Pembangunan PBB), bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009, menyebutkan Provinsi Babel berada diposisi ke-20 dari 33 provinsi. Berdasarkan peringkat itu, artinya prestasi demokrasi Provinsi Babel rendah dibandingkan provinsi lain, berdasar tiga aspek yang diukur, yakni kebebasan sipil, pemenuhan hak politik dan kualitas kelembagaan demokrasi. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, IDI kiranya perlu ditingkatkan dengan memberikan porsi program yang relevan dan memadai untuk ketiga aspek pengukuran tersebut.

e) Penguatan lembaga legislatif

Jumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2009-2014 berjumlah 45 orang dari 7 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, Bintang Amanat dan Fraksi Gerindra. Terkait dengan peran legislatif, perlu kiranya ditingkatkan kapasitas legislatif dalam hal pembuatan Perda yang bersifat inisiatif. Perda inisiatif akan membantu eksekutif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lepas dari kapasitas kelembagaan pemerintahan. Banyaknya Perda inisiatif selama ini juga menjadi indikator kapasitas lembaga legislatif.

2. Reformasi Birokrasi

Keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah dapat dilihat dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tidak melaksanakan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*good governance and clean government*). Masyarakat kini juga sudah dapat menilai kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, indikator lain keberhasilan pemerintah daerah dalam sektor pemerintahan adalah kemampuannya dalam mengelola belanja daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan menyediakan pendanaan terkait dengan kebutuhan masyarakat (sarana, prasarana dan infrastruktur lain).

Di sisi lain, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan wibawa pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung stabilitas sosial politik.

Pemerintahan yang baik juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan daerah dan memberikan jaminan bagi efektivitas pelayanan publik.

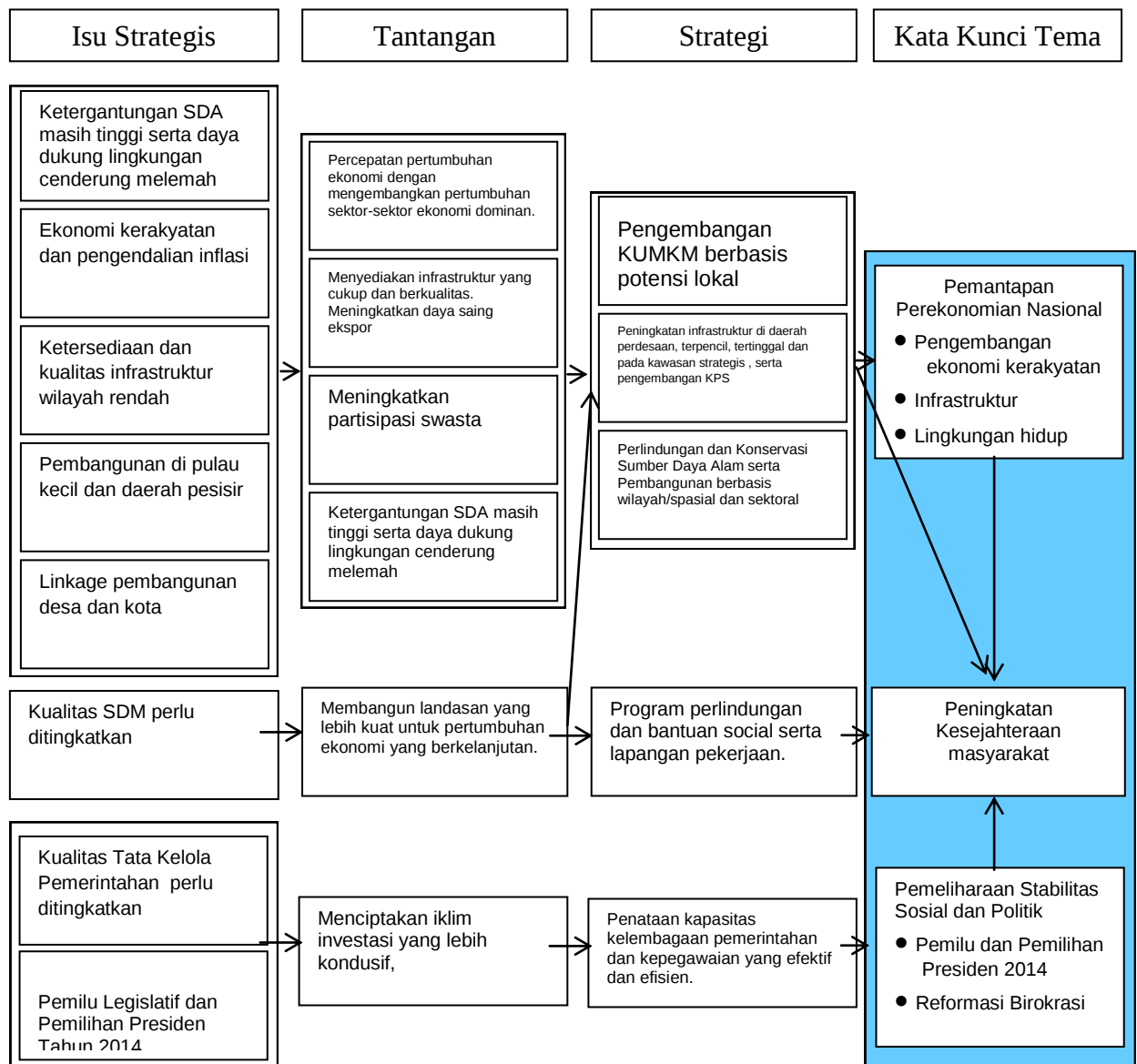
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang diharapkan adalah yang mampu membiayai pembangunan melalui penyediaan layanan dasar, infrastruktur sarana dan prasarana, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung daya saing daerah.

a) Pemerintahan yang bersih

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan secara berturut-turut mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah 80%. Data ini menunjukkan bahwa presentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan adalah relatif statis dan tidak menunjukkan perkembangan yang meningkat ataupun menurun dari tahun ke tahun.

Sementara itu, pemerintahan yang bersih juga dapat dilihat dari Jumlah Perda Pelayanan Satu Atap yang dimiliki oleh kabupaten/kota dari tahun 2007, 2008 dan 2009 yaitu 28.57, 14.29, dan 42.86. Data ini menunjukkan bahwa Jumlah Perda Pelayanan satu atap yang dimiliki oleh kabupaten/kota dari tahun 2007 sampai 2009 berfluktuasi. Ini berarti kuantitas produk perda yang dihasilkan pada tahun 2007 cukup produktif, namun menurun pada tahun 2008 dan mengalami penambahan lagi pada tahun 2009. Kuantifikasi jumlah Perda pelayanan satu atap menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen yang relatif cukup kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.

Gambar IV.1
Kerangka Fikir Keselarasan Isu Strategis dengan *Key Word* Tema Tahun 2014



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJM Daerah Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2014.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk :

- 1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berkelanjutan program;
- 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) mengatasi isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2014. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro sustainable/ environment*;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2014;
- 4) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 5) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 6) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapai visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka pembangunan daerah Tahun 2014 diarahkan pada upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tahun kedua juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan, dan koordinasi atas pengelolaan lingkungan

hidup dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah yang harus diselesaikan bersama-sama antarpemangku kepentingan.

Untuk melihat hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 2012-2017 disajikan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

Visi : <i>"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan".</i>		
Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan	1) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah	1) Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
	2) Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung	2) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	3) Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan	3) Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
	4) Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.	4) Meningkatnya daya beli masyarakat
		5) Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran
		6) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang		7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
		8) Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
		9) Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
	5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai	10) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.

Visi : “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
	peruntukan.	11) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
	6) Memperkuat kemitraan dan partisipasi aktif antar <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan lingkungan hidup.	12) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Misi IV : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7) Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.	13) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	8) Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	14) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
Misi V : Mewujudkan <i>good governance</i> dalam rangka mencapai <i>clean government</i>	9) Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	15) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yang diharapkan dapat mencapai 9 (Sembilan) tujuan utama yang ditandai dengan 15 (lima) sasaran utama. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian sasaran pembangunan. Adapun target sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2
Target Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No.	Target Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
(1)	(2)	(3)
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,1-6,7
2	Kemiskinan (persen)	3,68-3,55
3	Pengangguran (persen)	2,4-2,7
4	Angka Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran)	24
5	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,30
6	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,35
7	Pendapatan Perkapita (Rp/tahun)	8.991,85

4.3. Prioritas Pembangunan

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, yaitu :

1. **Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi**, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;
 - a) Memperkuat kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
 - b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
 - c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
 - d) Meningkatkan daya beli masyarakat
 - e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.
 Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (Mengembangkan ekonomi kerakyatan).
2. **Penguatan *rural urban linkages***, prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
 - b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
 - c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
 - d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
 Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM)).
3. **Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
 - b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.
 Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD

(Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
 - a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
5. **Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang**, melalui pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
 - a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
 - b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).
6. **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil**, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).
7. **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 RPJMD (Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean goverment*).
8. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun**, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
 - a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- 9. Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- 10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- 11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk :

- a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

12. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

13. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:

- a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d) Meningkatkan kemandirian usaha.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tabel IV.3
Keterkaitan antara Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

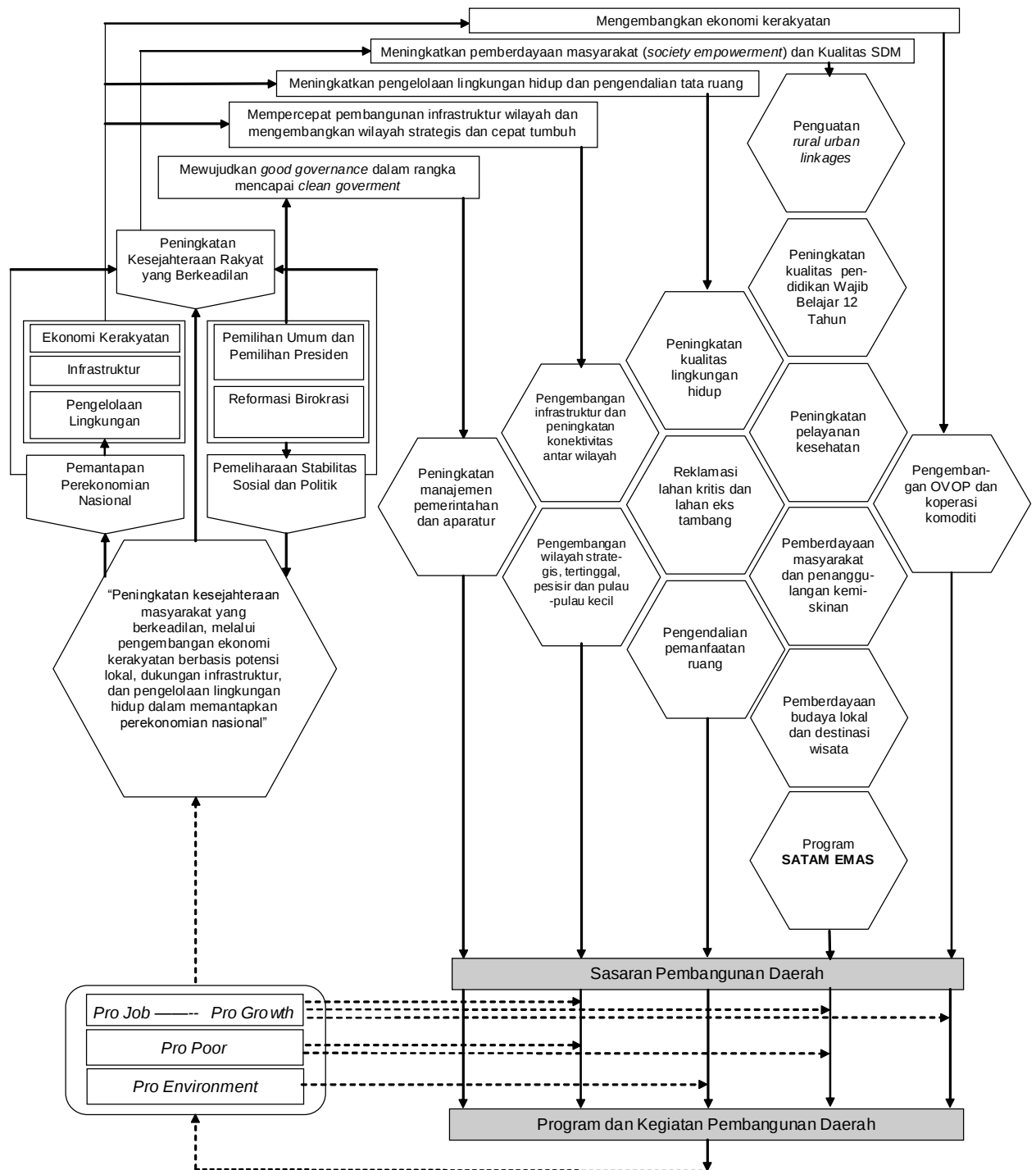
No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)
1.	Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi	1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat 5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
2.	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat 4. Meningkatnya daya beli masyarakat
3.	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5.	Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang	1. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6.	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau	1. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)
	kecil	
7.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	2. "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien"
8.	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhiya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
9.	Peningkatan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) 2. Terpenuhiya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
10.	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
11.	Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 3. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
12.	Pengendalian pemanfaatan ruang	1. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
13.	Program SATAM EMAS	1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah 4. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, satu prioritas daerah dapat mendukung beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar implementasinya lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya.

Untuk melihat proses dan dekomposisi keterkaitan antara tema, unsur-unsur tema nasional dan provinsi menjadi prioritas daerah disajikan pada Gambar IV.2.

Gambar IV.2
Dekomposisi Tema menjadi Prioritas Pembangunan Daerah



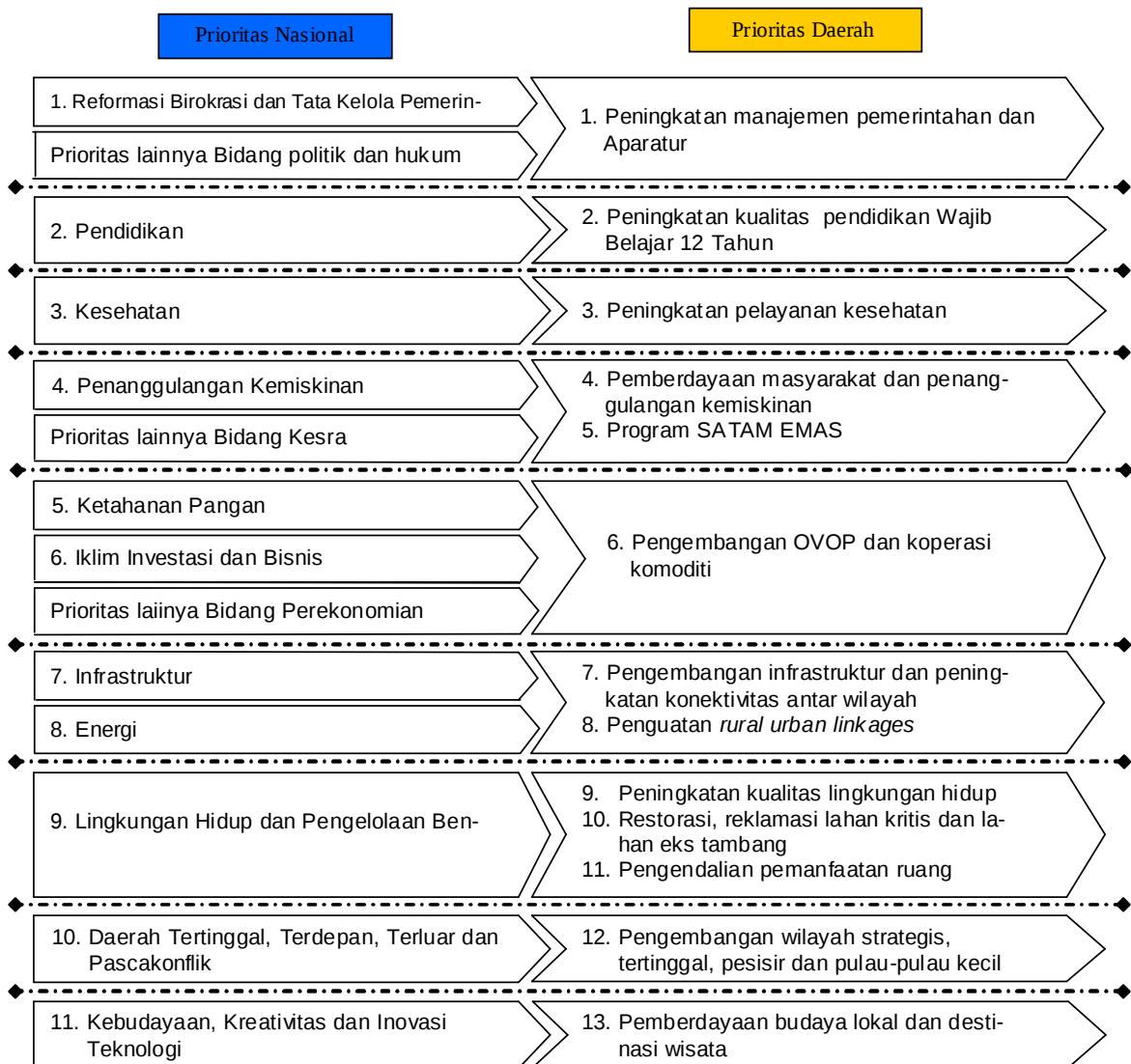
Penyusunan prioritas daerah tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, maka untuk melihat korelasi Program prioritas RPJMD dan prioritas pembangunan untuk tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4
Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2014 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

Prioritas Tahun 2014 (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
(1)	(2)
1. Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi	1. Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan koperasi komoditi
2. Penguatan <i>rural urban linkages</i>	2. Penguatan <i>rural urban linkages</i>
3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	3. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	4. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
5. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang	5. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	6. Program SATAM EMAS
7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	7. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
8. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	10. Pengendalian pemanfaatan ruang
11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	11. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
12. Pengendalian pemanfaatan ruang	12. Peningkatan pelayanan kesehatan
13. Program SATAM EMAS.	13. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas, secara umum prioritas RPJMD sama dengan prioritas RKPD, yang berbeda hanya urutan beberapa prioritas. Hal ini terkait sebagai upaya untuk penyelesaian beberapa isu strategis. Pemilihan prioritas daerah sangat terkait dengan upaya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti MDGs, SPM, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta keberlanjutan program. Untuk melihat korelasi antarhubungan ini dapat dilihat pada Gambar IV.4.Tabel IV.5, dan Tabel IV.6.

Gambar IV.3
Korelasi Prioritas Pembangunan dalam mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional



Tabel IV.5
Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program MDGs

No.	Tujuan Pembangunan MGDs	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017
(1)	(2)	(3)
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Penguatan rural urban linkages • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Program SATAM EMAS
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	• Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun

No.	Tujuan Pembangunan MGDs	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017
(1)	(2)	(3)
		Program SATAM EMAS
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	- Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan - Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
4	Menurunkan angka kematian anak	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5	Meningkatkan kesehatan ibu	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
6	Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Pengendalian pemanfaatan ruang - Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang - Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah - Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil - Program SATAM EMAS
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan	MDGs 8 memuat kewajiban yang harus dilakukan negara maju agar negara berkembang dapat mencapai tujuh goal MDGs.

Tabel IV.6
Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Mendukung Pelaksanaan SPM

No.	Standar Pelayanan Minimum	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017
(1)	(2)	(3)
1	Bidang Kesehatan	- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan - Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
2	Bidang Sosial*)	- Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan - Program SATAM EMAS
3	Bidang Lingkungan Hidup*)	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
4	Bidang Pemdagri (revisi)	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.
5	Bidang Perumahan Rakyat*)	- Program SATAM EMAS - Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
6	Bidang PP & PA*)	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
7	Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
8	Bidang Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun

No.	Standar Pelayanan Minimum	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017
(1)	(2)	(3)
		• Program SATAM EMAS
9	Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	• Penguatan <i>rural urban linkages</i> • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil • Pengendalian pemanfaatan ruang
10	Ketenagakerjaan*)	• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
11	Kominfo	• Penguatan <i>rural urban linkages</i> • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
12	Ketahanan Pangan*)	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Penguatan <i>rural urban linkages</i> • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil • Program SATAM EMAS
13	Kesenian*)	• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan • Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
14	Perhubungan*)	• Penguatan <i>rural urban linkages</i> • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
15	Penanaman Modal*)	• Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. • Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi • Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil

Keterangan : *) diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 dijabarkan pada Tabel IV.7.

Tabel VI.7
Matriks Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Persentase Wirausaha Baru (%)	1108
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,6-6,8
	PDRB Per Kapita (Rp)	22.637.060
	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	10
	Pertumbuhan Sektor Peternakan (%)	10

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
	Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%)	15
	Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)	10
	Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)	5
	Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)	15
	Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	15
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	10
	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	10
	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (%)	20,0
	Indeks Yang Diterima Petani (It)	125,75
	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	126,30
Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.	Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)	5
Meningkatnya daya beli masyarakat	Daya Beli Masyarakat (Rp)	649,90
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	20.140.591,70
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp)	7.777.514,20
Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95
	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	9,68
	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	9,74
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.	IPM	74,02
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (%)	75
	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%)	19
	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	66,46
	Indeks Pembangunan Gender (%)	61,59
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,70
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.	Angka melek huruf	96,11
	Angka rata-rata lama sekolah	7,84
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,39
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	66,67
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	51,78
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	113,54
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	93,39
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	79,71
	APS SD/MI	94,36
	APS SMP/MTs	64,86
	APS SMA/SMK/MA	51,69
	Angka Kematian Bayi	10,34
	Angka Kematian Balita	18,75
	Gizi Buruk Balita	0,97
	Kematian ibu (per 100.000 orang)	136,17
	Penderita Penyakit Malaria (per 1000)	3,05
	Prevelensi HIV (orang)	4,79
	Penderita DBD (per 100.000 orang)	16,47

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
	Jumlah Puskesmas (unit)	65,00
	Jumlah Posyandu (unit)	1.036,40
	Jumlah Dokter Se Bangka Belitung (orang)	547,70
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,00
	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%)	75,00
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (orang)	37.225,90
Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.	Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)	5
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.	Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)	360
	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Kolong (waduk buatan) (%)	65
	Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)	17
Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	25
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Ketaatan terhadap RTRW	102,50
	Rasio Ruang Terbuka Hijau	25
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,68
	Panjang jalan dilalui roda 4	0,76
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,70
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22,00
	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	67,22
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	68,03
	Persentase Penduduk berakses air bersih (%)	75,00
	Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit)	70,00
	Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)	75
	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%)	75
	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah (unit)	4
Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	10
Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Cakupan Penegakan PERDA (%)	95
	Cakupan Penyelesaian PERDA (%)	95
	Rasio Kemandirian Daerah (%)	64
	Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)	76
	Opini Audit BPK	WTP
	Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)	3
	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)	6,5

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
	Cakupan Mitigasi Kebencanaan (%)	60
	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	70
	Indeks Demokrasi Indonesia (peringkat di Indonesia)	15
	Angka Kriminalitas	0,00396
	Jumlah unjuk rasa (kali)	3,00
	Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)	80

4.4. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan tahun 2014 juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Lokasi yang akan menjadi perhatian utama dalam pembangunan tahun 2014 adalah di daerah kantong-kantong kemiskinan dimana keluarga miskin tinggal. Sebaran daerah kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel IV.8.

Tabel IV.8
Sebaran Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	7,81	21.700	280.069	0,92	0,19
2.	Kab. Belitung	10,13	15.800	367.883	1,25	0,25
3.	Kab. Bangka Barat	5,25	9.200	271.761	1,09	0,30
4.	Kab. Bangka Tengah	8,07	13.100	342.841	1,07	0,27
5.	Kab. Bangka Selatan	6,19	10.700	274.125	1,01	0,23
6.	Kab. Belitung Timur	10,36	11.100	336.847	1,42	0,32
7.	Kota Pangkalpinang	6,02	10.600	334.337	0,92	0,21
8.	Prov.Kep. Babel	6,51	67.750	286.330	0,93	0,23

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011

Berdasarkan **Tabel IV.8**, persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur sebesar 10,36 persen dan yang terendah adalah Kota Pangkalpinang dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,02 persen.

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan daerah, program pembangunan daerah, beserta indikator dan target kinerja yang dilengkapi dengan SKPD penanggung jawab dapat dilihat pada tabel IV.9.

Tabel IV.9
Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi I : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan					
1.	- Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi - Program SATAM EMAS	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM (%)	N/A	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM (unit)	Pedesaan= 305, perkotaan= 643	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Jumlah Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan (unit)	Perikanan=22%, perkebunan=28%, pariwisata=2%, perdagangan= 188%, pangan=60%	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif (%)	0,78	Dinas Koperasi dan UMKM
			Diterbitkannya Sertifikat Halal untuk UMKM (produk)	5 Produk	Dinas Koperasi dan UMKM
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Meningkatnya persentase Badan Usaha Milik Desa yang aktif (%)	10,00	BPMPD
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah	jumlah kebijakan yang dihasilkan (kebijakan)	100,00	Biro Ekonomi
		Perencanaan Pembangunan Bidang	Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan	50,00	Bappeda dan Statistik

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ekonomi	ekonomi (%)		
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	N/A	Dinas Koperasi dan UMKM
		Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Tersalurkannya kredit dalam rangka pengembangan minapolitan (Milyar)	0,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Ekonomi Kreasif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK yang dihasilkan (unit)	N/A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Ekonomi Kreasif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang dihasilkan (unit)	N/A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Perikanan Budidaya	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani pembudidaya ikan (cluster)	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)	-	Dinas KUMKM
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)	50,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Jumlah industri berbasis sumber daya alam yang terbangun (unit)	2,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Penerapan Teknologi	Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil	N/A	Dinas Pertanian, Perkebunan dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pertanian/Perkebunan	produksi pertanian (%)		Peternakan
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	N/A	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah (pelaku)	N/A	BKPM
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Terciptanya pasar desa (unit)	2,00	BPMPD
		Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata	Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata (%)	N/A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Tingkat produksi dan produktivitas hasil komoditas kelautan dan perikanan (%)	N/A	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah ketersediaan sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (pasar)	3,00	Dinas KUMKM
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang terkendali dan terlindungi (desa)	42,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat penguatan institusi pasar dalam negeri (pasar)	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat perluasan jejaring pengembangan pariwisata (%)	N/A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah (%)	N/A	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Tingkat kelestarian lingkungan hidup kawasan usaha pertambangan (%)	N/A	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	Bakorluh
		Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	Bakorluh
		Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	Bakorluh
		Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	tingkat produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM (%)	N/A	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi ketentuan <i>good corporate governance (unit)</i>	-	Dinas KUMKM
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	N/A	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi	Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Tingkat Perkembangan sentra-sentra industri potensial (unit)	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program SATAM EMAS				
	Penguatan <i>rural urban linkages</i>	Penataan Struktur Industri	Tingkat Daya Saing Produk-produk industri kecil dan menengah (tinggi/menengah/rendah)	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	60,00	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat pendapatan petani (%)	rendah	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Peningkatan Produksi Pertanian	Terbentuknya kawasanPengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi (kawasan)	-	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Tersedianya sumberdaya energi dalam mendukung kebutuhan pasokan energi di babel	PLTU 2x30 MW, JTM, JTR dan 1 Perda	Dinas Pertambangan dan Energi
		Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah (sektor)	-	BKPM
3	- Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi - Program SATAM EMAS	Pengembangan Perikanan Tangkap	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani pembudidaya ikan (cluster)		Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi - Penguatan <i>rural</i>	Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan		Badan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	urban linkages		masyarakat (%)		
		Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan (kasus)		Dinas Kehutanan
		Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	tersedianya 1 laporan DED PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil		Dinas Pertambangan dan Energi
		Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Tingkat kelestarian lingkungan hidup kawasan usaha pertambangan (%)		Dinas Pertambangan dan Energi
Misi 2 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)					
1	Peningkatan pelayanan kesehatan	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Menurunnya kesakitan malaria per 1000 penduduk	< 1	Dinas Kesehatan
			Menurunnya kesakitan DBD per 100.000 penduduk	< 46	Dinas Kesehatan
			Menurunnya Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko)	< 10	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kasus baru (BTA positif) yang disembuhkan (persentase)	90,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya rumah sehat yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase)	90,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)	74,00	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	100,00	Dinas Kesehatan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (persentase)	70,00	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kab/Kota yang memiliki posyandu purnama mandiri (Persentase)	40,00	Dinas Kesehatan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya kematian ibu per kelahiran hidup	27,00	Dinas Kesehatan & RSJ
			Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	98,00	Dinas Kesehatan
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita yang ditimbang berat badan	78,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan (Persen)	100,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)	100,00	Dinas Kesehatan
		Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengolahan makanan yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase)	85,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya kematian ibu per kelahiran hidup	27,00	Dinas Kesehatan
			Menurunnya Angka kematian bayi	28,00	Dinas Kesehatan
		Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya fasilitas RS yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS) Persentase)	100,00	Dinas Kesehatan & RSJ

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Progran Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya sarana prasarana RS sesuai standar (Persentase)	100,00	Dinas Kesehatan & RSJ
		Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1	100,00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes	Meningkatnya Cakupan pelayanan Laboratorium	95,00	Dinas Kesehatan
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar & rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan & RSJ
2.	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	PAUD	Meningkatnya APK PAUD	0,50	Dinas Pendidikan
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya APK SD Sederajat	1,16	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya APM SD Sederajat	0,97	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya APK SMP Sederajat	0,98	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya APM SMP Sederajat	0,84	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya APK Pendidikan Menengah	0,98	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Non Formal	Menurunnya Buta Aksara	0,03	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Warga Belajar Paket A, B dan C	20.000,00	Dinas Pendidikan
3.	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif	1,00	BPAP
		Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase SDM kearsipan yang berkualitas (%)	100,00%	BPAP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Raskintis	Persentase penduduk miskin yang menerima Raskin	1,00	BPMPD
		Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatnya penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (Persentase)	100,00	Dinas Kesehatan
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Persentase Koperasi dan UMKM aktif	1,00	KUMKM
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan	Persentase kemiskinan	4,2%	BPMPD
		Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dengan dokumen RPJMD	90,00%	Bappeda
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi sebagai Tempat tinggal dan tempat berusaha Yang layak	600 KK	Disnaker
		Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yg Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Sistem Pengembangan Ekonomi Wilayah Yang Berdaya Saing	60,00%	Disnaker
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan yang ada di desa dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten/kota	100,00%	BPMPD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (JUKNIS, JUKLAK, dan lain-lain)	100,00%	BPMPD
			Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil melaksanakan administrasi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100,00%	BPMPD
		Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga yang ada di desa/kelurahan	50,00%	BPMPD
		Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan	Prosentase keterlibatan masyarakat dalam membangun desa	100,00%	BPMPD
		Bencana Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan	100,00%	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Tingkat keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	69,95	BPPPAKB
		Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00%	BPPPAKB
		Pembinaan Generasi Muda	Terwujudnya peningkatan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan	1798 pemuda	Dispora

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada even POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	≤ 15	Dispora
		Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah	Meningkatnya sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal	90,00%	Biro Kesra
		Manajemen Layanan Pendidikan	Lembaga PAUD menerapkan MPMBS	100,00%	Dinas Pendidikan
			SD/MI/SDLB menerapkan MPMBS	100,00%	Dinas Pendidikan
			SMP/MTS/SMPLB Menerapkan MPMBS	100,00%	Dinas Pendidikan
			SMA/SMK/MA/SMALB menerapkan MPMBS	100,00%	Dinas Pendidikan
4.	Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya desa yang difasilitasi dan dikembangkan sebagai Desa Wisata (DESA)	90,00	Budpar
		Pengembangan Nilai-nilai Budaya	Meningkatnya cagar budaya dan museum yang dilestarikan (Persen)	4,00	Budpar
		Pembinaan Seni dan Perfilman	Meningkatnya kreatifitas karya seni dan perfilman (Persen)	50,00	Budpar
		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Adat (Persen)	50,00	Budpar
		Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Meningkatnya pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya	50,00	Budpar
		Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Meningkatnya pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya	50,00	Budpar
3	Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya Kelulusan SD/MI	1,00	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Menurunnya Mengulang SD/MI	4.0%	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Kelulusan SMP/MTs	1,00	Dinas Pendidikan
			Menurunnya Mengulang SMP/MTs	0,00	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya Kelulusan SMA/MA	1,00	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Kelulusan SMK	1,00	Dinas Pendidikan
			Menurunnya Mengulang Pendidikan Menengah	0,00	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rasio peningkatan kemampuan pegawai pada jabatan struktural dan teknis fungsional terhadap jumlah pegawai se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.960,00	Bandiklat
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio peningkatan kemampuan pegawai pada jabatan struktural dan teknis fungsional terhadap jumlah pegawai se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.245,00	Bandiklat, BKD
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya DO SD/MI	0,00	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI	1,00	Dinas Pendidikan
			Menurunnya DO SMP/MTs	0,00	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Angka Melanjutkan SMP/MTs	1,00	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya DO Pendidikan Menengah	0,01	Dinas Pendidikan
		Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	9,7	Dinas Kesehatan & BKD Pemprov
		Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	34,3	Dinas Kesehatan &

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya Rasio perawat per 100.000 penduduk	337,6	Dinas Kesehatan &
			Meningkatnya Rasio bidan per 100.000 penduduk	96,00	Dinas Kesehatan &
4	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,50	Dinkesos
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,50	Dinkesos
		Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,50	Dinkesos
		Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Persentase Koperasi aktif	1,00	KUMKM
		Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas TK	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas TK	60,00%	Disnaker
		Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja	75,00%	Disnaker
		Pengembangan HI dan Jamsostek	Terwujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.	60,00%	Disnaker
		Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja	60,00%	Disnaker

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Revitalisasi BLKI	Prosentase infrastruktur yang terbangun	0,85	Disnaker
		PeningkatanUpaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan	1798 pemuda	Dispora
		Pendidikan Menengah dan Tinggi	Sekolah menerapkan pendidikan kewirausahaan	1,00	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Peserta Kursus Bersertifikat	5.370,00	Dinas Pendidikan
			Menurunnya Pengangguran Terlatih	0,19	Dinas Pendidikan
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang					
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terpantaunya status mutu air	7 unit	BLHD
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	18 org	BLHD
			Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat	1500 org	BLHD
			Adanya Tindakanjutan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	18 kasus	BLHD
			Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL	50 keg	BLHD
			Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL	7 kab/kota	BLHD
			Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL	45 keg/usaha	BLHD
			Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dok	BLHD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan	7 kab/kota	BLHD
			Cakupan pelayanan persampahan		
		Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya status mutu udara	7 kota	BLHD
		Peningkatan kualitas serta akses informasi SDA dan LH	Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	8 jaringan	BLHD
			Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah	1 dok	BLHD
			Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	Dinas Kehutanan
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan	2 dok	Bappeda dan Statistik
		Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah	Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang sebanyak 75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiatanPeningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiatanPeningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	Distamben
		Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat	Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung	200 laporan pengawasan	Distamben

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang berpotensi merusak lingkungan		terhadap pelaku tambang	
		Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Terencanaannya pengelolaan DAS terpadu	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir	Dishut
			Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Dishut
		Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Dishut

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	Dishut
3	Pengendalian pemanfaatan ruang	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis	Bappeda dan Statistik
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	Tingkat kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu	14 KSP (30%)	Dinas PU
			Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel	7 kab/kota	BLHD
		Perencanaan Tata Ruang	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Dinas PU

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemanfaatan Ruang	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Dinas PU
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalnya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota	Dinas PU
		Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Juta Ha)	400 Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil Terluar yang dikelola (Pulau)	12 pulau	Dinas Kelautan dan Perikanan
Misi 4 : Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
1	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Perencanaan dan Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaaan	Meningkatnya infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil.	70,00%	Dinas PU

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil	70,00%	Distamben
		Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya infrastruktur wilayah	70,00%	Dinas PU
		Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya transportasi laut antar pulau di Bangka Belitung	70,00%	dinas Perhubungan
		Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta	4 Kerjasama	Bappeda dan Statistik
		Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Pangkalpinang sebagai kota Metro pada 2017	terwujud	Dinas PU
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Kebijakan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/ kota.	7 kebijakan	Bappeda dan Statistik
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya KEK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit	Bappeda dan Statistik
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	beroperasionalnya kawasan industri di kabupaten/kota	7 kawasan industri	Bappeda dan Statistik
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya roadmap dukungan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Sumatera	1 unit tk provinsi; 7 unit tk kab/kota	Bappeda dan Statistik
		pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan energi	70,00%	Distamben

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya prasarana jalan	75,00%	Dinas PU
		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan	60,00%	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan	60,00%	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan status bandara Depati Amir	Bandara internasional	Dinas Perhubungan
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya Tg. Ular dan Tg. Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai kawasan industri baru	Pusat Industri dan Investasi	Bappeda dan Statistik
		Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan).	Lancarnya arus barang dan penumpang melalui Trans Babel	Bappeda dan Statistik
		Pengembangan destinasi pariwisata	Terwujudnya desa wisata	10 desa wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 5 : Terwujudnya good governance dalam rangka mencapai clean government					
1.	Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	95,00	Biro Umum dan Perlengkapan, Kantor Perwakilan, Biro Pemerintahan
		Pendidikan Kedinasan	rasio jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah aparatur	95,00	Badan Diklat, BKD
		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur	90,00	Badan Diklat, BKD
			tingkat kesesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan	90,00	BKD
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	tertib administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	90,00	Badan Diklat, BKD

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tingkat kemantapan penerapan sistem pengembangan karier pegawai	90,00	BKD
		Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	menurunnya tingkat kriminalitas	10,00	Satpol PP
			Meningkatnya penguatan pelayanan dan bantuan hukum	80,00%	Satpol PP
			Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	80,00%	Satpol PP
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	100,00	Biro Hukum
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	100,00	Biro Pemerintahan
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah	90,00	Biro Pemerintahan
		Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien.	42 SKPD belum tertata	Biro Organisasi
		Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Sinkronnya penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penataan kelembagaan SKPD	Biro Organisasi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			Indikator	Target 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Nomenklatur, struktur kewenangan, dan tupoksi SKPD rasional, efektif, dan efisien	seluruh SKPD menerapkan manajemen	Biro Organisasi
		Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penempatan pejabat sesuai dengan hasil analisa jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan analisa beban kerja.	penempatan pejabat sesuai kompeten	Biro Organisasi
		Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	kuantitas dan kualitas pelayanan publik meningkat	Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM	Biro Organisasi
		Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	Nilai LAKIP minimal B	Biro Organisasi
		Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	3,00	Biro Hukum, Sekretariat Dewan
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	WTP	DPPKAD, Inspektorat, Biro Pemerintahan

B A B V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

- a. Manajemen Layanan Pendidikan
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Pendidikan Menengah dan Tinggi
- d. Pendidikan Non Formal
- e. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

2. KESEHATAN

- a. Bencana Bidang Kesehatan
- b. Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan
- c. Obat dan Perbekalan Kesehatan
- d. Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya
- e. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
- f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- g. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- h. Pengembangan Lingkungan Sehat
- i. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes
- j. Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak
- k. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- l. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- m. Perbaikan Gizi Masyarakat
- n. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- o. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- p. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- q. Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
- r. Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
- s. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- t. Upaya Kesehatan Masyarakat

3. PEKERJAAN UMUM

- a. Lingkungan Sehat Perumahan
- b. Pemanfaatan Ruang
- c. Pembangunan sistem informasi/database
- d. Pembangunan turap/talud/bronjong
- e. Pemberdayaan komunitas Perumahan
- f. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- g. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- i. Penyediaan dan pengolahan air baku
- j. Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- k. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- l. Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- m. Rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

4. PERUMAHAN

- a. Pengembangan Perumahan
- b. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- c. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan

5. PENATAAN RUANG

- a. Perencanaan Tata Ruang

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- a. Kerjasama Pembangunan
- b. Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- d. Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- e. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- f. Perencanaan pembangunan daerah
- g. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- h. Perencanaan Sosial Budaya
- i. Perencanaan Tenaga Kerja

7. PERHUBUNGAN

- a. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- c. Peningkatan pelayanan angkutan
- d. Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
- f. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- g. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

8. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pengelolaan ruang terbuka hijau
- b. Deleniasi dan konservasi sumber daya alam
- c. Konservasi Tumbuhan dan Hewan Spesifik Lokal
- d. Pencegahan kerusakan pantai dan abrasi
- e. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- f. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- g. Peningkatan Pengendalian Polusi
- h. Peningkatan kualitas serta akses informasi SDA dan LH

9. PERTANAHAN

- a. Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- d. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

10. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender
- b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- c. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

11. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- a. Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana

12. SOSIAL

- a. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- b. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah
- e. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- f. Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika
- g. Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial
- h. Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama

13. KETENAGAKERJAAN

- a. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Pengembangan HI dan Jamsostek
- c. Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. Revitalisasi BLKI
- e. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas TK

14. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
- c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
- d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
- e. Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi
- f. Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

15. PENANAMAN MODAL DAERAH

- a. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- b. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- c. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

16.KEBUDAYAAN

- a. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
- b. Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman
- c. Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya
- d. Pembinaan Seni dan Perfilman
- e. Pengelolaan kekayaan budaya
- f. Pengelolaan Keragaman Budaya
- g. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- h. Pengembangan Nilai-nilai Budaya

17.KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- b. Pembinaan Generasi Muda
- c. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- e. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- f. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- g. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

18.KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- c. Pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- f. Kemitraan Kamtibmas
- g. Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
- h. Pendidikan Politik Masyarakat
- i. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- j. Koordinasi pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilu kada

19.OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

- a. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Pendidikan Kedinasan
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- f. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah
- g. Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- h. Pembinaan dan Pengawasan Represif thdp produk Hukum Kab/Kota
- i. Penataan dan Dokumentasi Hukum
- j. Penataan di bidang administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- k. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- l. Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan
- m. Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)
- n. Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah

- o. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi
- p. Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
- q. Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
- r. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
- s. Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
- t. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
- u. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- v. Penataan Daerah Otonomi Baru
- w. Pembangunan sistem pendaftaran tanah
- x. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
- y. Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
- z. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah
- aa. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- bb. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- cc. Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat
- dd. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- ee. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- ff. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
- gg. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- hh. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- ii. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- jj. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
- kk. Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

20. KETAHANAN PANGAN

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan
- b. Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG
- c. Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
- d. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- e. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
- f. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan
- g. Raskintis

22. STATISTIK

- a. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

23. KEARSIPAN

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana Kearsipan
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- d. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- e. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- f. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- b. Kerjasama informasi dan media massa
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- d. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- e. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

B. URUSAN PILIHAN

25. PERTANIAN

- a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- b. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Petani
- e. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- f. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- g. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- h. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- i. Peningkatan Kesejahteraan Petani
- j. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- k. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- l. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

26. KEHUTANAN

- a. Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- b. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- c. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
- d. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- e. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- f. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- g. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan

27. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

- a. Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah
- b. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
- d. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- e. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
- f. Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

28. PARIWISATA

- a. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
- b. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
- c. Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata
- d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- e. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- f. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan Iptek
- g. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

29. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
- b. Pengembangan Perikanan Budidaya
- c. Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- f. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
- h. Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan
- i. Pengembangan Perikanan Tangkap

30. PERDAGANGAN

- a. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

31. PERINDUSTRIAN

- a. Penataan Struktur Industri
- b. Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial
- c. Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)
- d. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

32. KETRANSMIGRASIAN

- a. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- b. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Selanjutnya program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 merupakan penjabaran dari program yang telah disusun di dalam RPJMD Tahun 2012 – 2017. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, menjadi arah yang harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan merupakan dokumen perencanaan yang akan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAPBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun 2014.

Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang ada di RKPD ini perlu didukung dengan:

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas, dan demokratis;
2. *Good Governance* dan *Clean Government*;
3. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
4. Keberpihakan kepada rakyat (*justice for all*);
5. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta; serta
6. Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bangka Belitung.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DR. Ir. H. EKO MAULANA ALI, S.IP, M.Si, M.Sc

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana
1	Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis: Bimbingan Teknis dan Monev Pengendalian Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan (Inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir dan laut).	Kab. Bangka Selatan	1	250,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan (Inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir dan laut).	Kab. Bangka Tengah	1	250,00
	Kegiatan Strategis: Pengendalian Pencemaran Lingk. Akibat Aktivitas Industri Pertambangan Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER).	Kab. Bangka	1	150,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER).	Kota Pangkal Pinang	1	150,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER).	Kab. Bangka Barat	1	150,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.	Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan komisi penilai dan evaluasi mutu dokumen)	Provinsi Bangka Belitung	1	250,00

Kegiatan Strategis: Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Pada Das Prioritas	Provinsi Bangka Belitung	1180 ha	818,00
---	---	---	--------------------------	---------	--------

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana
2	Isu Strategis : Pengembangan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah					
	Kegiatan Strategis : Pengembangan akses layanan air bersih dan sanitasi					
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kapasitas air baku yang ditingkatkan	Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung	0,1 m ³ /dt (Pembangunan Intake dan Jar Pipa Transmisi Air Baku Kolong Bacang, Kolong Kerasak, Belinyu, Kolong Celuak)	12.400,00
3	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu					
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jembatan yang dibangun (M)	Provinsi Bangka Belitung	100 m	40.000,00
3	Isu Strategis : Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
	Kegiatan Strategis : Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir					
	Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik					
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah	Provinsi Bangka Belitung		60,00
3	Kegiatan Strategis : Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir					
	Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik					
	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal	Jumlah kapal perintis di kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terpencil	Provinsi Bangka Belitung: Kab. Bangka selatan	1 paket	750,00

4 Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kegiatan Strategis : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk	Provinsi Bangka Belitung		427,00
---	--	---------------------------------------	--------------------------	--	--------

Kegiatan Strategis : Pengembangan Lingkungan Sehat

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Provinsi Bangka Belitung	2 paket	3.232,44
---	-----------------------	--	--------------------------	---------	----------

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar	Provinsi Bangka Belitung: 2 kabupaten	2 kabupaten	40.000,00
-----------------------------------	--	--	---------------------------------------	-------------	-----------

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn)	Provinsi Bangka Belitung: 2 kabupaten	3 paket	1.820,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Provinsi						
Prioritas Nasional : Kesehatan						
KEMENTERIAN KESEHATAN						
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin	Provinsi Bangka Belitung:	1 paket	1.242,30